



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.689, 2014

KEMENHUT. Hutan Produksi. Pemanfaatan.
Keuangan. Pelaporan. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.32/Menhut-II/2014

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
(DOLAPKEU – PHP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 71 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, ditetapkan bahwa setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan wajib menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.69/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan (DOLAPKEU-PHP2H);
 - c. bahwa dengan adanya perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan dibidang Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Internasional maupun perkembangan

praktik akuntansi yang berlaku, serta untuk mengatur standar akuntansi untuk kegiatan IUPHHK Restorasi Ekosistem dan Pedoman Pelaporan Keuangan Pengelolaan Hutan, maka Peraturan sebagaimana huruf b, perlu diganti;

- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU PHP);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pengelolaan Hutan pada Perum Perhutani;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI (DOLAPKEU – PHP).**

Pasal 1

Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU – PHP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, tabel kegiatan dan perlakuan akuntansi IUPHHK-HA, IUPHHK-RE dan/atau IUPHHK-HT sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, serta contoh format laporan keuangan pemanfaatan hutan produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Kehutanan ini.

Pasal 2

Pedoman pelaporan keuangan pemanfaatan hutan produksi (DOLAPKEU – PHP), tabel kegiatan dan perlakuan akuntansi IUPHHK-HA, IUPHHK-RE dan/atau IUPHHK-HT serta contoh format laporan keuangan pemanfaatan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam, Restorasi Ekosistem dan/atau Hutan Tanaman dalam menyusun laporan keuangan perusahaan.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini Menteri, maka:

1. Perlakuan akuntansi khususnya pembebanan biaya untuk Hutan Tanaman (HT) pada daur kedua yang sebelumnya seluruh biaya kegiatan Hutan Tanaman (HT) daur kedua dibebankan sebagai biaya,

menjadi dikapitalisasi hingga tersedia tanaman siap panen untuk blok (areal) tertentu.

2. Bagi perusahaan yang telah membebaskan Hutan Tanaman (HT) dalam Pengembangan sebagai biaya, namun perusahaan tidak dapat mengidentifikasi biaya Hutan Tanaman (HT) yang seharusnya dikapitalisasi, maka perusahaan tidak perlu melakukan penyesuaian saldo laba pada periode sebelumnya.
3. Pelaporan keuangan pemanfaatan hutan yang telah disusun oleh pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE dan/atau IUPHHK-HT dan telah disahkan oleh Akuntan Publik tetap berlaku dan kemudian untuk selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Kehutanan ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 69/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan (DOLAPKEU-PHP2H), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2014

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA.
NOMOR P.32/Menhut-II/2014
TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI
(DOLAPKEU PHP).

PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas Pemerintah dalam pembangunan kehutanan pada prinsipnya adalah mewujudkan hutan yang lestari, melalui pendayagunaan sumber daya hutan secara rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan daya dukungnya serta tetap mengutamakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan kehutanan dinilai melalui 3 (tiga) aspek, yakni aspek ekonomi, sosial dan ekologi. Salah satu upaya untuk mendeteksi secara dini perkembangan pencapaian keberhasilan pembangunan kehutanan yang dilakukan oleh sektor dunia usaha selaku pengelola adalah melalui pemanfaatan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam (HA), Restorasi Ekosistem (RE) dan/atau Hutan Tanaman Industri (HTI).

Pemegang IUPHHK HA, RE dan/atau HTI wajib menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU).

Laporan keuangan menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan perusahaan. Laporan keuangan harus menyajikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan disertai dengan nilainya dan sesuai dengan azas materialitas.

Suatu laporan keuangan akan bermanfaat bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan.

Kegiatan IUPHHK HA, RE dan/atau HTI pada hutan produksi mempunyai siklus produksi yang relatif panjang, spesifik dan memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan industri lainnya, sehingga diperlukan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU-PHP), agar dapat menggambarkan seluruh kegiatan pemanfaatan hutan dimaksud dan sekaligus mempunyai daya banding antar perusahaan.

Pedoman ini menetapkan bentuk, isi dan persyaratan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan yang harus disampaikan, baik untuk keperluan penyampaian kepada Pemerintah maupun kepada pengguna laporan keuangan lainnya dan merupakan acuan yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangan.

Pedoman ini merupakan penyempurnaan atas pedoman yang sudah ada guna menampung perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan, Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Internasional maupun perkembangan praktik akuntansi yang berlaku. Penyempurnaan pedoman ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan transparansi informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan.

Penyempurnaan pedoman penyusunan pelaporan keuangan dilakukan melalui serangkaian diskusi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) antara lain meliputi Kementerian Kehutanan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), pelaku usaha dan pihak lain yang terkait sebagai narasumber. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan panduan untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan transparan.

B. Tujuan dan Ruang Lingkup Penerapan

Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU-PHP) disusun dengan tujuan dan ruang lingkup sebagai berikut;

Tujuan:

Memberikan pedoman bagi perusahaan pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-RE dan/atau IUPHHK-HTI dalam menyusun laporan keuangan, berkaitan dengan upaya:

1. Menciptakan keseragaman penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE dan/atau IUPHHK-HTI, sehingga meningkatkan daya banding antar laporan keuangan karena laporan keuangan telah disusun berdasar PABU secara benar serta disajikan dalam format yang seragam dan menggunakan deskripsi yang sama untuk pos-pos sejenis;
2. Menerapkan standar dan praktik akuntansi yang relevan dengan kegiatan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE dan/atau IUPHHK-HTI;
3. Mencerminkan laporan keuangan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE dan/atau IUPHHK-HT yang lebih informatif dan transparan;
4. Memberikan gambaran perkembangan dan kondisi keuangan IUPHHK-HA, IUPHHK-RE dan/atau IUPHHK-HTI yang oleh Pemerintah (regulator) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan;
5. Mendukung IUPHHK-HA, IUPHHK-RE dan/atau IUPHHK-HTI agar mampu secara profesional memanfaatkan hutan secara tertib, menaati semua ketentuan dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku;
6. Mendukung usaha Pemerintah di dalam pengenaan pajak, pemungutan Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan secara tertib.

Ruang Lingkup Penerapan:

Pemegang IUPHHK Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, dan IUPHHK Hutan Tanaman Industri.

C. Acuan Penyusunan

Acuan yang digunakan dalam menyusun Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aktivitas IUPHHK-HA, IUPHHK-RE dan/atau IUPHHK-HTI yang berhubungan dengan akuntansi dan laporan keuangan;
2. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK);
3. *International Accounting Standard* (IAS), *Statement of Financial Accounting Standard* (SFAS);
4. Praktek-praktek akuntansi yang berlaku umum, kesepakatan antar negara, kebiasaan industri yang baru, dan standar akuntansi negara lain.

Dalam hal terdapat perbedaan antara peraturan perundang-undangan dan PSAK dalam penyusunan laporan keuangan, maka acuan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan terkait.

D. Struktur Pedoman

Pedoman ini terdiri atas 5 (lima) bagian yang tak terpisahkan yaitu:

1. Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU-PHP)
2. Tabel 1.A : Kegiatan dan Perlakuan Akuntansi IUPHHK HA;
Tabel 1.B : Kegiatan dan Perlakuan Akuntansi IUPHHK-HT (HT Dalam Pengembangan);
Tabel 1.C : Kegiatan dan Perlakuan Akuntansi IUPHHK-HT (HT Siap Panen);
Tabel 1.D : Kegiatan dan Perlakuan Akuntansi IUPHHK-RE (Sebelum Keseimbangan Ekosistem / Fase 1);
Tabel 1.E : Kegiatan dan Perlakuan Akuntansi IUPHHK-RE (Sesudah) Keseimbangan Ekosistem / Fase 2).
3. Contoh Format Laporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.

BAB II

KARAKTERISTIK KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
(IUPHHK) HUTAN ALAM (HA)/ RESTORASI EKOSISTEM (RE)/HUTAN
TANAMAN INDUSTRI (HTI)

A. Gambaran Umum Kegiatan IUPHHK HA/RE/HT

Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan sektor industri lain, yang ditunjukkan oleh adanya aktivitas pengelolaan dan transformasi biologis atas tanaman untuk menghasilkan produk yang akan dikonsumsi atau diproses lebih lanjut.

Untuk dapat melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut, harus mendapatkan izin dari pemerintah yang berupa :

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (IUPHHK-HA);
2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (IUPHHK- RE); dan
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK- HT);

Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, restorasi ekosistem dan hutan tanaman pada hutan produksi dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.

B. Resiko Terkait Industri

Resiko yang timbul terkait industri adalah sebagai berikut :

1. Kondisi Nasional, meliputi :
 - a. Peraturan perundangan
Risiko hilangnya hak atau bertambahnya kewajiban akibat perubahan pengaturan dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan produksi dan pemasaran, misalnya dengan adanya pembatasan lahan, pengenaan pajak, pembatasan wilayah distribusi regional, dan lain-lain.
 - b. Masalah Perizinan
Dengan bertambahnya jumlah penduduk, menyebabkan meningkatnya kebutuhan konsumsi kayu, termasuk hasil hutan lainnya. Pada satu sisi ini merupakan peluang bagi kegiatan IUPHHK untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produknya. Di lain pihak, kondisi ini merupakan suatu ancaman karena semakin berkurangnya lahan hutan yang tersedia untuk menjaga keseimbangan ekosistem sehingga penerbitan izin baru IUPHHK semakin diperketat. Selain itu, terdapat risiko atas perizinan yang tidak diperpanjang lagi setelah dilakukan proses evaluasi atau pencabutan izin.
 - c. Kegagalan panen yang diakibatkan oleh keadaan alam.
Kegiatan IUPHHK merupakan usaha yang sangat tergantung oleh keadaan alam. Kekeringan, kebakaran dan bencana lain seperti hama penyakit merupakan risiko melekat yang harus dihadapi oleh perusahaan pada industri ini.

- d. Pemogokan karyawan
Semakin kuatnya peranan serikat karyawan dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah atau perusahaan, menyebabkan karyawan lebih kritis dalam menyuarakan ketidakpuasan terhadap kondisi kerja seperti kompensasi, perubahan peraturan, sampai keadaan ekonomi dan politik yang tidak stabil. Ketidakpuasan ini bisa dinyatakan dalam bentuk demonstrasi dan pemogokan massal yang berpotensi menimbulkan kerusuhan (*riot*).
 - e. Kerusuhan dan penjarahan
Tidak kondusifnya kondisi sosial dan ekonomi, menyebabkan masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang dapat menyebabkan pengerahan massa dalam menyuarakan ketidakpuasan terhadap perusahaan.
 - f. Perambahan dan pembalakan liar (*illegal logging*)
Meningkatnya kebutuhan lahan dan permintaan akan kayu mengakibatkan prospek bisnis pada bidang ini semakin menjanjikan sehingga ada pengusaha di bidang IUPHHK yang menyalahgunakan izin yang diperoleh. Di samping itu, pihak-pihak lain yang tidak memiliki izin ikut memanfaatkan kawasan hutan secara ilegal yang secara tidak langsung dapat merugikan pihak pemegang izin.
2. Kondisi internasional dan kawasan regional menyangkut :
 - a. Perubahan harga dan fluktuasi nilai tukar valuta asing
Hasil hutan kayu/bukan kayu merupakan salah satu komoditas perdagangan internasional. Perubahan pada harga pasar internasional berdampak pada kuantitas produksi. Jika harga pasar internasional turun drastis (anjlok) maka akan menjadi disinsentif bagi kegiatan produksi. Demikian pula dengan fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi daya saing. Jika nilai tukar rupiah menguat tajam, maka harga hasil hutan menjadi relatif lebih mahal sehingga permintaan menurun.
 - b. Kuota (salah satu *non tariff barrier*)
Penetapan kuota ekspor/impor akan berpengaruh pada kuantitas produksi dan volume perdagangan.
 - c. Perubahan iklim
Perubahan iklim secara global menyebabkan banyaknya tekanan dari berbagai pihak terkait dengan kelestarian lingkungan. Hal ini akan berdampak kepada pembatasan perizinan yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan kuantitas produksi hasil hutan.
 - d. Pembatasan-pembatasan tertentu
Kesadaran masyarakat internasional akan kelestarian lingkungan dapat menyebabkan pencekalan atau embargo atas produk hasil hutan negara tertentu termasuk Indonesia.
 3. Perikatan.
Ikatan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan IUPHHK sesuai dengan kewajiban yang diharuskan oleh pemerintah.
 4. Perubahan teknologi
Perkembangan teknologi khususnya di sektor kehutanan mengakibatkan teknologi yang ada tidak ekonomis untuk dipakai. Walaupun masih dipakai, perusahaan yang menggunakan teknologi lama menjadi kurang mampu bersaing dengan perusahaan yang menggunakan teknologi baru.

5. Risiko *Leverage*

Pengembangan perusahaan IUPHHK, terutama dalam modal kerja, pembangunan sarana dan prasarananya, membutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Keterlibatan kreditor sebagai penyedia sumber dana tentunya tidak bisa dihindari. Semakin besarnya pendanaan dari luar (*external financing*) mengakibatkan semakin besar pula kemungkinan perusahaan tidak mampu melunasi hutang tersebut.

C. Perlakuan Akuntansi Khusus

Kegiatan IUPHHK HA, IUPHHK-RE dan IUPHHK-HTI masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda.

a. Hutan Alam

Pada hutan alam, kegiatan pemanenan atau penebangan dilakukan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penanaman dan pemeliharaan hutan.

b. Restorasi Ekosistem

Pada Restorasi Ekosistem umumnya kegiatan dimulai dengan pelaksanaan tahapan kegiatan restorasi ekosistem untuk pemulihan keseimbangan ekosistem dalam upaya mencapai keseimbangan hayati. Sebelum keseimbangan ekosistem tercapai, manfaat yang dapat diperoleh hanya berasal dari hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan.

Sedangkan setelah keseimbangan ekosistem manfaat keseluruhan hasil hutan, termasuk hasil hutan kayu sudah dapat diperoleh. Dengan demikian, konsekuensinya adalah biaya yang timbul selama proses restorasi sebelum keseimbangan ekosistem diakumulasikan menjadi aset perusahaan, dimana biaya yang timbul pada zona yang hasil hutan kayunya tidak dapat dimanfaatkan diakui sebagai aset hak kelola.

Pencatatan biaya yang dikeluarkan sebagai aset memungkinkan kegiatan penanaman pada zona produksi dan atau zona lindung memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan untuk kegiatan investasinya, hal ini sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pencatatan biaya yang dikeluarkan sebagai aset hak kelola memungkinkan pemegang izin mendapatkan donasi dari pihak donatur untuk kegiatan investasinya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Hutan Tanaman

Pada hutan tanaman umumnya kegiatan dimulai dengan penanaman dan pemeliharaan kemudian dilanjutkan dengan pemanenan hasil hutan. Pendapatan pada IUPHHK-HT baru diperoleh ketika tanaman telah menghasilkan, konsekuensinya biaya yang timbul selama proses penanaman dan pemeliharaan diakumulasikan menjadi aset perusahaan. Pencatatan biaya yang dikeluarkan sebagai aset memungkinkan kegiatan pada hutan tanaman memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan untuk kegiatan investasinya, hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlakuan akuntansi yang spesifik:

a. Hutan Alam

Pemegang IUPHHK-HA mempunyai hak dan kewajiban untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

Pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut harus didukung oleh perencanaan yang baik serta tersedianya tenaga teknis kehutanan dan tenaga profesional.

Rincian kegiatan pemanfaatan hutan untuk hutan alam, dapat dilihat pada Tabel 1.A.

b. Restorasi Ekosistem

Pemegang IUPHHK-RE mempunyai hak dan kewajiban untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi setelah tercapainya keseimbangan ekosistem melalui kegiatan restorasi, pelepasliaran, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan, pemanenan dan pemasaran.

Pemanfaatan hasil hutan kayu pada IUPHHK-RE juga harus tetap didukung oleh perencanaan yang baik dengan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada melalui penerapan silvikultur restorasi ekosistem serta tersedianya Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) dan tenaga profesional.

Rincian kegiatan pemanfaatan hutan untuk restorasi ekosistem dapat dilihat pada Tabel 1.D dan 1.E.

c. Hutan Tanaman

Pemegang IUPHHK-HT mempunyai hak dan kewajiban untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran.

Pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut harus didukung oleh perencanaan yang baik serta tersedianya tenaga teknis kehutanan dan tenaga profesional.

Rincian kegiatan pemanfaatan hutan tanaman dapat dilihat pada Tabel 1.B dan 1.C.

Ketentuan Pengakuan dan Pengukuran Biaya

a. Hutan Alam

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam akan dibebankan sebagai biaya produksi kecuali biaya tersebut memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Biaya yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun akan dikapitalisasi dan diklasifikasikan sebagai aset tetap atau beban tangguhan tergantung jenisnya. Jika pengeluaran tersebut terkait dengan pembangunan suatu aset tetap berwujud maka pengeluaran tersebut akan dikapitalisasi sebagai aset tetap dan didepresiasi sesuai masa manfaatnya. Jika pengeluaran tersebut terkait dengan pengeluaran yang tidak memiliki bentuk fisik maka akan diklasifikasikan sebagai beban tangguhan dan diamortisasi sesuai masa manfaatnya.

Pemilihan metode depresiasi dan amortisasi disesuaikan dengan manfaat dari aset tersebut dengan jangka waktu paling lama selama jangka waktu konsesi.

Penanaman tanah kosong pada areal IUPHHK HA yang menggunakan sistem silvikultur tertentu, tanamannya menjadi aset perusahaan selama masa konsesi.

Perlakuan akuntansi untuk pengakuan dan pengukuran biaya untuk hutan alam dapat dilihat pada Tabel 1. A

b. Restorasi Ekosistem

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka restorasi ekosistem di fase 1 (sebelum mencapai keseimbangan) yang menghasilkan manfaat pada fase 2 (setelah mencapai keseimbangan) diakui sebagai aset. Klasifikasi aset yang diakui tergantung dari bentuk manfaat yang didapat, yaitu:

Pengeluaran dari pelaksanaan tahapan kegiatan restorasi ekosistem yang memungkinkan menghasilkan manfaat pada fase 2 dalam bentuk hasil hutan kayu diakui sebagai aset tanaman (Hutan Restorasi Ekosistem dalam Pengembangan/HRE dalam Pengembangan). Ketika keseimbangan ekosistem tercapai, HRE dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi HRE. Ketika hasil hutan kayu telah dimanfaatkan, maka HRE akan diakui sebagai HPP melalui amortisasi dengan metode unit produksi.

Pengeluaran dari pelaksanaan tahapan kegiatan restorasi ekosistem yang dapat menghasilkan manfaat pada fase 2 dalam bentuk hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan, dan jasa lingkungan diakui sebagai HRE dalam Pengembangan-Hak Kelola. Ketika keseimbangan ekosistem tercapai, HRE dalam Pengembangan-Hak Kelola direklasifikasi menjadi HRE-Hak Kelola, dan selanjutnya diamortisasi dengan metode garis lurus menjadi HPP selama sisa masa manfaat atau masa konsesi, mana yang lebih pendek.

Akumulasi biaya yang telah dikeluarkan dalam HRE dalam Pengembangan dilakukan untuk setiap zona dalam blok RKU/RKT. Perusahaan harus memiliki catatan detail biaya yang diakumulasikan untuk masing-masing dalam blok RKU/RKT per tahun tanam.

Perlakuan akuntansi untuk pengakuan dan pengukuran biaya untuk hutan tanaman dapat dilihat pada Tabel 1.D dan I.E.

c. Hutan Tanaman

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman akan diakumulasikan sampai dengan tanaman tersebut menghasilkan ke dalam akun Hutan Tanaman (HT) Dalam Pengembangan. Untuk biaya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, biaya yang dimasukkan dalam HT Dalam Pengembangan adalah biaya depresiasi atau amortisasinya.

Akumulasi biaya yang telah dikeluarkan dalam HT Dalam Pengembangan dilakukan untuk setiap blok atau areal. Perusahaan harus memiliki catatan detail biaya yang diakumulasikan untuk masing-masing blok atau areal per tahun tanam.

Jika dalam suatu areal hutan tanaman yang akan ditanami terdapat hasil hutan yang dapat dimanfaatkan, maka penjualan hasil hutan tersebut akan dicatat mengurangi nilai HT Dalam Pengembangan dan tidak diklasifikasikan sebagai pendapatan lain-lain. Hal ini sesuai dengan kaidah bahwa penghasilan yang diperoleh terkait dengan perolehan aset tetap akan dicatat mengurangi harga perolehan aset tetap.

Jika dalam satu blok atau areal hutan tanaman terdapat tanaman yang telah siap panen maka nilai HT Dalam Pengembangan akan dipindahkan menjadi HT Siap Panen. HT Siap Panen ini akan didepresiasi dengan menggunakan metode unit produksi atau garis lurus.

Untuk HT Siap Panen dengan hasil panen kayu maka depresiasi dilakukan dengan menggunakan metode unit produksi.

Sedangkan HT Siap Panen dengan hasil panen non kayu (HHBK), maka depresiasi dilakukan dengan metode garis lurus selama masa manfaat tanaman.

Perlakuan akuntansi untuk pengakuan dan pengukuran biaya untuk hutan tanaman dapat dilihat pada Tabel 1.B dan I.C.

Ketentuan Peralihan

Terbitnya PP No 6/2007 jo PP No.3/2008 pasal 38 ayat (4) yaitu "*tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HT merupakan asset pemegang izin usaha*".

Dengan adanya perubahan peraturan tersebut, maka perlakuan akuntansi khususnya pembebanan biaya untuk HT pada daur kedua yang sebelumnya seluruh biaya kegiatan HT daur kedua dibebankan sebagai biaya, menjadi dikapitalisasi hingga tersedia tanaman siap panen untuk blok (areal) tertentu.

Perubahan perlakuan akuntansi ini akan membawa dampak cukup besar terhadap laporan keuangan, terutama bagi perusahaan yang sebelumnya telah membebankan biaya HT yang seharusnya dikapitalisasi. Bagi perusahaan yang telah membebankan HT Dalam Pengembangan sebagai biaya namun perusahaan tidak dapat mengidentifikasi biaya HT yang seharusnya dikapitalisasi, maka perusahaan tidak perlu melakukan penyesuaian saldo laba pada periode sebelumnya.

Catatan atas laporan keuangan harus menjelaskan perubahan perlakuan akuntansi HT Dalam Pengembangan ini minimal selama jangka waktu daur tanaman, karena pengaruhnya akan berdampak pada nilai HT Dalam Pengembangan. Jika tidak memungkinkan disajikannya laporan keuangan komparatif karena dampak dari perubahan pedoman ini, maka alasannya harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan (full disclosure).

D. Pengertian

Beberapa istilah yang dipergunakan dalam pedoman ini adalah :

1. Industri Kehutanan adalah segala usaha di bidang pemanfaatan hutan yang meliputi kegiatan peningkatan kualitas potensi hutan, produksi hutan, dan pemanfaatan hasil hutan termasuk kegiatan pengolahan hasil hutan kayu/bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
2. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
3. IUPHHK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.
4. IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penagkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
5. Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
6. Sistem Silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau sistem teknik bercocok tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen.
7. HT Dalam Pengembangan adalah HT yang belum menghasilkan. Digunakan sebagai sebutan akun untuk menampung biaya-biaya yang terjadi sejak saat penanaman sampai saat tanaman tersebut siap panen.
8. HT Siap Panen adalah sebutan akun untuk biaya-biaya yang sudah selesai dikapitalisasi dan selanjutnya didepresiasi ke dalam biaya produksi.
9. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK), selanjutnya disingkat dengan RKU adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja, antara lain memuat aspek kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan sosial ekonomi yang disusun berdasarkan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang disahkan Menteri Kehutanan. Jangka waktu untuk RKUPHHK berlaku selama 10 (sepuluh) tahun yang disusun oleh pemegang izin dan dilaporkan kepada Menteri Kehutanan.
10. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK), selanjutnya disingkat dengan RKT adalah Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RKUPHHK.

11. Areal Kerja (Areal) adalah areal IUPHHK yang ditetapkan oleh Menteri.
12. Blok adalah bagian dari areal kerja dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan yang mendapat perlakuan silvikultur yang sama di HTI atau disebut bagian hutan di pengelolaan hutan oleh BUMN.
13. Petak Kerja (Petak) adalah bagian dari blok kerja dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan silvikultur yang sama.
14. Blok RKT HT Dalam Pengembangan adalah blok RKT di HT.
15. Kegiatan Perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan secara teratur, sistematis, berdasarkan pengetahuan, metode ataupun teknik tertentu yang menghasilkan rencana kebijaksanaan, rencana program dan rencana proyek serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaan.
16. Kegiatan Penanaman adalah kegiatan perbenihan/pembibitan, penyiapan lahan, seleksi dan pemindahan bibit sampai penanaman hutan secara serba guna dan lestari.
17. Kegiatan Pembinaan Hutan adalah kegiatan penataan dan perawatan sumber daya hutan dalam rangka meningkatkan hasil hutan produksi. Kegiatan tersebut meliputi : penanaman, penyulaman, pemangkasan tanaman, penjarangan, pendangiran, pemupukan, dan pemberantasan hama dan penyakit.
18. Kegiatan Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan adalah kegiatan pengendalian dan penjagaan sumber daya hutan dari bahaya kebakaran dan bahaya lainnya yang meliputi: pembangunan menara api, pengadaan sarana dan prasana kebakaran, pembuatan ilaran api, pembangunan pos jaga, pengerahaan tenaga terlatih, patroli dan penyuluhan, penggunaan bahan dan perlengkapan pengamanan, serta biaya asuransi.
19. Kegiatan Pemanenan Hasil Hutan adalah kegiatan pemanenan hasil hutan sehingga dapat dipasarkan, meliputi: penebangan kayu, penyaradan, pemuatan, pengangkutan ke Tempat Pengumpulan Kayu (TPn), pengangkutan ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK), sampai proses pembongkaran.
20. Kegiatan Pemenuhan Kewajiban kepada Negara terdiri dari kewajiban yang bersifat teknis dan finansial dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kewajiban Finansial meliputi: pembayaran PSDH, pembayaran DR, pelunasan PBB areal dan pungutan daerah.
21. Kegiatan Pemenuhan Kewajiban kepada Lingkungan dan Sosial adalah kegiatan pemenuhan kewajiban terhadap lingkungan dan sosial meliputi: kelola lingkungan, pemantauan lingkungan, kelola sosial (CSR/PMDH), evaluasi lingkungan dan sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).
22. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana adalah kegiatan yang meliputi tapi tidak terbatas pada, pembangunan jembatan dan jalan induk, pembangunan jembatan dan jalan cabang, pembangunan jembatan dan jalan ranting, pengadaan rel, pembangunan *base camp* dan pembangunan TPn/TPK/*log pond/log yard*/dermaga.

23. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan adalah kegiatan perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurusan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.
24. Hutan Restorasi Ekosistem (HRE) dalam Pengembangan adalah hutan alam pada hutan produksi yang belum mencapai keseimbangan ekosistem. Digunakan sebagai sebutan akun untuk menampung biaya-biaya yang terjadi sejak saat penanaman sampai keseimbangan ekosistem tercapai. Jika kawasan HRE dalam Pengembangan tersebut tidak boleh dimanfaatkan hasil kayunya, maka dikategorikan sebagai HRE dalam Pengembangan-Hak Kelola.
25. HRE adalah sebutan akun untuk biaya-biaya HRE dalam Pengembangan yang sudah selesai dikapitalisasi dan selanjutnya diamortisasi ke dalam biaya produksi. Jika kawasan HRE tersebut tidak boleh dimanfaatkan hasil kayunya, maka dikategorikan sebagai HRE-Hak Kelola.

BAB III

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI

A. Pedoman Umum

1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung-jawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

2. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Manajemen perusahaan pemegang izin bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

3. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari

- Neraca;
- Laporan Laba Rugi;
- Laporan Perubahan Ekuitas;
- Laporan Arus Kas; dan
- Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan perusahaan IUPHHK HA, IUPHHK-RE dan/atau HTI harus dibuat dalam bahasa Indonesia.

5. Mata Uang Pelaporan

Mata uang pelaporan perusahaan Indonesia adalah Rupiah.

6. Periode Pelaporan

Tahun buku perusahaan mencakup periode satu tahun kalender (Januari s/d Desember). Apabila, dalam keadaan luar biasa, tahun buku perusahaan berubah dan laporan keuangan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau pendek dari periode satu tahun maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan:

- a. Alasan perubahan tahun buku;
- b. Alasan penggunaan tahun buku yang lebih panjang atau pendek dari periode satu tahun; dan
- c. Fakta bahwa jumlah komparatif dalam laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan.

7. Penyajian Secara Wajar

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, arus kas perusahaan disertai pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK.

- b. Informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan laporan keuangan, serta yang sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum tetap dilakukan untuk menghasilkan penyajian yang wajar walaupun pengungkapan tersebut tidak diharuskan oleh PSAK.
- c. Penyajian aset lancar terpisah dari aset tidak lancar dan kewajiban lancar terpisah dari kewajiban tidak lancar. Aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.
- d. Saldo transaksi sehubungan dengan kegiatan operasi normal perusahaan, disajikan pada neraca secara terpisah antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak ketiga pada masing-masing akun.
- e. Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Perusahaan menyajikan di laporan laba rugi, rincian beban dengan menggunakan klasifikasi yang didasarkan pada fungsi beban di dalam perusahaan, sedangkan pada catatan atas laporan keuangan beban tersebut dirinci menurut sifatnya.
- f. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas :
 - 1) Nama perusahaan pelapor atau identitas lain;
 - 2) Cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu entitas atau beberapa entitas;
 - 3) Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan;
 - 4) Mata uang pelaporan; dan
 - 5) Satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan
- g. Laporan Arus Kas dapat disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung (*indirect method*) atau metode langsung (*direct method*).
- h. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, yang sifatnya memberikan penjelasan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif terhadap laporan keuangan, sehingga menghasilkan penyajian yang wajar.
- i. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai dengan komponen utamanya. Setiap pos dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas harus direferensi silang (*cross-reference*) dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan, jika dilakukan pengungkapan.
- j. Pengungkapan dengan menggunakan kata "sebagian" tidak diperkenankan untuk menjelaskan adanya bagian dari suatu jumlah. Pengungkapan hal tersebut harus dilakukan dengan mencantumkan jumlah atau persentase.

k. Perubahan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar harus diperlakukan sebagai berikut :

1) Perubahan Estimasi Akuntansi

Suatu estimasi direvisi jika terjadi perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena adanya informasi baru, bertambahnya pengalaman atau perkembangan lebih lanjut. Dampak perubahan ini harus diperlakukan secara prospektif (berlaku ke depan).

2) Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya jika penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, atau jika diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan suatu perusahaan.

3) Kesalahan Mendasar

Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan atau kelalaian.

Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali (*restatement*) untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode penyajian sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode. Pengecualian dilakukan apabila dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain dalam ketentuan masa transisi penerapan standar akuntansi keuangan baru.

l. Bila perusahaan melakukan penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya, maka penyajian kembali tersebut berikut nomor catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkannya harus disebutkan pada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas yang mengalami perubahan.

m. Pada setiap halaman neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas harus diberi pernyataan bahwa “catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan”.

n. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan secara terpisah jumlah dari setiap jenis transaksi dan saldo dengan para direktur, karyawan, komisaris, pemegang saham utama, karyawan kunci dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ikhtisar terpisah tersebut diperlukan untuk piutang, hutang, penjualan, atau pendapatan dan beban. Apabila jumlah transaksi untuk masing-masing kategori tersebut dengan Pihak tertentu melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau material, maka jumlah tersebut harus disajikan secara terpisah dan nama pihak tersebut wajib diungkapkan.

Yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah:

1) Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk *holding companies, subsidiaries* dan *fellow subsidiaries*);

- 2) Perusahaan asosiasi (*associated company*), adalah perusahaan investee yang investornya mempunyai pengaruh signifikan. Perusahaan investee ini bukan anak perusahaan dan bukan *joint venture* dari perusahaan investornya. Perusahaan investee adalah perusahaan tempat investor berinvestasi;
- 3) Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari orang perseorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi orang perseorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor);
- 4) Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang perseorangan tersebut; dan
- 5) Perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh setiap orang yang diuraikan dalam angka 3) atau 4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

8. Kebijakan Akuntansi

- a. Manajemen memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuan dalam PSAK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait.
- b. Apabila PSAK dan peraturan perundang-undangan belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan yang memberikan kepastian bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan dan dapat diandalkan, dengan pengertian:
 - 1) mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan perusahaan;
 - 2) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
 - 3) netral yaitu bebas dari keberpihakan;
 - 4) mencerminkan kehati-hatian; dan
 - 5) mencakup semua hal yang material.

Manajemen menggunakan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi yang bermanfaat dengan memperhatikan:

- 1) Pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;

- 2) definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang ditetapkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan; dan
- 3) pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industri yang lazim sepanjang konsisten dengan angka 1) dan 2).

9. Konsistensi Penyajian

- a. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:
 - 1) Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi perusahaan atau perubahan penyajian akan menghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatu transaksi atau peristiwa; atau
 - 2) Perubahan tersebut dipersyaratkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau diwajibkan oleh suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan terkait.
- b. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah maka penyajian periode sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding. Sifat, jumlah, serta alasan reklasifikasi harus diungkapkan. Apabila reklasifikasi tersebut tidak praktis dilakukan maka alasannya harus diungkapkan.

10. Materialitas dan Agregasi

- a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
- b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*) informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Kecuali ditentukan secara khusus, pengertian material adalah 5% dari jumlah seluruh aset untuk akun-akun aset, 5% dari jumlah seluruh kewajiban untuk akun-akun kewajiban, 5% dari jumlah seluruh ekuitas untuk akun-akun ekuitas, 10% dari pendapatan untuk akun-akun laba rugi, dan 10% dari laba sebelum pajak untuk pengaruh suatu peristiwa atau transaksi seperti perubahan estimasi akuntansi.
- c. Pos-pos yang jumlahnya tidak material disajikan secara agregat sepanjang memiliki sifat dan fungsi yang sejenis dimana pos-pos penyusun tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

11. Saling Hapus (*Offsetting*)

Pos aset dan kewajiban serta pos penghasilan dan beban tidak boleh saling hapus, kecuali diperkenankan oleh PSAK. Contoh yang tidak boleh disalinghapuskan adalah beban bunga dan penghasilan bunga. Contoh yang boleh disalinghapuskan adalah keuntungan dan kerugian kurs.

12. Informasi Komparatif

- a. Informasi kuantitatif harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya, kecuali dinyatakan lain oleh PSAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

- b. Laporan keuangan disajikan secara perbandingan, setidaknya untuk 2 (dua) tahun terakhir sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan Laporan Keuangan Interim disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Perhitungan Laba Rugi Interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan periode interim yang dilaporkan.

13. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Peristiwa dan/atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca tetapi sebelum diterbitkannya laporan keuangan yang mempunyai akibat material terhadap laporan keuangan sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan harus diungkapkan.

14. Laporan Keuangan Konsolidasi

Sesuai PSAK Nomor 4 suatu induk perusahaan yang memiliki baik langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan lebih dari 50% saham berhak suara, pada perusahaan lain, harus menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Suatu perusahaan yang memiliki 50% atau kurang saham berhak suara, pada perusahaan lain, wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi apabila dapat dibuktikan bahwa pengendalian tetap ada. Laporan keuangan konsolidasi harus mengkonsolidasi seluruh anak perusahaan baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Pengendalian tetap dianggap ada walaupun suatu perusahaan memiliki hak suara 50 % atau kurang, apabila dapat dibuktikan adanya salah satu kondisi berikut:

- a. Mempunyai hak suara yang lebih dari 50% berdasarkan perjanjian dengan investor lainnya.
- b. Mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian.
- c. Mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan.
- d. Mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.

Dalam hal pengendalian pada anak perusahaan bersifat sementara atau ada suatu restriksi jangka panjang yang membuat anak perusahaan tidak mampu mengalihkan dananya kepada induk perusahaan, maka laporan keuangan konsolidasi tidak perlu disusun.

B. Komponen Laporan Keuangan

1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan terdiri dari :

- a. Neraca;
- b. Laporan Laba Rugi;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Laporan Arus Kas; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Neraca

a. Pengertian

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yang menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu.

- b. Komponen Utama Neraca
Komponen utama neraca perusahaan IUPHHK dan pengelolaan hutan terdiri dari:
- 1) Aset
 - a) Aset Lancar:
 - (1) Kas dan Setara Kas;
 - (2) Investasi Jangka Pendek;
 - (3) Wesel Tagih;
 - (4) Piutang Usaha;
 - (5) Piutang Lain-Lain;
 - (6) Persediaan;
 - (7) Pajak Dibayar Dimuka;
 - (8) Biaya Dibayar Dimuka; dan
 - (9) Aset Lancar Lain-lain.
 - b) Aset Tidak Lancar:
 - (1) Piutang Hubungan Istimewa;
 - (2) Aset Pajak Tangguhan;
 - (3) Investasi pada Perusahaan Asosiasi;
 - (4) HT Siap Panen;
 - (5) HT Dalam Pengembangan;
 - (6) Properti Investasi;
 - (7) Investasi Jangka Panjang Lain;
 - (8) Aset Tetap;
 - (9) Aset Tidak Berwujud; dan
 - (10) Aset Lain-Lain.
 - 2) Kewajiban
 - a) Kewajiban Lancar:
 - (1) Hutang Provisi Sumber Daya Hutan;
 - (2) Hutang Dana Reboisasi;
 - (3) Pinjaman Jangka Pendek;
 - (4) Wesel Bayar;
 - (5) Hutang Usaha;
 - (6) Hutang Sistem Silvikultur; .
 - (7) Hutang Pajak;
 - (8) Beban Masih Harus Dibayar;
 - (9) Pendapatan Diterima Dimuka;
 - (10) Bagian Kewajiban Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun; dan
 - (11) Kewajiban Lancar Lain-lain.
 - b) Kewajiban Tidak Lancar:
 - (1) Hutang Hubungan Istimewa;
 - (2) Kewajiban Pajak Tangguhan;
 - (3) Pinjaman Jangka Panjang;
 - (4) Hutang Sewa;
 - (5) Keuntungan Tangguhan Aset Dijual dan Sewa-Balik;
 - (6) Kewajiban Imbalan Kerja;
 - (7) Pinjaman Dana Reboisasi;
 - (8) Hutang Obligasi;
 - (9) Kewajiban Tidak Lancar Lainnya;
 - (10) Hutang Subordinasi; dan
 - (11) Obligasi Konversi.

- 3) Ekuitas
 - a) Modal Saham.
 - b) Tambahan Modal Disetor.
 - c) Selisih Kurs atas Penjabaran Laporan Keuangan;
 - d) Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Asosiasi;
 - e) Selisih Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali;
 - f) Keuntungan (Kerugian) Belum Direalisasi dari Efek Tersedia Untuk Dijual;
 - g) Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap;
 - h) Opsi Saham;
 - i) Saldo Laba;
 - j) Modal Saham Diperoleh Kembali.

- c. Penjelasan Komponen Utama Neraca
 - 1) Aset

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari transaksi dan peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

 - a) Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut memenuhi salah satu dari kriteria berikut :

 - (1) Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi;
 - (2) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan;
 - (3) Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.

Pos aset lancar antara lain sebagai berikut:

 - (1) Kas dan Setara Kas

Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Perusahaan.
Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas meliputi:

 - (a) Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya serta tidak dijaminkan.
 - (b) Instrumen pasar uang yang diperoleh dan akan dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak diklasifikasi dalam kas dan setara kas melainkan sebagai aset lain-lain.
 - (2) Investasi Jangka Pendek

Pos ini merupakan bentuk investasi yang dimaksudkan untuk pemanfaatan dana perusahaan dalam jangka pendek. Investasi jangka pendek antara lain adalah deposito dan efek yang jatuh tempo atau pemilikannya dimaksudkan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek dalam efek yang nilai wajarnya tersedia dapat berupa efek ekuitas (*equity securities*) dan efek hutang (*debt securities*) yang dapat digolongkan dalam 3 (tiga) kategori yaitu :

(a) Diperdagangkan (*trading*)

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah efek yang dibeli dan dimiliki untuk menghasilkan keuntungan dari perbedaan harga jangka pendek. Suatu efek harus diklasifikasikan sebagai "diperdagangkan", tanpa memperhatikan alasan perolehannya, jika efek tersebut merupakan bagian dari suatu portofolio efek sejenis dimana terdapat bukti bahwa pola pembelian dan penjualan efek yang sekarang terjadi adalah untuk memperoleh keuntungan jangka pendek.

Efek untuk "Diperdagangkan" disajikan di Neraca sebesar nilai wajar, dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui dalam Laporan Laba Rugi.

(b) Dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity*)

Merupakan aset keuangan dengan kepastian pembayaran dan kepastian tanggal jatuh tempo, dimana perusahaan bermaksud dan mampu memilikinya hingga jatuh tempo.

Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo disajikan di Neraca sebesar biaya perolehan setelah diperhitungkan amortisasi premi atau diskonto. Perusahaan harus secara konsisten menggunakan metode amortisasi yang menghasilkan penyajian wajar dalam laporan keuangan. Metode amortisasi yang dapat digunakan adalah garis lurus dan bunga efektif (*effective interest method*).

(c) Tersedia untuk dijual (*available for sale*):

Efek yang termasuk dalam kelompok ini adalah efek yang tidak memenuhi kriteria "Diperdagangkan" atau "Dimiliki hingga jatuh tempo". Contoh investasi ini adalah penempatan yang bertujuan untuk memanfaatkan dana perusahaan yang menganggur yang sewaktu-waktu dibutuhkan dapat dicairkan kembali.

Efek ini disajikan di Neraca sebesar nilai wajar, dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui sebagai komponen ekuitas, sampai Efek tersebut dijual atau dilepas, dan pada saat tersebut keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui dalam Laporan Laba Rugi.

Investasi pada efek yang seharusnya disajikan sebesar nilai wajar, tetapi efek tersebut tidak aktif diperdagangkan dan nilai wajar tidak dapat ditentukan secara andal, harus disajikan sebesar biaya perolehan.

(3) Wesel Tagih

Pos ini merupakan piutang usaha pihak ketiga yang didukung janji tertulis untuk membayar dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan atau satu siklus usaha normal, mana yang lebih lama.

Wesel Tagih disajikan sebesar jumlah yang dapat direalisasi, yaitu jumlah piutang dikurangi penyisihan wesel tagih yang diperkirakan tidak dapat ditagih.

(4) Piutang Usaha

Pos ini merupakan piutang yang berasal dari kegiatan normal perusahaan. Piutang usaha disajikan terpisah antara pihak ketiga dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Piutang ini disajikan sebesar jumlah yang dapat direalisasikan, yaitu jumlah piutang dikurangi penyisihan piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih.

(5) Piutang Lain-lain

Pos ini merupakan tagihan perusahaan pada pihak ketiga yang menurut sifat dan jenisnya tidak dapat dikelompokkan dalam pos-pos pada angka (3) dan (4) di atas.

Piutang Lain-lain disajikan sebesar jumlah yang dapat direalisasi, yaitu jumlah piutang dikurangi penyisihan piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih.

(6) Persediaan

Persediaan adalah aset:

- (a) tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;
- (b) dalam proses produksi; atau
- (c) dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa; atau
- (d) dalam perjalanan.

Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (*the lower of cost or net realizable value*). Nilai realisasi bersih adalah nilai jual dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan penjualan. Jika terdapat penurunan nilai pada persediaan akan diakui sebagai kerugian penurunan nilai dalam penghitungan harga pokok produksi.

Persediaan dalam perusahaan pemegang IUPHHK meliputi :

- (a) Barang jadi yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal perusahaan. Terdiri dari :
 - i. Kayu bulat, yaitu hasil tebangan dari hutan alam, Hutan Tanaman dan pengelolaan hutan.
 - ii. Kayu olahan, yaitu kayu yang telah melalui proses produksi.
 - iii. Hasil hutan bukan kayu, contoh: getah karet.

Barang jadi yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah.

- (b) Barang dalam proses, merupakan kayu yang masih dalam proses produksi.

(c) Barang atau material yang digunakan secara langsung dan tidak langsung dalam proses produksi, terdiri dari:

- i. Bibit tanaman
- ii. Persediaan bahan pembantu. Bahan pembantu merupakan bahan baku atau barang yang diperlukan dalam proses transformasi untuk menghasilkan barang jadi tetapi hubungannya dalam proses tidak langsung, misalnya solar, pestisida, pupuk dan sebagainya.
- iii. Perlengkapan, merupakan barang yang diperlukan dalam proses produksi perusahaan. Contoh : suku cadang.

(7) Pajak Dibayar Dimuka

Pos ini merupakan:

- (a) Kelebihan pembayaran pajak,
- (b) Aset Pajak Kini yaitu kelebihan jumlah Pajak Penghasilan yang telah dibayar pada periode berjalan dan periode sebelumnya dari jumlah pajak yang terhutang untuk periode-periode tersebut. Aset Pajak Kini harus dikompensasi (*offset*) dengan Kewajiban Pajak Kini dan jumlah netonya harus disajikan pada Neraca.

Pajak dibayar dimuka disajikan sebesar selisih jumlah pajak yang telah disetor dengan tagihan pajak.

(8) Biaya Dibayar Dimuka.

Pos ini merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang, pada saat manfaat diterima, seperti : premi asuransi dibayar dimuka, dan sewa dibayar dimuka. Biaya dibayar dimuka disajikan sebesar nilai yang belum terealisasi, yaitu biaya dibayar dimuka dikurangi dengan akumulasi jumlah yang telah dibebankan.

(9) Aset Lancar Lain-lain

Pos ini mencakup aset lancar yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam angka (1) sampai dengan angka (8) di atas, termasuk pembayaran dimuka untuk memperoleh barang atau jasa yang akan digunakan dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau satu siklus normal perusahaan (misalnya: uang muka pembelian barang). Aset lancar lain-lain disajikan sebesar nilai tercatat.

b) Aset Tidak Lancar

Aset yang tidak termasuk dalam Aset Lancar diklasifikasikan sebagai Aset Tidak Lancar.

(1) Piutang Hubungan Istimewa

Pos ini merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, selain untuk pos yang telah ditentukan penyajiannya pada Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek dan Piutang Usaha. Piutang Hubungan Istimewa disajikan sebesar jumlah yang dapat direalisasi, yaitu jumlah piutang dikurangi penyisihan piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih.

Pada umumnya piutang hubungan istimewa tidak membutuhkan penyisihan. Jika untuk transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dibentuk penyisihan, maka alasan dan dasar pembentukan penyisihan serta penjelasan transaksi terjadinya piutang harus diungkapkan.

(2) Aset Pajak Tangguhan

Pos ini merupakan jumlah Pajak Penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya:

- (a) Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan; dan
- (b) Sisa kompensasi kerugian

Konsekuensi pajak dari saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai Aset Pajak Tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi. Aset pajak tangguhan disajikan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan kembali.

Aset Pajak Tangguhan harus dikompensasi (*offset*) dengan Kewajiban Pajak Tangguhan dan jumlah netonya disajikan pada Neraca.

(3) Investasi pada Perusahaan Asosiasi

Pos ini merupakan investasi pada perusahaan asosiasi yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi pada perusahaan asosiasi (perusahaan memiliki 20% sampai dengan 50% bagian ekuitas perusahaan *investee*), harus disajikan menggunakan metode ekuitas sebesar biaya perolehan (*cost*) dan selanjutnya disesuaikan untuk bagian pemilikan perusahaan atas perubahan nilai buku perusahaan asosiasi.

(4) HT Siap Panen

Pos ini merupakan HT Dalam Pengembangan yang telah menghasilkan. HT dikategorikan menghasilkan jika pada blok (areal) tersebut telah tersedia tanaman siap panen atau telah mulai dipanen. HT Siap Panen dicatat sebesar biaya perolehannya yaitu semua biaya-biaya yang dikeluarkan sampai tanaman tersebut dapat menghasilkan. HT Siap Panen disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi.

HT Siap Panen akan didepresiasi jika proses pemanenan telah mulai dilaksanakan. Depresiasi HT Siap Panen menggunakan metode berikut ini:

- (a) Depresiasi untuk HT yang memiliki hasil hutan kayu dihitung menggunakan metode unit produksi, yang dihitung berdasarkan proporsi luas areal atau proporsi volume kayu yang ditebang.

Contoh 1: Pada tahun berjalan terdapat blok HT Siap Panen seluas 100 Ha yang siap ditebang menjadi kayu bulat. Pada tahun tersebut sudah ditebang seluas 20 Ha, maka nilai HT Siap Panen yang harus didepresiasi adalah $20/100 \times$ Nilai Akumulasi HT Siap Panen atas blok tersebut. Nilai tersebut dimasukkan ke dalam komponen harga pokok produksi.

(b) Depresiasi HT yang memiliki hasil hutan bukan kayu menggunakan metode garis lurus. Contoh ilustrasinya adalah sebagai berikut:

Contoh 2: Pada tahun berjalan terdapat blok HT Siap Panen yang siap dipanen getahnya. HT tersebut diperkirakan masih ekonomis untuk dipanen getahnya selama 15 tahun. Namun pada akhir tahun ke-15 tegakan dari HT yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu ini masih dapat dijual pada harga yang cukup material. Oleh karena itu, tidak seluruh nilai HT didepresiasi karena harus ditetapkan nilai sisa oleh pemegang izin.

Maka nilai HT Siap Panen yang harus didepresiasi tiap tahun adalah:

$1/15 \times$ (Nilai Akumulasi HT Siap Panen atas blok tersebut dikurangi Perkiraan Nilai Sisa).

Nilai depresiasi tersebut dimasukkan ke dalam komponen harga pokok produksi, sedangkan getahnya masuk ke dalam persediaan. Jika terdapat biaya-biaya yang terkait dengan pemeliharaan HT tersebut hingga tahun ke-15 akan langsung dibebankan pada periode masing-masing.

Pada saat tegakan karet ditebang akan dimasukkan ke dalam persediaan sebesar nilai sisa ditambah biaya penebangannya.

(5) HT Dalam Pengembangan

Pos ini merupakan HT yang belum menghasilkan. HT Dalam Pengembangan dicatat sebesar biaya-biaya yang terjadi sejak saat penanaman sampai saat tanaman tersebut siap untuk dipanen. Biaya tersebut antara lain terdiri dari biaya perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pembinaan hutan, biaya administrasi dan umum yang berkaitan langsung, amortisasi beban tanggungan, beban penyusutan sarana dan prasarana, dan kapitalisasi biaya pinjaman yang dipakai dalam pendanaan. Jika terdapat pendapatan (beban) yang berasal dari pembersihan lahan sebelum ditanam, maka akan mengurangi (menambah) saldo HT Dalam Pengembangan. Pada saat HT Dalam Pengembangan siap untuk menghasilkan maka direklasifikasi menjadi HT Siap Panen. Reklasifikasi dilakukan hanya untuk blok RKT HT yang telah menghasilkan tanpa memperhatikan daurnya.

Misalnya: Suatu areal kerja yang terdiri dari 5 (lima) blok RKT, mulai ditanami dari blok I, dilanjutkan dengan blok II pada tahun berikutnya, dan seterusnya hingga blok V pada tahun ke-5.

Tahun Blok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	■	■	■	■	■										
II		■	■	■	■	■									
II			■	■	■	■	■								
IV				■	■	■	■	■							
V					■	■	■	■	■						

■ Daur 1
□ Daur 2

Tegakan yang ditanam pada blok I akan terus dipelihara hingga tahun ke-5 (satu daur), maka semua biaya-biaya yang dikeluarkan dari tahun 1 hingga 5 untuk blok I dikapitalisasi sebagai HT Dalam Pengembangan. Ketika tegakan siap ditebang pada akhir tahun ke-5, maka akumulasi saldo HT Dalam Pengembangan untuk blok I direklasifikasi menjadi HT Siap Panen. Jika areal blok I yang telah ditebang ditanami kembali pada tahun ke-6 maka semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk blok I tersebut akan kembali dikapitalisasi sebagai HT Dalam Pengembangan hingga akhir daur ke-2.

Demikian juga dengan blok II, seluruh biaya yang dikeluarkan sejak tahun ke-2 sampai tahun ke-6 (masak tebang) dikapitalisasi sebagai HT Dalam Pengembangan. Sehingga pada tahun ke-2 terdapat 2 (dua) saldo HT Dalam Pengembangan (yaitu HT Dalam Pengembangan blok I dan blok II).

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk blok II hingga V pada tahun ke-6 tetap dikapitalisasi walaupun blok I telah memasuki daur ke-2. Jika blok I tidak langsung ditanami kembali pada tahun ke-6, maka hanya terdapat 4 (empat) saldo HT dalam Pengembangan pada tahun itu (yaitu HT Dalam Pengembangan blok II, III, IV dan V).

Namun jika blok I langsung ditanami kembali pada tahun ke-6, maka akan terdapat 5 (lima) saldo HT Dalam Pengembangan (yaitu HT Dalam Pengembangan blok I, II, III, IV dan V).

Untuk mendukung nilai HT Dalam Pengembangan, diperlukan informasi tambahan tentang kondisi tegakan (luas, tahun tanam, volume, jenis tanaman) dan pertumbuhannya.

(6) Properti Investasi

Pos ini adalah investasi dalam bentuk tanah dan bangunan atau bagian dari bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa untuk menghasilkan rental atau kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk:

- (a) Digunakan untuk produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau
- (b) Dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Termasuk dalam pos ini adalah properti yang diakui oleh *lessee* dalam sewa pembiayaan dan properti yang diserahkan oleh *lessor* dalam sewa operasi.

Properti Investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan selanjutnya dapat diukur dengan model biaya atau model nilai wajar (revaluasi). Dengan menggunakan model biaya, Properti Investasi dicatat dan disajikan sebesar biaya perolehan, sedangkan dengan model revaluasi diukur berdasarkan nilai wajar.

(7) Investasi Jangka Panjang Lain

Pos ini merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi ini dapat berbentuk investasi dalam efek hutang dan efek ekuitas, dan investasi lainnya.

- (a) Investasi dalam efek ekuitas (perusahaan memiliki kurang dari 20% saham perusahaan *investee*), harus diklasifikasikan sebagai "Tersedia untuk dijual". Dalam hal ini, prosedur untuk pengklasifikasian, pengukuran dan pengakuan sama dengan yang digunakan untuk investasi jangka pendek.
- (b) Investasi dalam efek hutang, harus diklasifikasikan sebagai "Dimiliki hingga jatuh tempo" atau "Tersedia untuk dijual". Dalam hal ini, prosedur untuk pengklasifikasian, pengukuran dan pengakuan sama dengan yang digunakan untuk investasi jangka pendek.

Investasi pada efek yang seharusnya disajikan sebesar nilai wajar, tetapi efek tersebut tidak aktif diperdagangkan dan nilai wajarnya tidak dapat ditentukan secara andal, harus disajikan sebesar biaya perolehan.

Investasi lainnya harus disajikan sebesar nilai wajar.

Apabila suatu investasi jangka panjang disajikan sebesar biaya, namun jumlah yang dapat dipulihkan ternyata kurang dari nilai tercatat (penurunan nilai permanen), maka nilai tercatat investasi tersebut harus dikurangi sampai jumlah yang dapat dipulihkan tersebut. Pengurangan ini adalah kerugian penurunan nilai, yang termasuk dalam Laporan Laba Rugi.

Investasi "Tersedia untuk dijual" yang disajikan sebesar nilai wajarnya dapat mengalami penurunan nilai secara permanen apabila terdapat bukti yang obyektif. Keadaan ini terjadi akibat penurunan kondisi keuangan dan kondisi lainnya dari perusahaan penerbit Efek tersebut. Penurunan permanen ini menyebabkan nilai tercatat Efek melebihi estimasi jumlah yang dapat dipulihkan. Dalam hal ini kerugian penurunan nilai ini diperlakukan sebagai berikut:

- (a) Kerugian bersih kumulatif untuk Efek tertentu yang telah diakui secara langsung dalam komponen ekuitas harus dipindahkan dari komponen ekuitas dan dimasukkan dalam Laporan Laba Rugi periode berjalan meskipun Efek tersebut belum dijual atau dilepas.
 - (b) Jumlah kerugian yang harus dipindahkan dari ekuitas ke Laporan Laba Rugi, adalah perbedaan antara biaya perolehan Efek dan nilai wajar Efek (nilai tercatatnya), dikurangi dengan kerugian penurunan nilai dari Efek yang sebelumnya sudah diakui dalam Laporan Laba Rugi.
 - (c) Jika dalam periode berikutnya, nilai wajar Efek mengalami kenaikan dan kenaikan tersebut secara obyektif dapat dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi setelah kerugian penurunan nilai sebelumnya diakui dalam Laporan Laba Rugi, maka kerugian penurunan nilai harus dipulihkan melalui Laporan Laba Rugi periode berjalan.
- (8) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai, baik melalui pembelian maupun dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap dapat berupa:

(a) Pemilikan Langsung

Pos ini merupakan aset tetap yang siap pakai, transaksinya telah selesai, dan menjadi hak perusahaan secara hukum. Aset ini dicatat sebesar biaya perolehan.

(b) Aset hak kelola

Pos ini merupakan aset tetap yang memiliki masa manfaat selama masa konsesi atau selama belum dialihkan kepada negara.

(c) Aset Sewa

Pos ini merupakan aset tetap yang diperoleh melalui transaksi sewa yang memenuhi kriteria sewa pembiayaan (*finance lease*). Aset sewa dicatat sebesar nilai kini (*present value*) dari seluruh pembayaran sewa minimum atau nilai wajar asset sewaan, mana yang lebih rendah dan disajikan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

(d) Aset dalam Penyelesaian

Pos ini merupakan aset yang masih dalam proses pembangunan dan belum siap untuk digunakan, serta dimaksudkan untuk dipergunakan oleh perusahaan dalam kegiatan usahanya. Aset ini dicatat sebesar biaya yang telah dikeluarkan.

Dalam hal proses pembangunan aset tersebut terhenti dan tidak mungkin dilanjutkan, maka harus dikeluarkan dari komponen aset tetap.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dan selanjutnya dapat diukur dan disajikan dengan model biaya atau model revaluasi. Dengan model biaya, aset tetap disajikan sebesar biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Sedangkan dengan model revaluasi, aset tetap disajikan sebesar nilai revaluasian, yaitu nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Selisih revaluasi disajikan sebagai bagian dari ekuitas.

Rugi penurunan nilai adalah jumlah yang diturunkan dari nilai tercatat hingga menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto dengan nilai pakai suatu aset. Nilai pakai adalah nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan dapat diterima atas penggunaan aset dan penghentian penggunaan aset pada akhir masa manfaatnya. Harga jual neto adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan aset setelah dikurangi biaya terkait. Rugi penurunan nilai disajikan pada laporan Laba/Rugi.

Tanah pada umumnya tidak disusutkan, kecuali:

(a) Kondisi kualitas tanah tidak lagi digunakan dalam operasi utama perusahaan.

(b) Prediksi manajemen atau kepastian bahwa perpanjangan atau pembaharuan hak kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.

Biaya perolehan aset tetap harus memperhitungkan biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau konstruksi aset tetap yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi. Aset yang diperoleh dengan pinjaman akan memenuhi syarat untuk dikapitalisasi biaya pinjamannya apabila aset tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya (misal: biaya pinjaman atas pembangunan gedung yang memakan waktu 2 tahun).

(9) Aset Tidak Berwujud

Pos ini merupakan aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif.

Pos ini antara lain terdiri dari IUPHHK hutan alam dan hutan tanaman hak paten, merek dagang, *goodwill*, dan biaya pengembangan (*development*).

Biaya-biaya yang terkait dengan riset (*research*) langsung dibebankan pada periode berjalan, sedangkan biaya yang terkait dengan pengembangan (*development*) dikapitalisasi dengan memperhatikan kriteria pengakuan aset.

Pengakuan aset tidak berwujud dilakukan apabila memenuhi kriteria berikut :

- (a) Kemungkinan besar manfaat ekonomi masa mendatang dari aset tersebut akan diperoleh perusahaan.
- (b) Nilai perolehannya dapat diukur secara andal.

Masa manfaat suatu aset tidak berwujud tidak akan melebihi 20 tahun, kecuali terdapat bukti yang meyakinkan. Aset tidak berwujud diamortisasi berdasarkan masa manfaat.

Aset Tidak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai aset tidak berwujud.

(10) Aset Lain-lain

Pos-pos yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok aset tetap, aset lancar, investasi/penyertaan maupun aset tidak berwujud disajikan dalam kelompok Aset Lain-lain. Pos ini antara lain mencakup:

- (a) Aset tetap yang tidak digunakan lagi;
- (b) Aset dari segmen usaha yang telah diputuskan oleh manajemen untuk dihentikan atau akan dijual;
- (c) Beban tangguhan, misalnya : biaya dalam kegiatan perencanaan, pemenuhan kewajiban kepada negara yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun pada hutan alam dan hutan tanaman, dan aset tidak bergerak yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional dan akan diserahkan kepada negara.

Contoh : jalan, jembatan, dan *camp* yang bersifat permanen.

Selama aset tidak bergerak tersebut masih digunakan dalam kegiatan operasional, akan dicatat sebagai aset tetap. Jika aset tersebut tidak bergerak dan bersifat non permanen, maka semua pengeluaran yang terkait langsung dibebankan pada periode berjalan.

Beban tanggungan harus diamortisasi sesuai dengan masa manfaat masing-masing jenis beban. Saldo beban tanggungan sesudah amortisasi yang berkaitan dengan suatu kewajiban, harus dihapuskan secara proporsional, bila sebagian dari kewajiban tersebut dilunasi atau diselesaikan;

- (d) Cadangan dana, misalnya dana yang disisihkan untuk pelunasan obligasi;
- (e) Persediaan rusak yang tidak bisa dijual lagi dan sedang menunggu penghapusan; atau
- (f) Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset lain-lain disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan setelah dikurangi dengan amortisasi dan penurunan nilai.

2) Kewajiban

Kewajiban merupakan tanggung jawab perusahaan pada saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diperkirakan akan membutuhkan sumber daya perusahaan. Kewajiban disajikan sebesar jumlah yang harus dibayar, kecuali ditentukan lain.

a) Kewajiban Lancar

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar jika diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca atau satu siklus normal operasi perusahaan.

Kewajiban lancar dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

(1) Hutang Provisi Sumber Daya Hutan

Pos ini merupakan kewajiban kepada negara yang timbul karena pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Kewajiban dikenakan atas hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan alam dan hutan tanaman berdasarkan Laporan Hasil Produksi (LHP).

(2) Hutang Dana Reboisasi

Pos ini merupakan kewajiban kepada negara yang timbul karena dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu. Kewajiban dikenakan atas hasil hutan kayu pada hutan alam berdasarkan Laporan Hasil Produksi (LHP).

(3) Pinjaman Jangka Pendek

Pos ini merupakan kewajiban perusahaan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Bunga yang telah jatuh tempo disajikan sebagai Hutang Bunga.

- (4) Wesel Bayar
Pos ini merupakan hutang usaha pada pihak ketiga yang didukung janji tertulis untuk membayar dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca atau satu siklus operasi normal perusahaan, mana yang lebih lama.
- (5) Hutang Usaha
Pos ini merupakan kewajiban yang timbul dalam rangka kegiatan normal operasi Perusahaan, baik kewajiban kepada pihak ketiga maupun pihak yang memiliki hubungan istimewa.
- (6) Hutang Sistem Silvikultur
Pos ini merupakan taksiran sisa kewajiban pembinaan hutan Sistem Silvikultur yang diterapkan, termasuk dalam pos ini adalah Hutang Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI).
- (7) Hutang Pajak
Pos ini merupakan:
 - (a) Kewajiban pajak perusahaan dan pajak lainnya yang belum dibayar.
 - (b) Kewajiban pajak kini, yaitu jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada periode berjalan. Kewajiban Pajak Kini harus dikompensasi (*offset*) dengan Aset Pajak Kini dan jumlah netonya harus disajikan pada Neraca.
- (8) Beban Masih Harus Dibayar
Pos ini merupakan beban yang telah menjadi kewajiban perusahaan namun belum jatuh tempo.
- (9) Pendapatan Diterima Dimuka
Pos ini merupakan penerimaan pembayaran dari pelanggan yang belum dapat diakui sebagai pendapatan karena penyerahan jasa belum diselesaikan.
- (10) Bagian Kewajiban Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun
Pos ini merupakan bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.
Pos ini disajikan dalam neraca dengan cara merinci jenis kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun, misalnya:
 - (a) Pinjaman Jangka Panjang
 - (b) Hutang Sewa
 - (c) Hutang Obligasi
- (11) Kewajiban Lancar Lain-Lain
Pos ini merupakan kewajiban lancar yang tidak dapat diklasifikasikan dalam 10 (sepuluh) kelompok akun tersebut di atas.

b) Kewajiban Tidak Lancar

Semua kewajiban lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar merupakan kewajiban tidak lancar. Kewajiban tidak lancar antara lain :

(1) Hutang Hubungan Istimewa

Pos ini merupakan hutang yang timbul dari transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, selain untuk pos hutang usaha dan pinjaman jangka pendek yang telah ditentukan penyajiannya.

(2) Kewajiban Pajak Tangguhan

Pos ini merupakan jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Kewajiban Pajak Tangguhan harus dikompensasi (*offset*) dengan Aset Pajak Tangguhan dan jumlah bersihnya disajikan pada Neraca.

(3) Pinjaman Jangka Panjang

Pos ini merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya yang jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

(4) Hutang Sewa

Pos ini merupakan kewajiban perusahaan kepada perusahaan sewa (*leasing company*) sehubungan dengan perolehan aset perusahaan.

Pos ini merupakan kewajiban dalam sewa pembiayaan (*finance lease*)

Kewajiban Sewa disajikan sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa minimum dikurangi angsuran pokok.

(5) Keuntungan Tangguhan Aset Dijual dan Sewa-Balik

Pos ini adalah selisih antara harga jual dan nilai buku aset yang dijual dan sewa-balik (*sales and lease-back*) dengan sewa pembiayaan (*finance lease*). Dalam transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah, yaitu:

- (1) transaksi penjualan; dan
- (2) transaksi sewa.

Keuntungan yang ditangguhkan harus diakui sebagai pendapatan secara proporsional dengan masa sewa. Dalam hal terjadi rugi dari penjualan aset yang disewa-balik, kerugian tersebut harus diakui segera.

Jika transaksi sewa-balik merupakan sewa operasi (*operating lease*) maka selisih antara harga jual dan nilai buku aset yang dijual dan sewa-balik diakui segera sebagai keuntungan dan kerugian.

Keuntungan Tangguhan disajikan sebesar nilai yang belum diamortisasi.

(6) Kewajiban Imbalan Kerja

Pos ini merupakan kewajiban yang timbul dari program imbalan pasti yang merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui, biaya jasa lalu yang belum diakui, dan nilai wajar aset program. Pos ini juga merupakan jumlah iuran terutang untuk program iuran pasti.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah nilai kini pembayaran masa depan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban atas jasa pekerja periode berjalan dan periode-periode lalu. Keuntungan dan kerugian aktuarial adalah penyesuaian akibat perbedaan antara asumsi aktuarial dan kenyataan serta dampak dari perubahan asumsi aktuarial. Biaya jasa lalu adalah kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja periode-periode lalu, yang berdampak pada periode berjalan akibat penerapan awal atau perubahan terhadap imbalan pascakerja atau imbalan kerja jangka panjang lainnya.

- (7) Pinjaman Dana Reboisasi
Pos ini merupakan kewajiban yang timbul dari pinjaman yang dilakukan dalam rangka pembangunan Hutan Tanaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Hutang Obligasi
Pos ini merupakan kewajiban perusahaan kepada pemegang obligasi sehubungan dengan penerbitan obligasi perusahaan. Hutang Obligasi disajikan sebesar nilai nominal setelah memperhitungkan amortisasi premium atau diskonto.
- (9) Kewajiban Tidak Lancar Lainnya.
Pos ini mencakup kewajiban tidak lancar yang tidak dapat dikelompokkan dalam butir (1) sampai dengan (11) di atas. Kewajiban Tidak Lancar Lainnya di dalam neraca disesuaikan dengan urutan jatuh temponya.
- (10) Hutang Subordinasi
Pos ini merupakan pinjaman yang diperoleh berdasarkan suatu perjanjian subordinasi, dengan ketentuan pinjaman tersebut baru dapat dibayar kembali apabila perusahaan telah melunasi seluruh kewajibannya atau kewajiban tertentu.
- (11) Obligasi Konversi
Pos ini merupakan hutang obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham perusahaan di masa yang akan datang. Obligasi Konversi disajikan sebesar nilai nominal setelah memperhitungkan amortisasi premium atau diskonto.

Biaya emisi efek hutang merupakan biaya transaksi yang harus dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi neto efek hutang tersebut. Selisih antara hasil emisi neto dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium yang harus diamortisasi selama jangka waktu efek hutang tersebut.

Saldo biaya emisi efek hutang tangguhan sebelum berlakunya peraturan ini harus diperlakukan sesuai dengan peraturan ini.

Perusahaan harus tetap menyajikan kewajiban berbunga sebagai Kewajiban Tidak Lancar walaupun akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal neraca, apabila semua syarat berikut dipenuhi:

- (1) Kesepakatan awal perjanjian pinjaman adalah untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan;
- (2) Perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang; dan

- (3) Butir kedua di atas (maksud tersebut pada huruf b), harus didukung dengan perjanjian pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan diterbitkan (disetujui).

3) Ekuitas

Ekuitas adalah bagian hak pemilik dalam perusahaan, yang merupakan nilai sisa dari aset suatu perusahaan setelah dikurangi dengan kewajibannya.

Untuk perusahaan yang berbentuk PERUM maka ekuitas terdiri modal statutair, penyertaan modal pemerintah (PMP), penambahan modal dari instansi lain/sumbangan, dan cadangan-cadangan menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Komponen ekuitas untuk Perseroan Terbatas dan Persero –terdiri atas:

a) Modal Saham

Pada pos ini disajikan nilai nominal untuk setiap jenis saham. Disamping itu, pada pos ini disajikan:

(1) Modal Dasar

Jumlah saham, untuk setiap jenis saham sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.

(2) Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Merupakan jumlah dari bagian dari modal dasar yang telah ditempatkan dan disetor penuh untuk tiap jenis saham.

b) Tambahan Modal Disetor – Bersih

Tambahan Modal Disetor disajikan pada neraca dengan menjumlahkan pos-pos berikut ini :

(1) Agio Saham

Pos ini merupakan kelebihan setoran pemegang saham di atas nilai nominal.

(2) Biaya Emisi Efek Ekuitas

Pos ini merupakan biaya yang berkaitan dengan penerbitan efek ekuitas perusahaan. Biaya ini mencakup *fee* dan komisi yang dibayarkan kepada penjamin emisi, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, serta biaya pencetakan dokumen pernyataan pendaftaran, biaya pencatatan efek ekuitas di bursa efek, dan biaya promosi. Biaya-biaya yang berkaitan dengan pencatatan saham di bursa efek atas saham yang sudah beredar dan biaya yang berkaitan dengan dividen saham dan pemecahan saham tidak termasuk dalam pos biaya emisi efek ekuitas.

Saldo biaya emisi efek ekuitas sebelum berlakunya peraturan ini harus diperlakukan sesuai dengan peraturan ini.

Jumlah yang dapat dikapitalisasi oleh perusahaan dalam rangka pembagian saham bonus adalah jumlah agio saham setelah dikurangi Biaya Emisi Efek Ekuitas.

(3) Selisih Modal dari Perolehan Kembali Saham

Pos ini merupakan selisih antara jumlah yang dibayarkan pada saat perolehan kembali saham dengan :

- (a) Jumlah yang diterima pada saat pengeluaran saham, jika menggunakan metode biaya (*cost method*).

- (b) Nilai nominal, jika menggunakan metode nilai pari (*par value method*).
- (4) Selisih Kurs atas Modal yang Disetor
Pos ini merupakan selisih kurs mata uang asing yang timbul sehubungan dengan transaksi modal.
- (5) Modal Sumbangan
Pos ini merupakan modal yang berasal dari sumbangan yang diperoleh perusahaan dari pemerintah, pemegang saham dan atau pihak lain.
- (6) Modal Disetor Lainnya
Pos ini antara lain terdiri dari:
- (a) Kelebihan setoran modal di atas Modal Dasar atau Modal Ditempatkan;
Dalam hal Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, uang muka pemesanan saham disajikan sebagai Modal Disetor Lainnya. Namun apabila uang muka tersebut melebihi jumlah yang akan menjadi modal saham (*oversubscribed*), maka kelebihan tersebut harus disajikan sebagai kewajiban lancar.
- (b) Waran yang merupakan nilai efek yang diterbitkan perusahaan yang memberi hak kepada pemegangnya untuk memesan saham perusahaan pada harga dan periode waktu tertentu.
- c) Selisih Kurs atas Penjabaran Laporan Keuangan
Pos ini merupakan selisih kurs yang timbul dari:
- (1) Penjabaran pendapatan dan beban dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi dan aset serta kewajiban dengan menggunakan kurs penutup;
- (2) Penjabaran saldo awal investasi neto dalam entitas asing dengan kurs yang berbeda dari yang dilaporkan sebelumnya;
- (3) Perubahan lain atas ekuitas dalam entitas asing.
- d) Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Asosiasi
Pos ini merupakan perbedaan antara nilai investasi perusahaan pada perusahaan asosiasi sebagai akibat adanya perubahan ekuitas perusahaan asosiasi yang bukan berasal dari transaksi antara perusahaan dengan perusahaan asosiasi tersebut.
- e) Selisih Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali
Pos ini adalah selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku pada suatu transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali. Sedangkan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali merupakan transaksi pengalihan aset, kewajiban, saham atau bentuk instrumen kepemilikan lainnya antara pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama.
- f) Keuntungan atau Kerugian yang belum Direalisasi dari Efek yang Tersedia untuk Dijual
Pos ini merupakan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari efek ekuitas dan efek hutang yang tersedia untuk dijual.

- g) Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap
Pos ini merupakan surplus nilai sebagai hasil penilaian kembali (revaluasi) aset tetap.
Pos ini disajikan apabila perusahaan memilih model revaluasi dalam penilaian aset tetap.
- h) Opsi Saham
Pos ini merupakan nilai efek yang menjadi basis kompensasi pemberian saham kepada karyawan perusahaan.
- i) Saldo Laba
Pos ini merupakan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu.

Dalam hal dilakukan kuasi reorganisasi, jumlah saldo laba negatif (defisit) yang dieliminasi harus disajikan selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun kuasi reorganisasi dilakukan.

Tanggal terjadi kuasi reorganisasi harus diungkapkan pada pos saldo laba untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ke depan.
- j) Modal Saham yang Diperoleh Kembali
Pos ini merupakan nilai saham perusahaan yang diperoleh kembali dan disajikan sebagai berikut :
- (1) Pengurang ekuitas jika menggunakan metode biaya (*cost method*).
 - (2) Pengurang modal saham jika menggunakan metode nilai pari (*par value method*).
- Dengan menggunakan metode biaya, modal saham diperoleh kembali dicatat sebesar biaya perolehannya. Sedangkan pada metode nilai pari, modal saham diperoleh kembali dicatat sebesar nilai parinya. Nilai pari adalah nilai nominal yang tercantum pada sertifikat saham.

3. Laporan Laba Rugi

- a. Pengertian
Laporan laba rugi merupakan ringkasan aktivitas usaha perusahaan untuk periode tertentu yang melaporkan hasil usaha atau kerugian bersih yang timbul dari kegiatan usaha dan aktivitas lainnya.
- b. Komponen Utama Laporan Laba Rugi
Komponen utama laporan Laba Rugi terdiri dari:
- 1) Pendapatan Usaha;
 - 2) Beban Pokok Penjualan;
 - 3) Laba (Rugi) Kotor;
 - 4) Beban Usaha;
 - 5) Laba (Rugi) Usaha;
 - 6) Penghasilan (Beban) Lain-lain;
 - 7) Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan;
 - 8) Beban (Penghasilan) Pajak;
 - 9) Laba (Rugi) dari Aktivitas Normal;
 - 10) Pos Luar Biasa;
 - 11) Laba (Rugi) Bersih;
 - 12) Laba (Rugi) Per Saham Dasar; dan
 - 13) Laba (Rugi) Per Saham Dilusian.

c. Penjelasan Komponen Utama Laporan Laba Rugi

1) Pendapatan Usaha

Pos ini merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan, berupa pemanfaatan hasil hutan yang terdiri dari:

- a) Pendapatan dari pemanfaatan dan/atau pemanenan hasil hutan kayu.
- b) Pendapatan dari pemanfaatan dan/atau pemanenan hasil hutan bukan kayu.
- c) Pendapatan industri kayu olahan.
- d) Pendapatan Keproyekan dan Jasa Kehutanan lainnya.

Pendapatan dari hasil hutan bukan kayu merupakan pendapatan utama kecuali pendapatan tersebut diperoleh secara tidak rutin (*insidental*) sehingga dimasukkan ke dalam pendapatan lain-lain.

2) Beban Pokok Penjualan

Pos ini merupakan nilai tercatat dari persediaan yang dijual.

3) Laba (Rugi) Kotor

Pos ini merupakan selisih antara Pendapatan Usaha dengan Beban Pokok Penjualan.

4) Beban Usaha

Pos ini merupakan beban kegiatan utama perusahaan yang dilaporkan dalam dua kategori yaitu:

- a) Beban penjualan; dan
- b) Beban umum dan administrasi

5) Laba (Rugi) Usaha

Pos ini merupakan selisih antara Laba (Rugi) Kotor dengan Beban Usaha.

6) Penghasilan (Beban) Lain-lain

Pos ini merupakan penghasilan (beban) yang tidak dapat dihubungkan langsung dengan kegiatan usaha utama perusahaan. Penghasilan (Beban) Lain-lain disajikan dengan cara merinci penghasilan (beban) lain-lain, setidaknya tidaknya meliputi:

- a) Bagian Laba (Rugi) Perusahaan Asosiasi
- b) Penghasilan bunga
- c) Beban Bunga
- d) Laba (rugi) kurs
- e) Lain-lain

7) Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan

Pos ini merupakan Laba (Rugi) Usaha setelah memperhitungkan Penghasilan (Beban) Lain-Lain.

8) Beban (Penghasilan) Pajak

Pos ini merupakan jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada periode berjalan. Pos ini hendaknya dirinci unsur-unsur beban (penghasilan) pajak kini dan pajak tangguhan.

9) Laba (Rugi) dari Aktivitas Normal Perusahaan

Pos ini merupakan Laba atau Rugi setelah dikurangi dengan Beban (Penghasilan) Pajak, sebelum pos-pos luar biasa.

10) Pos Luar Biasa

Pos ini merupakan pos-pos yang berasal dari kejadian atau transaksi yang tidak biasa (*unusual*) dan tidak sering terjadi (*infrequent*).

Contoh: Gempa bumi, banjir, dan bencana alam lainnya.

Pos luar biasa disajikan bersih setelah memperhitungkan pajak.

- 11) Laba (Rugi) Bersih
Pos ini merupakan Laba (rugi) dari aktivitas perusahaan setelah memperhitungkan Beban (Penghasilan) Pajak dan Pos Luar Biasa.
- 12) Laba (Rugi) Per Saham Dasar
Pos ini merupakan Jumlah Laba (Rugi) bersih yang tersedia bagi setiap saham biasa yang beredar selama periode pelaporan.
- 13) Laba (Rugi) Per Saham Dilusian
Pos ini merupakan jumlah laba (rugi) pada suatu periode yang tersedia bagi setiap saham biasa yang beredar selama periode pelaporan dan saham biasa yang diasumsikan telah diterbitkan bagi semua efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif yang beredar selama periode pelaporan.
Jumlah saham biasa yang akan diterbitkan saat konversi efek berpotensi saham biasa ditentukan sesuai persyaratan efek berpotensi saham tersebut. Perhitungan ini mengasumsikan nilai konversi atau harga pelaksanaan yang paling menguntungkan dari sudut pandang pemegang efek berpotensi saham biasa.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

- a. Pengertian
Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan.
- b. Komponen Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan ini harus menyajikan:
 - 1) Laba (rugi) bersih periode bersangkutan
 - 2) Setiap pos yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas.
Contoh pos ini antara lain keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual.
 - 3) Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi atas kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait, yaitu berupa:
 - a) Efek Kumulatif atas Perubahan Kebijakan Akuntansi.
Merupakan pengaruh kumulatif yang bersifat retrospektif terhadap laba rugi perusahaan sebagai akibat dari suatu perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan.
 - b) Koreksi atas Kesalahan Mendasar
Kesalahan mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.
Pengaruh Kumulatif dari Perubahan Kebijakan Akuntansi dan koreksi atas kesalahan mendasar disajikan bersih setelah memperhitungkan pajak.
 - 4) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik
 - 5) Saldo laba (rugi) pada awal dan akhir periode, yang dibagi dalam:
 - a) Yang Telah Ditentukan Penggunaannya
Pos ini merupakan saldo laba yang ditentukan penggunaannya dan disajikan terpisah antara jumlah yang telah ditentukan penggunaannya oleh perusahaan dan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.
 - b) Yang Belum Ditentukan Penggunaannya
Pos ini merupakan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya oleh perusahaan.

- 6) Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal ditempatkan dan disetor penuh, tambahan modal disetor dan pos-pos ekuitas lainnya pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

5. Laporan Arus Kas

a. Pengertian

Laporan Arus Kas adalah laporan yang berisi informasi historis mengenai perubahan kas yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama periode tertentu. Selain itu di dalam laporan arus kas juga disajikan informasi mengenai aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas.

b. Komponen Utama Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas harus menyajikan arus kas selama periode tertentu dan dikelompokkan menurut klasifikasi aktivitas sebagai berikut:

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

- a) Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar.
- b) Arus Kas dari Aktivitas Operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba (rugi) bersih.
- c) Arus Kas dari Aktivitas Operasi antara lain dapat berupa:
 - (1) Penerimaan kas dari penjualan hasil hutan;
 - (2) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
 - (3) Pembayaran kas kepada karyawan;
 - (4) Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan atau investasi;
 - (5) Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan;
 - (6) Bunga yang dibayarkan dan bunga serta dividen yang diterima, diklasifikasi sebagai arus kas operasi karena mempengaruhi laba (rugi) bersih;
 - (7) Hasil penjualan atau jatuh tempo atas efek yang diperdagangkan dan kas yang dikeluarkan untuk pembelian efek yang diperdagangkan termasuk dalam aktivitas operasi; atau
 - (8) Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan
- d) Perusahaan harus menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung yaitu mengungkapkan kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto.

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

- a) Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan perolehan dan pelepasan aset investasi dan aset lain serta hasil investasi.

- b) Arus Kas dari Aktivitas Investasi antara lain dapat berupa:
- (1) Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri;
 - (2) Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain;
 - (3) Perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain;
 - (4) Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta pelunasannya;
 - (5) Pembayaran kas sehubungan dengan *futures contracts*, *forward contracts*, *option contracts* dan *swap contracts*, kecuali apabila kontrak tersebut dilakukan untuk tujuan perdagangan (*dealing or trading*), atau apabila pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan;
 - (6) Hasil penjualan atau jatuh tempo atas efek yang tersedia untuk dijual dan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo merupakan arus kas dari aktivitas investasi; atau
 - (7) Kas yang dikeluarkan untuk pembelian efek yang tersedia untuk dijual dan efek yang dimiliki hingga jatuh tempo termasuk dalam aktivitas investasi.
- 3) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
- a) Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah arus kas yang timbul dari penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan transaksi pendanaan jangka panjang dengan kreditur dan pemegang saham perusahaan.
- b) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan antara lain dapat berupa:
- (1) penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya;
 - (2) pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham perusahaan;
 - (3) penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotik, dan pinjaman lainnya;
 - (4) Pelunasan pinjaman; atau
 - (5) Dividen yang dibayar dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan.
- c. Ketentuan Penyajian Laporan Arus Kas
- 1) Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan, masing-masing harus diungkapkan tersendiri. Bunga dan dividen harus diklasifikasikan secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan, berdasarkan sumber dan tujuan penggunaannya. Bunga dan dividen yang diterima harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi atau investasi. Bunga yang dibayarkan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi atau pendanaan, sedangkan dividen yang dibayarkan diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.
 - 2) Jumlah bunga yang dibayarkan selama suatu periode diungkapkan dalam laporan arus kas baik yang telah diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi maupun yang dikapitalisasi menurut alternatif perlakuan yang diperkenankan oleh PSAK.

- 3) Arus kas yang berasal dari transaksi dalam valuta asing harus dibukukan dalam mata uang yang digunakan dalam pelaporan keuangan dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs pada tanggal arus kas.
 - 4) Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul akibat perubahan kurs bukan merupakan arus kas. Namun demikian, pengaruh perubahan kurs terhadap kas dan setara kas dalam mata uang asing dilaporkan dalam laporan arus kas untuk merekonsiliasikan saldo awal dan akhir kas dan setara kas. Jumlah selisih kurs tersebut disajikan terpisah dari arus kas aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
 - 5) Jika suatu kontrak dimaksudkan untuk menangkal (*hedge*) suatu posisi yang dapat diidentifikasi, maka arus kas dari kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan.
 - 6) Perusahaan harus menyajikan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali aktivitas berikut yang disajikan menurut arus kas bersih yaitu:
 - a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para pelanggan, apabila arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas perusahaan, misalnya penerimaan dan pembayaran rekening giro.
 - b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, dengan volume transaksi yang besar dan dengan jangka waktu singkat (*short maturity*), misalnya :
 - (1) Pembelian dan penjualan surat-surat berharga; dan
 - (2) Pinjaman jangka pendek lain dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang.
 - 7) Arus kas sehubungan dengan pos luar biasa harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan sesuai dengan sifat transaksinya dan disajikan tersendiri.
- d. Pengungkapan Aktivitas yang Tidak Mempengaruhi Arus Kas
- Transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas harus disajikan dalam kelompok 'Aktivitas yang Tidak Mempengaruhi Arus Kas' dalam laporan arus kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan sedemikian rupa pada catatan atas laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut. Transaksi tersebut dapat berbentuk:
- 1) Perolehan aset secara kredit atau melalui sewa pembiayaan (*finance lease*);
 - 2) Akuisisi perusahaan melalui penerbitan saham;
 - 3) Konversi hutang menjadi modal; atau
 - 4) Kapitalisasi biaya pinjaman.

C. Pedoman Pengungkapan Laporan Keuangan

1. Catatan atas Laporan Keuangan

a. Pengertian

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan :

- 1) Gambaran umum perusahaan, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi lainnya;

- 2) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
 - 3) Informasi yang diwajibkan dalam PSAK atau Peraturan Perundangan yang berlaku tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas;
 - 4) Informasi lain yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.
- b. Pos-pos yang nilainya material, harus dirinci dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa akun sejenis dirinci dan dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d. Aset yang dijamin harus diungkapkan dalam penjelasan masing-masing pos. Apabila aset perusahaan diasuransikan, harus diungkapkan jenis dan nilai aset yang diasuransikan, nilai pertanggungan asuransi serta pendapat manajemen atas kecukupan pertanggungan asuransi. Dalam hal tidak diasuransikan, harus diungkapkan alasannya.
 - e. Pedoman ini tidak menentukan bentuk penyajian Catatan atas Laporan Keuangan. Namun demikian, pengungkapannya mencakup tetapi tidak terbatas pada unsur-unsur yang diuraikan dalam angka 2 berikut ini.

2. Unsur-Unsur Catatan atas Laporan Keuangan

- a. Gambaran Umum Perusahaan
Bagian ini berisi penjelasan tentang hal-hal umum yang penting untuk diungkapkan berkaitan dengan perusahaan yang bersangkutan, mencakup:
 - 1) Pendirian Perusahaan
Penjelasan mengenai pendirian perusahaan beserta perubahan terhadap anggaran dasar, yang antara lain meliputi:
 - a) Riwayat perusahaan;
 - b) Akta Pendirian dan perubahan anggaran dasar terakhir, pengesahan oleh Menteri Kehakiman atau pengumuman pada Lembaran Berita Negara;
 - c) Tempat kedudukan perusahaan, lokasi dan jumlah kantor cabang.
 - 2) Bidang usaha utama perusahaan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan kegiatan usaha yang dijalankan.
 - 3) Izin-izin yang dimiliki perusahaan terkait dengan kegiatan pemanfaatan hutan.
 - 4) Sistem Silvikultur yang digunakan.
 - 5) Tanggal mulai beroperasinya perusahaan secara komersial. Apabila perusahaan melakukan ekspansi atau penciutan usaha secara signifikan pada periode laporan yang disajikan, harus disebutkan saat dimulainya operasi komersial dari ekspansi atau penciutan perusahaan dan kapasitas produksinya.
 - 6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Perusahaan harus mencantumkan NPWP
- b. Penawaran Umum Efek Perusahaan
Penjelasan penawaran umum efek perusahaan yang meliputi tanggal efektif penawaran umum perdana, kebijakan/tindakan perusahaan yang dapat mempengaruhi efek yang diterbitkan (*corporate action*) sejak penawaran umum perdana sampai dengan periode pelaporan terakhir, jenis dan jumlah efek yang ditawarkan pada saat penawaran terakhir, dan tempat pencatatan efek perusahaan.

- c. Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris
Yang harus diungkapkan adalah:
- 1) Nama anggota direksi dewan komisaris, dan komite audit.
 - 2) Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan.
- d. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi
Dalam bagian ini harus diungkapkan sebagai berikut :
- 1) Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan
Yang harus dijelaskan adalah:
 - a) Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan nilai historis (*historical cost*), namun untuk beberapa transaksi atau akun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, dimungkinkan mengukurnya dengan nilai kini (*current cost*), nilai realisasi (*realizable value*), nilai wajar (*fair value*), atau nilai terendah antara biaya dan harga pasar.
 - b) Asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan, adalah dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.
 - c) Mata uang pelaporan yang digunakan dan alasannya, apabila mata uang pelaporan bukan rupiah. Apabila terdapat perubahan mata uang pelaporan, diungkapkan alasannya, kurs yang digunakan dalam pengukuran kembali atau penjabaran, dan ikhtisar neraca dan laporan laba rugi yang disajikan sebagai perbandingan dalam mata uang sebelumnya.
 - d) Alasan perubahan periode pelaporan.
 - 2) Kebijakan akuntansi tertentu yang diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi penting
Kebijakan akuntansi meliputi tetapi tidak terbatas pada hal sebagai berikut :
 - a) Kas dan Setara Kas
Yang harus dijelaskan adalah unsur-unsur Kas dan Setara Kas.
 - b) Piutang
Yang harus dijelaskan adalah:
 - (1) Pengakuan nilai piutang
 - (2) Dasar penetapan penyisihan piutang ragu-ragu yang dapat berupa :
 - (a) Penelaahan terhadap masing-masing piutang pada akhir periode; atau
 - (b) Dasar estimasi lainnya bila penelaahan terhadap masing-masing piutang tidak praktis untuk dilakukan. Dalam hal ini diungkapkan rumusan yang digunakan.
 - c) Persediaan
Yang harus dijelaskan adalah:
 - (1) Pengakuan nilai persediaan, yaitu berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih secara agregat, mana yang lebih rendah, (*the lower of cost or net realizable value*);
 - (2) Rumus biaya persediaan.
Rumus yang digunakan apakah biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP atau *FIFO*), rata-rata tertimbang (*weighted average cost method*), masuk terakhir keluar pertama (MTKP atau *LIFO*) atau identifikasi khusus (*specific identification*).
 - (3) Metode penyisihan untuk persediaan mati atau hilang dan persediaan yang perputarannya lambat (*slow moving*).

- d) Investasi Efek
Yang harus dijelaskan adalah:
- (1) Kelompok investasi dalam bentuk surat berharga (efek), baik yang berupa efek hutang (*debt securities*) maupun efek ekuitas (*equity securities*), yaitu surat berharga dalam kelompok diperdagangkan (*trading securities*), dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity*) dan tersedia untuk dijual (*available for sale*);
 - (2) Pengakuan nilai pada investasi dalam bentuk surat berharga, untuk setiap kelompok surat berharga;
 - (3) Metode akuntansi yang digunakan dalam pencatatan penyertaan (metode ekuitas atau biaya).
- e) Properti Investasi
Yang harus dijelaskan adalah:
- (1) Penentuan nilai tercatat investasi;
 - (2) Perlakuan perubahan nilai pasar investasi lancar yang dicatat berdasarkan harga pasar;
 - (3) Perlakuan surplus revaluasi atas penjualan investasi yang dinilai kembali.
- f) Hutan Tanaman (HT)
Yang harus dijelaskan adalah:
- (1) Dasar klasifikasi untuk jenis tanaman sebagai persediaan, HT Dalam Pengembangan, atau HT Siap Panen;
 - (2) Dasar penilaian berdasarkan kondisi tegakan dan pertumbuhannya;
 - (3) Kebijakan akuntansi reklasifikasi HT Dalam Pengembangan ke HT Siap Panen;
 - (4) Metode depresiasi dan masa manfaat;
 - (5) Dasar alokasi biaya tidak langsung, untuk tiap tahun tanam
 - (6) Kebijakan akuntansi biaya pinjaman (jika ada).
- g) Aset Tetap
Yang harus dijelaskan adalah:
- (1) Dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto aset tetap;
 - (2) Model penilaian yang dipilih (model biaya atau revaluasi);
 - (3) Metode penyusutan yang digunakan;
 - (4) Kriteria Kapitalisasi biaya perbaikan dan perawatan, penurunan nilai (*impairment*);
 - (5) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - (6) Status kepemilikan aset tetap yang dikuasai perusahaan, baik yang sedang dalam proses balik nama maupun yang masih atas nama pihak lain;
 - (7) Dasar perlakuan transaksi sewa sebagai *finance lease*;
 - (8) Dasar pengukuran aset dalam pembangunan.
- h) Sewa
Yang harus dijelaskan adalah :
- (1) Dasar perlakuan transaksi sewa sebagai *finance lease*;
 - (2) Perlakuan laba (rugi) transaksi penjualan dan sewa-balik (*sale and lease back*).
- i) Aset Tidak Berwujud
Yang harus dijelaskan adalah:
- (1) Kriteria pengakuan untuk tiap jenis aset;
 - (2) Metode amortisasi yang digunakan;
 - (3) Masa manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan;
 - (4) Untuk biaya pengembangan, agar dijelaskan juga dasar kapitalisasinya.

- j) Aset Lain-Lain
Yang harus dijelaskan adalah:
(1) Dasar pengelompokan suatu aset menjadi aset lain-lain;
(2) Kebijakan akuntansi untuk tiap jenis aset.
- k) Penurunan Nilai Aset
Yang harus dijelaskan:
(1) Dasar pengukuran (metode dan asumsi) penurunan nilai aset;
(2) Perlakuan akuntansi terhadap penurunan nilai dan pemulihan nilai aset.
- l) Restrukturisasi Hutang Bermasalah
Yang harus dijelaskan adalah pengakuan keuntungan neto atas restrukturisasi hutang, jika ada.
- m) Pengakuan Pendapatan dan Beban
Yang harus dijelaskan adalah:
(1) dasar, metode dan saat pengakuan pendapatan pokok/utama.
(2) dasar, metode dan saat pengakuan pendapatan lainnya;
(3) dasar, metode dan saat pengakuan beban untuk masing-masing klaim dan manfaat;
(4) dasar, metode dan saat pengakuan beban untuk beban usaha dan beban lain-lain.
- n) Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
Yang harus dijelaskan adalah:
(1) Dasar penetapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
(2) Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam Laporan Keuangan;
(3) pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa akan tetapi tidak disajikan sebagai pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.
- o) Biaya Pinjaman
Yang harus dijelaskan adalah kebijakan pembebanan atau kapitalisasi, unsur-unsur biaya pinjaman, aset yang memenuhi syarat (*qualifying assets*).
- p) Pajak Penghasilan
Yang harus dijelaskan adalah metode akuntansi pajak penghasilan yang digunakan dengan menyebutkan akun-akun yang menimbulkan pajak tangguhan.
- q) Imbalan Kerja.
Yang harus dijelaskan adalah:
(1) Deskripsi dan jenis program imbalan kerja;
(2) Dasar pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial;
(3) Dasar pembebanan biaya jasa lalu;
(4) Dasar perhitungan jumlah kewajiban di neraca;
(5) Dampak terhadap perubahan asumsi pada laporan keuangan.
- r) Opsi Saham
Yang harus dijelaskan adalah:
(1) Program opsi saham;
(2) Perlakuan akuntansi atas opsi saham;
(3) Dasar penilaian dan penyajian.
- s) Penggunaan Estimasi
Yang harus dijelaskan adalah dasar dilakukannya estimasi dan dampaknya terhadap laporan keuangan.

- t) Kuasi-Reorganisasi
Yang harus dijelaskan adalah:
- (1) Dasar dilakukannya kuasi-reorganisasi;
 - (2) Dasar penentuan nilai wajar aset dan kewajiban;
 - (3) Perlakuan akuntansi untuk selisih hasil revaluasi aset dan kewajiban.
- u) Laba (Rugi) Per Saham
Yang harus dijelaskan adalah:
- (1) Dasar penentuan pembilang yang digunakan dalam penghitungan laba (rugi) per saham dasar dan dilusian;
 - (2) Dasar penentuan penyebut yang digunakan dalam penghitungan laba (rugi) per saham dasar dan dilusian;
 - (3) Bila jumlah saham biasa atau efek berpotensi saham biasa yang beredar bertambah sebagai akibat dari kapitalisasi, penerbitan saham bonus atau pemecahan saham (*stock-split*) atau berkurang sebagai akibat pembalikan pemecahan saham (*reversed stock-split*) maka perhitungan laba (rugi) per saham dasar dan dilusian untuk semua periode yang disajikan harus disesuaikan (retrospektif).
- v) Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing
Yang harus dijelaskan adalah:
- (1) Kurs yang digunakan untuk membukukan transaksi dalam mata uang asing;
 - (2) Kurs tanggal neraca yang digunakan, yaitu kurs beli bank untuk menjabarkan pos aset moneter dan kurs jual bank untuk menjabarkan pos kewajiban moneter. Kurs yang digunakan adalah kurs pada bank di mana perusahaan melakukan sebagian besar transaksi valuta asing. Sebagai perbandingan harus diungkapkan juga kurs jual dan beli Bank Indonesia pada tanggal neraca;
 - (3) Perlakuan akuntansi selisih kurs yang timbul dari penjabaran aset dan kewajiban moneter.
- w) Instrumen Derivatif
Yang harus dijelaskan adalah :
- (1) Perlakuan akuntansi sesuai tujuan transaksi derivatif;
 - (2) Dasar pengukuran (nilai wajar atau nilai lainnya);
 - (3) Kriteria pengakuan laba rugi, yaitu selisih nilai wajar dan nilai tercatat dilaporkan pada laba rugi periode berjalan kecuali yang memenuhi kriteria pendapatan komprehensif lain.
- x) Segmen Usaha
Yang harus dijelaskan adalah :
- (1) Dasar yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen;
 - (2) Dasar yang digunakan untuk menggolongkan suatu segmen sebagai segmen primer atau sekunder;
 - (3) Dasar yang digunakan untuk mengalokasikan pendapatan, beban, dan aset dalam setiap segmen.

e. Pengungkapan atas Pos-Pos Laporan Keuangan dan Pengungkapan Lainnya

Bagian ini menjelaskan hal-hal yang penting untuk diungkapkan pada tiap-tiap pos, yang dapat mempengaruhi pembaca dalam pengambilan keputusan, yang disusun dengan memperhatikan urutan penyajian Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas, serta informasi tambahan. Ilustrasi atas pengungkapan yang dimaksud di atas dapat dilihat pada lampiran contoh format.

Pengungkapan pos-pos laporan keuangan dan pengungkapan lainnya sebagai berikut:

1) Kas dan Setara Kas

Yang harus diungkapkan antara lain:

- a) Unsur kas dan setara kas dipisahkan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga;
- b) Rincian jumlah penempatan di bank berdasarkan nama bank serta jenis mata uang asing.

2) Investasi Jangka Pendek

Yang harus diungkapkan adalah pemisahan antara jenis investasi sementara deposito dan surat berharga (efek), yaitu:

- a) Untuk deposito, pengungkapan mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Bank tempat dana ditempatkan yang dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
 - (2) Kisaran suku bunga deposito selama periode pelaporan;
 - (3) Jenis dan jumlah deposito dalam mata uang asing;
 - (4) Hal-hal yang dapat mempengaruhi kualitas pencairan deposito tersebut. (misalnya: deposito yang dijaminan).
- b) Pengelompokan efek sesuai kategorinya dan dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa:
 - (1) Efek yang diperdagangkan (*trading securities*);
 - (2) Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity*);
 - (3) Efek yang tersedia untuk dijual (*available for sale*);
 - (4) Pengungkapan lain dari masing-masing efek yang meliputi :
 - (a) Nilai wajar agregat. (*marked to market*);
 - (b) Metode dan asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar Efek;
 - (c) Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari pemilikan efek tersedia untuk dijual;
 - (d) Biaya perolehan termasuk jumlah premi dan diskonto yang belum diamortisasi, untuk efek dimiliki hingga jatuh tempo;
 - (e) Peringkat efek hutang berikut nama pemeringkat, jika ada;
 - (f) Uraian tentang alasan diambilnya keputusan menjual atau memindahkan kelompok efek.

3) Wesel tagih

Yang harus diungkapkan antara lain:

- a) Pihak penerbit;
- b) Kisaran tingkat bunga dan jenis mata uang;
- c) Uraian tentang sifat dan asal terjadinya (dari transaksi usaha atau lainnya);
- d) Jumlah penyisihan wesel tagih ragu-ragu, jika ada.

4) Piutang Usaha

Yang harus diungkapkan antara lain:

- a) Pemisahan antara piutang usaha kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga;
- a) Jumlah piutang menurut pelanggan;
- b) Jumlah piutang menurut mata uang;
- c) Jumlah piutang menurut umur (*aging schedule*);
- d) Jumlah penyisihan piutang ragu-ragu, beban piutang ragu-ragu dan penghapusan piutang;
- e) Pendapat manajemen akan kecukupan jumlah penyisihan;
- f) Piutang yang dijamin dan nama pihak yang menerima jaminan;
- g) Informasi piutang yang telah dijual secara *with recourse* meliputi :
 - (1) jumlah piutang yang dialihkan, yang meliputi piutang retensi, beban bunga, jatuh tempo, dan ikatan penting lainnya yang diatur dalam perjanjian.
 - (2) jaminan yang diberikan, jika ada.

5) Piutang Lain-lain

Yang harus diungkapkan antara lain:

- a) Rincian jenis dan jumlah piutang;
- b) Jumlah penyisihan piutang ragu-ragu, beban piutang ragu-ragu, dan penghapusan piutang, jika ada;
- c) Pendapat manajemen atas kecukupan jumlah penyisihan.

6) Persediaan

Yang harus diungkapkan antara lain:

- a) Total jumlah tercatat dan nilai tercatat menurut klasifikasi tertentu, seperti:
 - (1) Persediaan barang jadi;
 - (2) Persediaan dalam proses;
 - (3) Bahan baku dan pembantu.
- b) Total jumlah tercatat dan nilai tercatat menurut klasifikasi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu,
- c) Jumlah penyesuaian atas penurunan nilai persediaan,
- d) Kondisi dan peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan,
- e) Jumlah penyisihan atau penghapusan persediaan mati, rusak atau usang,
- f) Pendapat manajemen atas kecukupan jumlah penyisihan atau penghapusan persediaan yang mati atau usang,
- g) Nilai tercatat persediaan yang dijamin dan nama pihak yang menerima jaminan,
- h) Nilai persediaan yang diasuransikan, nilai pertanggungan asuransi, dan risiko yang ditutup,
- i) Pendapat manajemen atas kecukupan jumlah pertanggungan asuransi,
- j) Nilai tercatat persediaan yang dijadikan jaminan,
- k) Dalam situasi depresiasi rupiah luar biasa: jumlah selisih kurs yang dikapitalisasi, biaya pengganti (*replacement cost*) dan jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*),
- l) Penjelasan mengenai kerugian persediaan yang jumlahnya material atau sifatnya luar biasa, seperti bencana alam,
- m) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi dan tingkat kapitalisasi yang dipergunakan, untuk persediaan yang memenuhi kriteria aset tertentu (*qualifying asset*).

- 7) Pajak Dibayar di Muka
Yang harus diungkapkan antara lain:
 - a) Jenis dan jumlah masing-masing pajaknya;
 - b) Uraian mengenai jumlah restitusi pajak yang diajukan dan statusnya.
- 8) Biaya Dibayar di Muka
Yang harus diungkapkan adalah rincian menurut jenis dan jumlah.
- 9) Aset Lancar Lain
Yang harus diungkapkan adalah rincian menurut jenis dan jumlah.
- 10) Piutang Hubungan Istimewa
Yang harus diungkapkan antara lain:
 - a) Rincian jenis, nama pihak yang memiliki hubungan istimewa, dan jumlah piutang.
 - b) Alasan dan dasar pembentukan penyisihan dan/atau penghapusan, transaksi terjadinya piutang, saat timbulnya piutang, nama debitur, sifat hubungan dengan debitur dan jumlahnya
 - c) Jumlah penyisihan piutang ragu-ragu, beban piutang ragu-ragu, dan penghapusan piutang
 - d) Pendapatan manajemen atas kecukupan jumlah penyisihan.
- 11) Investasi pada Perusahaan Asosiasi
Yang harus diungkapkan antara lain:
 - a) Nama perusahaan dan persentase kepemilikan.
 - b) Rekonsiliasi nilai tercatat penyertaan pada awal dan akhir periode dengan memperlihatkan bagian laba rugi yang diakui dan dividen yang diperoleh pada periode berjalan serta penurunan permanen nilai penyertaan.
 - c) Informasi lainnya yang menyangkut kegiatan perusahaan asosiasi, misalnya perusahaan asosiasi menerbitkan saham baru.
- 12) HT Siap Panen
Yang harus diungkapkan antara lain:
 - a) Rincian nilai tercatat dan akumulasi depresiasi menurut:
 - (1) Jenis hasil hutan ;
 - (2) Lokasi yang mencakup luas area.
 - b) Rekonsiliasi nilai tercatat awal tahun dan akhir tahun hasil hutan untuk setiap kelompok .
 - c) HT Siap Panen yang dijamin
- 13) HT dalam Pengembangan
Yang harus diungkapkan adalah:
 - a) Mutasi HT Dalam Pengembangan sebagai berikut:
 - (1) Saldo awal,
 - (2) Tambahan tahun berjalan,
 - (a) Biaya langsung ;
 - (b) Biaya tidak langsung;
 - (c) Jumlah kapitalisasi biaya pinjaman, dan rugi kurs dalam hal terjadi depresiasi luar biasa.
 - (3) Pengurangan tahun berjalan,
 - (a) Jumlah yang dimutasi ke HT Siap Panen.
 - (b) Pengurangan lainnya (contoh : kebakaran, alih fungsi, gagal tanam, dan bencana alam).
 - (4) Saldo akhir,
 - b) Rincian nilai tercatat berdasarkan lokasi dan luas area per tahun tanam.

- c) Informasi kondisi tegakan dan pertumbuhannya yang mendukung dasar penilaian HT Dalam Pengembangan.
 - d) Status perizinan dan masa konsesi
- 14) Properti Investasi
Yang harus diungkapkan adalah :
- (1) Rincian tanah dan bangunan berdasarkan nilai perolehan;
 - (2) Informasi nilai wajar investasi tanah dan bangunan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 - (3) Informasi lain yang berkaitan dengan investasi tersebut seperti penjaminan dan asuransi serta atas nama kepemilikan.
- 15) Investasi Jangka Panjang Lain
Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Rincian menurut jenis investasi sebagai berikut:
 - (1) Efek hutang dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity*);
 - (2) Efek hutang dan efek ekuitas tersedia untuk dijual (*available for sale*);
 - (3) Properti investasi;
 - (4) Investasi lainnya.
 - b) Pemisahan antara investasi pada pihak ketiga dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk investasi dalam efek hutang dan efek ekuitas, investasi dalam properti dan investasi lainnya.
 - c) Pengungkapan investasi dalam efek hutang (dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual) adalah sebagai berikut:
 - (1) Rincian efek hutang menurut penerbit, nilai nominal, diskonto atau premium yang belum diamortisasi, nilai tercatat, tingkat bunga, dan tanggal jatuh tempo,
 - (2) Efek yang pembayarannya dijamin dengan hipotik diungkapkan secara terpisah,
 - (3) Persyaratan efek hutang,
 - (4) Nilai wajar agregat,
 - (5) Metode dan asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar efek,
 - (6) Laba (rugi) yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual (*available for sale*),
 - (7) Peringkat efek hutang berikut nama pemeringkat, jika ada.
 - d) Untuk efek ekuitas tersedia untuk dijual harus diungkapkan:
 - (1) Nilai wajar agregat,
 - (2) Metode dan asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar efek,
 - (3) Laba (rugi) yang belum direalisasi.
 - e) Uraian tentang alasan diambilnya keputusan menjual, mengubah jenis, atau memindahkan kelompok efek,
 - f) Pengungkapan investasi dalam efek yang menggunakan metode biaya (*cost method*), adalah:
 - (1) Nama perusahaan dan persentase yang dimiliki, nilai tercatat penyertaan.
 - (2) Alasan tidak dapat ditentukannya nilai wajar efek.
 - (3) Mutasi penyertaan dan penurunan permanen nilai penyertaan.
 - g) Pengungkapan investasi dalam bentuk properti meliputi jenis/uraian, lokasi, biaya perolehannya dan nilai wajarnya.
 - h) Pengungkapan investasi jangka panjang lainnya meliputi jenis dan nilai wajarnya.

- i) Apabila investasi jangka panjang dijamin, syarat-syarat dan kondisi yang berdampak signifikan bagi perusahaan harus dinyatakan dan diungkapkan baik jumlah maupun pihak penerima jaminan.
 - j) Kondisi atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai atau pemulihan penurunan nilai.
 - k) Rugi penurunan nilai yang diakui selama periode berjalan dan komponen Laporan Laba Rugi dimana kerugian tersebut dilaporkan. Pengungkapan dilakukan untuk setiap jenis investasi.
 - l) Pemulihan kerugian penurunan nilai yang diakui selama periode berjalan dan komponen Laporan Laba Rugi dimana kerugian tersebut dilaporkan. Pengungkapan dilakukan untuk setiap jenis investasi.
- 16) Aset Tetap
- a) Pemilikan langsung
Yang harus diungkapkan adalah:
 - (1) Rincian aset tetap menurut jenisnya.
 - (2) Nilai wajar aset tetap jika menggunakan model revaluasi.
 - (3) Akumulasi penyusutan masing-masing jenis aset tetap.
 - (4) Jumlah penyusutan pada tahun berjalan, dan alokasi biaya penyusutan pada laporan laba rugi.
 - (5) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan penambahan dan pelepasan.
 - (6) Nilai aset tetap yang diasuransikan, nilai pertanggungan dan risiko yang ditutup.
 - (7) Pendapat manajemen atas kecukupan jumlah pertanggungan asuransi.
 - (8) Rincian aset tetap yang digunakan untuk pengelolaan hutan serta peruntukannya.
 - (9) Untuk setiap kejadian luar biasa, harus diungkapkan :
 - (a) Jenis aset yang mengalami kerusakan dan penyebab kerusakannya
 - (b) Nilai buku aset tersebut
 - (c) Jumlah klaim yang disetujui
 - (d) Kerugian yang timbul dari nilai pertanggungan yang tidak ditutup oleh asuransi.
 - (10) Jika dilakukan penilaian kembali pada periode yang disajikan, harus diungkapkan :
 - (a) Dasar hukum yang digunakan untuk menilai kembali aset.
 - (b) Tanggal efektif penilaian kembali.
 - (c) Nama penilai independen, jika ada.
 - (d) Dasar yang dipergunakan untuk menentukan nilai revaluasi.
 - (e) Jumlah tercatat setiap jenis aset tetap.
 - (f) Selisih penilaian kembali setiap jenis aset tetap.
 - (11) Pengungkapan menurut jenis aset tetap yang mengalami perubahan estimasi masa guna dan/atau metode depresiasi.
 - (12) Aset tetap yang dijamin dan nama pihak yang menerima jaminan
 - (13) Penurunan nilai aset tetap:
 - (a) Kondisi atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai atau pemulihan penurunan nilai.

- (b) Rugi penurunan nilai yang diakui selama periode berjalan dan komponen Laba Rugi dimana kerugian tersebut dilaporkan. Pengungkapan dilakukan untuk setiap jenis aset tetap.
 - (c) Pemulihan kerugian penurunan nilai yang diakui selama periode berjalan dan komponen Laporan Laba Rugi dimana kerugian tersebut dilaporkan. Pengungkapan dilakukan untuk setiap jenis aset tetap.
- (14) Pengungkapan nilai buku, hasil penjualan bersih, keuntungan (kerugian) dari aset tetap yang dijual.
- b) Aset Hak Kelola
- Yang harus diungkapkan adalah:
- (1) Rincian aset tetap menurut jenisnya.
 - (2) Nilai wajar aset tetap jika menggunakan model revaluasi.
 - (3) Akumulasi penyusutan masing-masing jenis aset tetap.
 - (4) Jumlah penyusutan pada tahun berjalan, dan alokasi biaya penyusutan pada laporan laba rugi.
 - (5) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan penambahan dan pelepasan.
 - (6) Untuk setiap kejadian luar biasa, harus diungkapkan :
 - (a) Jenis aset yang mengalami kerusakan dan penyebab kerusakannya
 - (b) Nilai buku aset tersebut
 - (c) Kerugian yang timbul
 - (7) Jika dilakukan penilaian kembali pada periode yang disajikan, harus diungkapkan :
 - (a) Dasar hukum yang digunakan untuk menilai kembali aset.
 - (b) Tanggal efektif penilaian kembali.
 - (c) Nama penilai independen, jika ada.
 - (d) Dasar yang dipergunakan untuk menentukan nilai revaluasi.
 - (e) Jumlah tercatat setiap jenis aset tetap.
 - (f) Selisih penilaian kembali setiap jenis aset tetap.
 - (8) Pengungkapan menurut jenis aset tetap yang mengalami perubahan estimasi masa guna dan/atau metode depresiasi.
 - (9) Penurunan nilai aset tetap:
 - (a) Kondisi atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai atau pemulihan penurunan nilai.
 - (b) Rugi penurunan nilai yang diakui selama periode berjalan dan komponen Laba Rugi dimana kerugian tersebut dilaporkan. Pengungkapan dilakukan untuk setiap jenis aset tetap.
 - (c) Pemulihan kerugian penurunan nilai yang diakui selama periode berjalan dan komponen Laporan Laba Rugi dimana kerugian tersebut dilaporkan. Pengungkapan dilakukan untuk setiap jenis aset tetap.
 - (10) Pengungkapan nilai buku, kerugian dan ganti rugi jika aset tersebut dialihkan.
- c) Aset Sewa
- Yang harus diungkapkan antara lain:
- (1) Rincian aset sewa berdasarkan nilai tunai seluruh pembayaran sewa minimum selama masa sewa atau nilai wajar aset sewaan, mana yang lebih rendah. Di samping itu dijelaskan mengenai akumulasi penyusutan masing-masing kelompok aset sewa dan jumlah beban penyusutan pada periode berjalan.

- (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan penambahan dan pengurangan.

d) Aset dalam Penyelesaian

Yang harus diungkapkan antara lain:

- (1) Rincian aset yang sedang dalam penyelesaian;
- (2) Persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak.
- (3) Estimasi saat penyelesaian proyek.
- (4) Hambatan kelanjutan penyelesaian proyek, jika ada
- (5) Penjelasan mengenai jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode pelaporan.

17) Aset Tak Berwujud

Yang harus diungkapkan antara lain :

- a) Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan. Apabila perusahaan mengamortisasi aset tidak berwujud lebih dari 20 (dua puluh) tahun maka harus diungkapkan alasan dan faktor-faktor penting dalam penentuan masa manfaat aset tidak berwujud.
- b) Metode amortisasi yang digunakan
- c) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode.
- d) Unsur pada laporan keuangan yang di dalamnya terdapat amortisasi aset tidak berwujud.
- e) Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan :
 - (1) Penambahan aset tidak berwujud yang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam perusahaan dan penggabungan usaha.
 - (2) Penghentian dan pelepasan aset tidak berwujud.
 - (3) Rugi penurunan nilai, jika ada, yang diakui pada laporan laba rugi periode berjalan.
 - (4) Rugi penurunan nilai yang dibalik pada laporan laba rugi periode berjalan, jika ada.
 - (5) Amortisasi yang diakui selama periode berjalan.
 - (6) Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan.
- f) Penjelasan nilai tercatat dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap aset tidak berwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan.
- g) Keberadaan dan nilai tercatat aset tidak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi dan nilai tercatat aset tak berwujud yang ditentukan sebagai jaminan atas hutang.
- h) Jumlah komitmen untuk memperoleh aset tidak berwujud.
- i) Jumlah keseluruhan pengeluaran riset dan pengembangan yang diakui sebagai beban periode berjalan.

18) Aset Lain-lain

Yang harus diungkapkan antara lain :

- a) Rincian akun aset lain-lain yaitu aset tetap yang tidak digunakan, biaya praoperasi, beban ditangguhkan, uang muka investasi, cadangan dana, persediaan rusak yang tidak bisa dijual lagi menunggu penghapusan, dan uang muka pembelian aset tetap.

- b) Uraian mengenai sifat masing-masing akun.
 - c) Jumlah amortisasi untuk beban ditangguhkan
 - d) Alasan perubahan klasifikasi aset yang sebelumnya tidak termasuk dalam aset lain-lain.
 - e) Setiap jenis aset tetap yang sudah tidak dapat digunakan secara aktif dan dipegang untuk tujuan dijual (*scrapped*), nilai bukunya, dan nilai realisasi bersih.
 - f) Jumlah penyisihan penghapusan dan mutasi selama periode berjalan.
 - g) Pendapat manajemen akan kecukupan jumlah penyisihan penghapusan.
- 19) Hutang Provisi Sumber Daya Hutan
Yang harus diungkapkan adalah rincian jumlah berdasarkan objek (harga patokan) yang dikenakan PSDH.
- 20) Hutang Dana Reboisasi
Yang harus diungkapkan adalah rincian jumlah berdasarkan objek (harga patokan) yang dikenakan dana reboisasi.
- 21) Pinjaman Jangka Pendek
Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Pemisahan antara hutang pada pihak ketiga dengan pihak hubungan istimewa.
 - b) Rincian hutang berdasarkan jenis hutang, nama kreditur, jenis mata uang serta nilainya.
 - c) Kisaran tingkat bunga dan saat jatuh tempo
 - d) Jaminan yang diberikan dengan menunjuk akun-akun yang berhubungan.
 - e) Persyaratan lain yang penting, seperti pembatasan pembagian dividen, pembatasan rasio tertentu, dan atau pembatasan perolehan hutang baru
 - f) Penjelasan mengenai kondisi hutang, misalnya kondisi *default*.
 - g) Untuk Kewajiban Anjak Piutang *with recourse*:
 - (1) Kewajiban anjak piutang
 - (2) Retensi
 - (3) Bunga yang belum diamortisasi
 - (4) Kewajiban anjak piutang bersih.
- 22) Wesel Bayar
Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Rincian jenis, nilai nominal dan nilai tercatat dalam rupiah dan valuta asing, tanggal jatuh tempo, dan tingkat bunga.
 - b) Penjelasan tentang jaminan dan persyaratan lain
 - c) penjelasan mengenai kondisi wesel bayar, misalnya kondisi *default*.
- 23) Hutang Usaha
Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Pemisahan antara hutang usaha pada pihak ketiga dan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
 - b) Rincian berdasarkan mata uang dan nilainya.
 - c) Sifat dari transaksi
 - d) Jaminan yang diberikan oleh perusahaan dengan menunjuk akun-akun yang berhubungan.

- 24) Hutang Sistem Silvikultur
Yang harus diungkapkan antara lain:
a) Mutasi berdasarkan fisik dirinci sebagai berikut:
(1) Saldo awal (fisik dan rupiah)
(2) Rencana periode berjalan
(3) Realisasi periode berjalan
(4) Saldo akhir (fisik dan rupiah)
- 25) Hutang Pajak
Yang harus diungkapkan antara lain:
a) Jenis dan jumlahnya,
b) Informasi mengenai ketentuan pajak.
- 26) Beban Masih Harus Dibayar
Yang harus diungkapkan adalah jenis dan jumlah biaya dari unsur utama beban yang belum jatuh tempo.
- 27) Pendapatan Diterima Dimuka
Yang harus diungkapkan adalah jenis dan jumlah pendapatan diterima dimuka yang belum diberikan manfaatnya.
- 28) Bagian Kewajiban Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun
Yang harus diungkapkan adalah rincian menurut jenis dan jumlahnya.
- 29) Kewajiban Lancar Lainnya
Yang harus diungkapkan antara lain:
a) Jenis dan jumlahnya.
b) Untuk kewajiban jangka panjang yang *default*, harus diungkapkan alasan penyebab default dan langkah-langkah penyelesaian.
c) Untuk kewajiban diestimasi:
(1) Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang mencakup penambahan dan pengurangan kewajiban serta jumlah yang dibebankan pada periode berjalan.
(2) Jumlah kewajiban yang dibatalkan pada periode berjalan.
(3) Uraian singkat mengenai kewajiban diestimasi dan perkiraan saat arus keluar sumber daya yang terjadi.
(4) Diungkapkan asumsi yang mendasari suatu peristiwa jika terjadi ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar sumber daya tersebut.
d) Untuk beban tanggungan atas perjanjian kepegawaian seperti jaminan kesehatan masa pensiun:
(1) Uraian mengenai jaminan.
(2) Jumlah yang berhak atas jaminan tersebut.
- 30) Hutang Hubungan Istimewa
Yang harus diungkapkan adalah rincian jenis dan jumlah serta nama pihak yang memiliki hubungan istimewa.
- 31) Pinjaman Jangka Panjang
Yang harus diungkapkan antara lain:
a) Rincian hutang berdasarkan nama kreditur, jenis mata uang serta nilainya,
b) Jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun yang disajikan sebagai kewajiban lancar,
c) Kisaran tingkat bunga dan saat jatuh tempo,
d) Penjelasan tentang fasilitas pinjaman yang diperoleh, termasuk jumlah dan tujuan perolehannya.

- e) Penjelasan mengenai kondisi hutang (misalnya kondisi *default*), termasuk status restrukturisasi hutang.
 - f) Jaminan yang diberikan dengan menunjuk akun-akun yang berhubungan.
 - g) Persyaratan lain yang penting, seperti pembatasan pembagian dividen, pembatasan rasio tertentu, dan atau pembatasan perolehan hutang baru.
 - h) Pengungkapan informasi sehubungan dengan kewajiban yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal neraca, tetapi (1) kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan dan (2) perusahaan bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang dan didukung dengan perjanjian pembiayaan atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui; sehingga tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, antara lain adalah:
 - (1) Kreditur dan jumlahnya;
 - (2) Ringkasan perjanjian lama dan baru yang meliputi tanggal kesepakatan, jangka waktu pinjaman, tanggal jatuh tempo, dan persyaratan penting.
- 32) Hutang Sewa
- Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Rincian perusahaan sewa (*lessor*), jenis aset yang disewakan dan nilainya.
 - b) Rekonsiliasi antara total pembayaran sewa minimum di masa depan pada tanggal neraca, dengan nilai kininya.
 - c) Jumlah angsuran sewa tahunan, yaitu untuk 1 (satu) tahun, 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun berikutnya, dan yang lebih dari 5 (lima) tahun.
 - d) Rental kontinjen yang diakui sebagai beban pada periode tersebut.
 - e) Ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa lainnya (*major covenants*), termasuk jaminan lain yang diberikan.
- 33) Keuntungan Tangguhan Aset Dijual dan Sewa-Balik
- Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Rincian keuntungan (kerugian) ditangguhkan berdasarkan jenis aset.
 - b) Periode amortisasi keuntungan (kerugian).
 - c) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan penambahan dan pengurangan (amortisasi) tahun berjalan
- 34) Pinjaman Dana Reboisasi
- Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Rincian berdasarkan jenis dan jangka waktu.
 - b) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun.
 - c) Jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun yang disajikan sebagai kewajiban lancar.
 - d) Ringkasan perjanjian yang meliputi tanggal kesepakatan, jangka waktu perjanjian, tanggal jatuh tempo, kewajiban yang harus dipenuhi, dan persyaratan penting lainnya (*Debt Covenant*).
 - e) Pendapat manajemen tentang pemenuhan *Debt Covenant* atas surat berharga yang diterbitkan.

- 35) Hutang Obligasi
Yang harus diungkapkan antara lain:
- Rincian berdasarkan jenis, mata uang, dan jangka waktu.
 - Rincian jumlah berdasarkan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga.
 - Tingkat suku bunga rata-rata per tahun.
 - Rincian berdasarkan peringkat efek dan perusahaan pemeringkat.
 - Jumlah amortisasi pada tahun berjalan.
 - Jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun yang disajikan sebagai kewajiban lancar.
 - Ringkasan perjanjian yang meliputi tanggal kesepakatan, jangka waktu perjanjian, tanggal jatuh tempo, kewajiban yang harus dipenuhi, dan persyaratan penting lainnya (*Debt Covenant*).
 - Pendapat manajemen tentang pemenuhan *Debt Covenant* atas surat berharga yang diterbitkan.
- 36) Kewajiban tidak Lancar Lainnya
Yang harus diungkapkan antara lain:
- Jenis dan jumlahnya, mata uang, tingkat bunga, dan tanggal jatuh tempo.
 - Rincian jumlah berdasarkan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga.
 - Jaminan yang terkait dengan menunjuk akun-akun yang berhubungan.
- 37) Hutang Subordinasi
Yang harus diungkapkan antara lain:
- Rincian berdasarkan pihak, jenis, dan mata uang.
 - Rincian jumlah berdasarkan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga.
 - Jumlah amortisasi biaya emisi dan diskonto pada tahun berjalan.
 - Ringkasan perjanjian yang meliputi tanggal kesepakatan, nisbah bagi hasil, dan persyaratan penting.
- 38) Obligasi Konversi
Yang harus diungkapkan antara lain:
- Rincian mengenai jenis, nilai nominal dan nilai tercatat dalam rupiah dan valuta asing, tanggal jatuh tempo, jadwal pembayaran bunga, dan tingkat bunga, serta tempat pencatatan.
 - Periode konversi dan persyaratan konversi, antara lain meliputi rasio konversi, harga pelaksanaan, hak konversi sebelum jatuh tempo serta persyaratannya, dan penalti.
 - Efek dilusi jika seluruh obligasi dikonversikan, dengan memperhatikan tingkat konversi atau harga pelaksanaan (*exercise price*) yang paling menguntungkan dari sudut pandang pemegang obligasi konversi.
 - Jumlah obligasi yang telah dikonversikan.
 - Peringkat (*rating*) dan nama pemeringkat (*rating agency*), jika ada.
 - Jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun yang disajikan sebagai kewajiban lancar.
 - Nama wali amanat dan keterkaitan perusahaan dengan wali amanat tersebut.
 - Jaminan serta pembentukan dana untuk pelunasan hutang pokok obligasi dengan menunjuk akun-akun yang berhubungan.
 - Kejadian penting lainnya termasuk kepatuhan perusahaan dalam memenuhi persyaratan-persyaratan dan kondisi hutang.

- j) Dalam hal perusahaan menerbitkan obligasi konversi tanpa melalui penawaran umum juga harus diungkapkan tujuan penerbitan dan nama pembeli.
- k) Persyaratan lain yang penting, seperti pembatasan pembagian dividen, pembatasan rasio tertentu, dan atau pembatasan perolehan hutang baru.

39) Imbalan Kerja

- a) Yang harus diungkapkan apabila perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti antara lain:
 - (1) Gambaran umum tentang program pensiun, persentase iuran yang menjadi kontribusi perusahaan, manfaat, karyawan yang ikut menjadi peserta program pensiun, pengelolanya dan lain-lain.
 - (2) Jumlah beban (iuran) pensiun dan iuran pensiun yang masih harus dibayar,
 - (3) Hal-hal penting lainnya yang berhubungan dengan program pensiun yang dapat mempengaruhi daya banding laporan keuangan periode berjalan dan periode sebelumnya.
- b) Yang harus diungkapkan apabila perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti antara lain:
 - (1) Gambaran umum tentang program pensiun, imbalan, deskripsi karyawan yang ikut menjadi peserta program pensiun, dan pengelolanya.
 - (2) Kebijakan pendanaan.
 - (3) Rincian beban imbalan pascakerja yang diakui dalam laporan laba rugi, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya bunga, keuntungan (kerugian) aktuarial, hasil yang diharapkan dari aset program, hasil yang diharapkan dari hak penggantian yang diakui sebagai aset, amortisasi biaya jasa lalu dan dampak dari adanya kurtailmen (penyelesaian).
 - (4) Rekonsiliasi nilai kewajiban kini dan nilai wajar aset program.
 - (5) Rekonsiliasi nilai aset dan kewajiban yang diakui dalam neraca selama periode pelaporan.
 - (6) Rincian jumlah aset yang termasuk dalam nilai wajar aset program.
 - (7) Asumsi dan metode aktuarial yang digunakan aktuaris.
 - (8) Bila dilakukan perubahan metode aktuarial, alasan perubahan, jumlah penyesuaian perubahan terhadap laporan keuangan periode berjalan, dan jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan masa sebelum periode penyajian.
 - (9) Tanggal penilaian aktuarial terakhir, nama aktuaris, dan frekuensi penilaian dilakukan
 - (10) Hal-hal penting lain yang berhubungan dengan manfaat pensiun, termasuk dampak dari undang-undang ketenagakerjaan, pembubaran, pengurangan peserta yang dapat mempengaruhi daya banding laporan keuangan.
- c) Yang harus diungkapkan apabila perusahaan memberikan Program Multipemberi Kerja, Program Jaminan Sosial, dan Imbalan yang dijamin antara lain :
 - (1) Fakta bahwa program tersebut adalah program iuran pasti atau imbalan pasti;
 - (2) Melakukan pengungkapan yang seharusnya sesuai ketentuan pada program iuran pasti atau imbalan pasti.

- d) Yang harus diungkapkan apabila perusahaan melakukan pemutusan kontrak kerja (PKK) antara lain:
- (1) Alasan dilakukannya PKK;
 - (2) Tingkat kepastian mengenai jumlah pekerja yang akan menerima tawaran pesangon PKK;
 - (3) Karakteristik dan jumlah beban yang mungkin timbul atas PKK.
 - (4) Tingkat bunga diskonto untuk kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
- 40) Modal Saham
Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Uraian jenis-jenis saham perusahaan.
 - b) Perubahan yang terjadi pada modal saham, yang menjelaskan:
 - (1) Keputusan yang berhubungan dengan perubahan modal saham tersebut, misalnya; pengesahan Menteri Kehakiman, keputusan RUPS.
 - (2) Sumber peningkatan modal saham antara lain dari kapitalisasi agio saham atau saldo laba, modal sumbangan dan tambahan modal disetor lainnya, selisih penilaian kembali aset tetap, penerbitan saham baru dari Penawaran Umum atau Penawaran Umum Terbatas dengan atau tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*right issue* dan *private placement*), pelaksanaan waran, konversi obligasi dan sebagainya.
 - (3) Tujuan perubahan modal saham, antara lain dalam rangka ekspansi atau pelunasan hutang.
 - c) Pihak-pihak yang memiliki saham, yaitu:
 - (1) Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih.
 - (2) Direktur dan Komisaris yang memiliki saham.
 - (3) Pemegang saham lainnya.
 Diungkapkan jumlah saham, persentase kepemilikan, dan jumlah nilai nominal untuk masing-masing pemegang saham tersebut.
 - d) Dalam hal hanya sebagian saham perusahaan yang dicatat di bursa efek, agar disebutkan jumlah saham, untuk saham yang tercatat serta yang tidak dicatatkan pada bursa efek.
- 41) Tambahan Modal Disetor
Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Agio Saham: diuraikan sumber agio saham selama periode yang disajikan.
 - b) Biaya emisi efek ekuitas: dirinci berdasarkan penerbitan efek ekuitas.
 - c) Modal Sumbangan: dirinci jenis aset dan jumlah.
 - d) Selisih Kurs atas Modal Disetor : dijelaskan sifat dan asal akun ini.
 - e) Modal Disetor Lainnya : dijelaskan sifat dan asal akun ini. Untuk waran agar diungkapkan secara terpisah nilai waran yang belum dan yang tidak dilaksanakan.
- 42) Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan
Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Beda nilai tukar bersih yang diklasifikasikan dalam kelompok ekuitas sebagai suatu unsur yang terpisah
 - b) Rekonsiliasi beda nilai tukar tersebut pada awal dan akhir periode.
 - c) Alasan untuk menggunakan mata uang yang berbeda jika mata uang pelaporan berbeda dengan mata uang negara tempat perusahaan berdomisili.
 - d) Alasan untuk setiap perubahan dalam mata uang pelaporan.

- e) Jika terdapat suatu perubahan dalam klasifikasi suatu kegiatan usaha luar negeri yang signifikan, perusahaan harus mengungkapkan:
- (1) sifat perubahan dalam klasifikasi;
 - (2) alasan perubahan;
 - (3) dampak perubahan atas klasifikasi modal pemegang saham; dan
 - (4) dampak pada laba atau kerugian bersih untuk setiap periode sebelumnya jika perubahan klasifikasi terjadi pada periode sebelumnya yang paling awal.
- 43) Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Asosiasi
Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Transaksi yang menimbulkan selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi.
 - b) Jumlah selisih transaksi perubahan ekuitas yang menjadi bagian perusahaan setelah memperhitungkan dampak pajaknya.
 - c) Jumlah yang dircalisasi ke laba rugi atas pelepasan investasi.
- 44) Selisih Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali
Yang harus diungkapkan antara lain :
- a) Jenis, nilai buku dan harga pengalihan aset, kewajiban, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dialihkan.
 - b) Tanggal transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali.
 - c) Nama entitas terkait.
 - d) Metode akuntansi yang digunakan.
- 45) Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap
Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Dasar yang digunakan untuk menilai kembali aset tetap.
 - b) Tanggal efektif penilaian kembali aset tetap.
 - c) Nama penilai independen.
 - d) Hakekat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.
 - e) Jumlah tercatat setiap jenis aset tetap.
 - f) Surplus penilaian kembali aset tetap.
- 46) Saldo Laba
Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Penjatahan (apropriasi) dan pemisahan saldo laba, menjelaskan jenis penjatahan dan pemisahan, tujuan penjatahan dan pemisahan saldo laba, serta jumlahnya. Perubahan akun-akun penjatahan atau pemisahan saldo laba, harus pula diungkapkan.
 - b) Peraturan, perikatan, batasan dan jumlah batasan di sekitar saldo laba, misalnya selama perjanjian kredit berlangsung, perusahaan tidak diizinkan membagi saldo laba tanpa seizin kreditur.
 - c) Rincian distribusi laba bersih tahun sebelumnya, misalnya untuk dividen, tantiem, dana PUKK dan Dana Bina Lingkungan.
 - d) Perubahan saldo laba karena penggabungan usaha dengan metode penyatuan kepentingan (*pooling of interests*).
 - e) Koreksi masa lalu, baik bruto maupun neto setelah pajak, dengan penjelasan bentuk kesalahan laporan keuangan terdahulu, dampak koreksi terhadap laba usaha, laba bersih, dan nila saham per lembar.
 - f) Tunggakan dividen, baik jumlah maupun per lembar saham
 - g) Dividen saham dan pecah-saham (*stock-split*), jumlah yang dikapitalisasi dan saji ulang laba per saham (EPS) agar laporan keuangan berdaya banding.

- h) Perubahan saldo laba pada periode yang bersangkutan dan persetujuan RUPS yang terkait, misalnya jumlah dividen yang dibayarkan, saldo laba yang ditentukan penggunaannya, dan lain-lain.

47) Modal Saham Diperoleh Kembali

Yang harus diungkapkan antara lain:

- a) Tanggal RUPS yang menyetujui perolehan kembali saham.
- b) Jumlah saham yang disetujui untuk diperoleh kembali.
- c) Tanggal, jumlah dan harga realisasi saham diperoleh kembali.
- d) Metode pencatatan saham diperoleh kembali.
- e) Komposisi kepemilikan saham setelah penarikan diungkapkan secara netto.

48) Waran

Yang harus diungkapkan antara lain:

- a) Jenis waran (waran pisah, waran lekat dan waran bebas)
- b) Dasar penentuan nilai wajar waran,
- c) Nilai waran yang belum dilaksanakan dan nilai waran yang tidak dilaksanakan (kadaluarsa),
- d) Jumlah waran yang diterbitkan dan beredar serta dampak dilusinya (*dilution effect*)
- e) Ikatan-ikatan yang terkait dengan penerbitan waran.

49) Kompensasi Berbasis Saham

Yang harus diungkapkan antara lain:

- a) Penjelasan mengenai program kompensasi, termasuk persyaratan umum program kompensasi seperti:
 - (1) Persyaratan pemberian hak kompensasi
 - (2) Periode maksimum opsi
 - (3) Jumlah saham yang ditetapkan untuk opsi atau instrumen ekuitas lainnya
- b) Jumlah dan rata-rata tertimbang harga eksekusi opsi dan instrumen ekuitas selain opsi seperti saham tanpa hak.
- c) Rata-rata tertimbang nilai wajar opsi dan instrumen ekuitas selain opsi pada tanggal pemberian kompensasi yang diberikan dalam suatu periode.
- d) Penjelasan mengenai metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam suatu periode untuk mengestimasi nilai wajar opsi.
- e) Perubahan persyaratan signifikan dari program kompensasi yang sedang berjalan.
- f) Rentang harga eksekusi, rata-rata tertimbang harga eksekusi, dan rata-rata tertimbang sisa periode opsi.
- g) Jumlah beban kompensasi yang diakui untuk program kompensasi berbasis saham untuk periode berjalan.
- h) Dampak dilusi (*dilution effect*) terhadap opsi yang beredar.

50) Pendapatan Usaha

Yang harus diungkapkan antara lain:

- a) Rincian jumlah pendapatan dari kelompok produk/jasa utama
- b) Pendapatan bersih kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga.
- c) Pendapatan yang ditunda (ditangguhkan) pengakuannya.

- 51) Beban Pokok Penjualan
- a. Pengungkapan Beban Pokok Produksi dirinci sebagai berikut:
 - a) Perencanaan;
 - b) Penanaman;
 - c) Pemeliharaan Hutan;
 - d) Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan;
 - e) Pemanenan Hasil Hutan;
 - f) Pemenuhan Kewajiban kepada Negara;
 - g) Pemenuhan Kewajiban kepada Lingkungan dan Sosial;
 - h) Pembangunan Sarana dan Prasarana;
 - i) Penelitian dan Pengembangan; dan
 - j) Administrasi dan Umum
 - b. Ditambah dan dikurangi saldo awal dan akhir
- 52) Beban Usaha
Yang harus diungkapkan antara lain:
Rincian beban dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan pada fungsi beban:
- a) Beban Pemasaran
 - b) Beban Umum dan Administrasi.
- 53) Penghasilan (Beban) Lainnya
Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Jenis dan jumlahnya
 - b) Rincian beban keuangan sebagai berikut:
 - (1) Bunga,
 - (2) Selisih kurs bersih atas penanaman dan pinjaman dalam valuta asing (sepanjang selisih kurs bersih tersebut merupakan penyesuaian terhadap biaya bunga).
 - (3) Keuntungan (kerugian) dari transaksi derivatif.
 - (4) Amortisasi biaya perolehan pinjaman, seperti biaya konsultan, ahli hukum, biaya provisi, *commitment fees* dan sebagainya.
 - (5) Dikurangi beban keuangan yang dikapitalisasi.
 - (6) Jumlah beban keuangan yang dibebankan pada periode berjalan.
 - (7) Ditambah (dikurangi) kerugian (keuntungan) transaksi derivatif yang tidak bertujuan untuk lindung nilai (*hedging*).
 - (8) Jumlah beban keuangan dan rugi transaksi derivatif yang dibebankan pada periode yang sedang berjalan.
 - (9) Jika terjadi devaluasi atau apresiasi, maka disajikan rincian perhitungan keuntungan atau kerugian selisih kurs, demikian juga kebijakan pembebanan yang dilakukan.
 - (10) Pos-pos lain yang sifat, jumlah atau kejadiannya akan menjelaskan transaksi signifikan yang dilakukan perusahaan, misalnya: keuntungan/kerugian dari penjualan aset tetap, keuntungan klaim asuransi dan sebagainya.
 - c) Untuk laba/rugi penjualan surat berharga, yang harus diungkapkan adalah:
Rincian untuk setiap jenis klasifikasi investasi efek hutang dan ekuitas:
 - (1) Kelompok efek yang tersedia untuk dijual:
 - (a) Penerimaan dari penjualan efek
 - (b) Laba atau rugi yang direalisasikan
 - (c) Rugi akibat penurunan permanen nilai efek
 - (2) Kelompok efek yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan yaitu laba atau rugi pemilikan efek yang telah maupun belum direalisasikan.

- (3) Kelompok efek yang dimiliki hingga jatuh tempo:
 - (a) Laba atau rugi penjualan efek.
 - (b) Rugi akibat penurunan permanen nilai efek.

54) Pajak Penghasilan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- a) Rincian berdasarkan jenis pos pajak penghasilan yang mencakup: Hutang pajak dan pajak dibayar dimuka.
- b) Unsur-unsur beban (penghasilan) pajak yang terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan.
- c) Rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dengan tarif yang berlaku dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku.
- d) Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini, dengan cara sebagai berikut :
 - (1) Laba (rugi) sebelum pajak menurut akuntansi
 - (2) Ditambah/dikurangi beda tetap (dirinci)
 - (3) Laba kena pajak (rugi fiskal) menurut akuntansi
 - (4) Ditambah/dikurangi beda temporer (dirinci)
 - (5) Laba Kena Pajak / rugi fiskal (sesuai SPT)
 - (6) Perhitungan beban / hutang pajak kini dengan menerapkan tarif pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku.
- e) Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi telah sesuai dengan SPT.
- f) Untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan setiap kelompok rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut:
 - (1) Rincian aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disajikan pada neraca untuk setiap periode penyajian;
 - (2) Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca.
- g) Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada, perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasi ke periode berikut, serta jumlah yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan.
- h) Jumlah aset pajak tangguhan dan sifat bukti yang mendukung pengakuannya, jika :
 - (1) Penggunaan aset pajak tangguhan tergantung pada apakah laba fiskal yang dapat dihasilkan pada periode mendatang melebihi laba dari realisasi perbedaan temporer kena pajak yang telah ada; dan
 - (2) Perusahaan telah menderita kerugian pada periode berjalan atau periode sebelumnya.
- i) Pernyataan manajemen bahwa aset pajak tangguhan dapat terpulihkan.
- j) Beban pajak yang berasal dari :
 - (1) Keuntungan (kerugian) atas penghentian operasi dan
 - (2) Laba (rugi) dari aktivitas normal operasi yang tidak dilanjutkan untuk periode pelaporan, bersama dengan jumlah periode akuntansi sebelumnya yang disajikan pada laporan keuangan. Rincian rugi fiskal per tahun yang dapat dikompensasikan ke periode berikutnya sesuai SPT atau SKP terakhir.
- k) Beban (penghasilan) pajak yang berasal dari pos-pos luar biasa yang diakui pada periode berjalan.

- l) Penjelasan mengenai tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode sebelumnya (apabila terjadi perubahan tarif pajak sesuai peraturan yang berlaku).
 - m) Jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
 - n) Uraian mengenai Surat Keputusan dan Ketetapan Pajak (SKKP).
 - o) Status mengenai pemeriksaan pajak pada periode pelaporan.
- 55) Pos Luar Biasa
Yang harus diungkapkan adalah jenis dan jumlah dari setiap unsur pos luar biasa, nilai pajak penghasilan yang terkait, dan nilai bersihnya.
- 56) Laba (Rugi) Per Saham
Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Jumlah laba (rugi) yang digunakan sebagai pembilang dalam penghitungan laba (rugi) per saham dasar dan dilusian dan rekonsiliasi angka-angka tersebut ke laba bersih.
 - b) Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang digunakan sebagai penyebut dalam penghitungan laba (rugi) per saham dasar dan dilusian, serta rekonsiliasi antara jumlah penyebut dalam penghitungan laba (rugi) per saham dasar dan dilusian.
- 57) Transaksi Hubungan Istimewa
Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Rincian jumlah dan proporsi (persentase) saldo aset, kewajiban, penjualan atau pendapatan dan beban.
 - b) Apabila jumlah dari setiap jenis transaksi atau saldo untuk masing-masing kategori tersebut dengan pihak tertentu melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau material, maka jumlah tersebut harus disajikan secara terpisah dan nama serta hubungan pihak tersebut wajib diungkapkan.
 - c) Sifat hubungan, jenis, dan unsur transaksi hubungan istimewa.
 - d) Penjelasan transaksi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha utama (non operasi) dan jumlah hutang/piutang sehubungan dengan transaksi tersebut,
 - e) Kebijakan harga (premi) dan syarat transaksi serta pernyataan apakah penerapan kebijakan harga (premi) dan syarat tersebut sama dengan kebijakan harga (premi) dan syarat untuk transaksi dengan pihak ketiga.
- 58) Aset dan Kewajiban dalam Valuta Asing
Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Rincian aset dalam valuta asing dan ekuivalen dalam rupiah.
 - b) Rincian kewajiban dalam valuta asing dan ekuivalen dalam rupiah.
 - c) Posisi neto dari butir a) dan b).
 - d) Rincian kontrak valuta asing berjangka dan ekuivalen dalam rupiah.
 - e) Kebijakan manajemen risiko mata uang asing.
 - f) Alasan untuk tidak melakukan lindung nilai.
- 59) Perikatan dan Kontinjensi
- a) Perikatan
Yang harus diungkapkan antara lain:
 - (1) Jenis dan sifat perikatan yang meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - (a) Perjanjian sewa, keagenan dan distribusi, bantuan manajemen, teknis, royalti dan lisensi:
 - i. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian.

- ii. Periode berlakunya perikatan,
 - iii. Dasar penentuan kompensasi dan denda.
 - iv. Jumlah beban atau pendapatan pada periode pelaporan.
 - v. Pembatasan-pembatasan lainnya.
- (b) Kontrak/perjanjian yang memerlukan penggunaan dana di masa yang akan datang, seperti pembangunan peralatan perkebunan, perjanjian pembelian, ikatan untuk investasi, dsb:
- i. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian,
 - ii. Periode berlakunya perikatan,
 - iii. Nilai keseluruhan, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi,
 - iv. Sanksi-sanksi
- (c) Pendapat manajemen mengenai kelangsungan perikatan
- (2) Pemberian jaminan/garansi,
- (a) Pihak-pihak yang dijamin dan yang menerima jaminan, yang dipisahkan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga untuk pihak yang dijamin,
 - (b) Latar belakang dikeluarkannya jaminan,
 - (c) Periode berlakunya jaminan,
 - (d) Nilai jaminan.
- (3) Fasilitas kredit yang belum digunakan, contoh fasilitas L/C, *Bank Overdraft*.
- (4) Lain-lainnya
Uraian mengenai sifat, jenis, jumlah dan batasan-batasannya.
- b) Kontinjensi
Yang harus diungkapkan untuk kerugian kontinjensi yang tidak diakui melalui suatu pembebanan dan keuntungan kontinjensi adalah:
- (1) Jenis dan sifat kontinjensi.
 - (2) Estimasi mengenai dampak keuangan atau pernyataan bahwa estimasi semacam itu tidak dapat dibuat.
 - (3) Faktor ketidakpastian yang dapat mempengaruhi hasil akhir di masa depan, misal: tuntutan atau gugatan hukum yang masih dalam proses.
 - (4) Perkara / sengketa hukum :
 - (a) Pihak-pihak yang terkait
 - (b) Jumlah yang diperkarakan (berdasarkan pendapat pihak yang kompeten)
 - (c) Latar belakang, isi dan status perkara, serta pendapat hukum (*legal opinion*)
 - (5) Peraturan pemerintah yang mengikat perusahaan seperti: masalah lingkungan hidup. Diungkapkan uraian singkat tentang peraturan dan dampaknya terhadap perusahaan.
 - (6) Kemungkinan kewajiban pajak tambahan,
 - (a) Jenis ketetapan/tagihan pajak, jenis pajak, tahun pajak serta jumlah pokok dan denda/bunganya,
 - (b) Sikap perusahaan terhadap ketetapan/tagihan pajak (keberatan, banding dan sebagainya.)
- 60) Restrukturisasi Hutang Bermasalah
Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Penjelasan tentang pokok-pokok perubahan persyaratan dan penyelesaian hutang.

- b) Jumlah keuntungan atas restrukturisasi hutang dan dampak pajak penghasilan yang terkait.
- c) Jumlah keuntungan atau kerugian bersih atas pengalihan asset yang diakui selama periode tersebut.
- d) Jumlah hutang kontinjen yang dimasukkan dalam nilai tercatat hutang yang telah direstrukturisasi.

61) Informasi Segmen Usaha

Yang harus diungkapkan antara lain:

- a) Gambaran aktivitas masing-masing segmen usaha dan wilayah geografis yang dilaporkan. Untuk menentukan apakah suatu segmen harus dilaporkan tersendiri, digunakan kriteria materialitas 10% dari pendapatan, laba usaha, atau aset. Selain itu juga digunakan kriteria 75% dari pendapatan segmen untuk pengujian apakah diperlukan penambahan pengungkapan bagi segmen yang sebelumnya tidak memenuhi kriteria materialitas 10% di atas.
- b) Untuk perusahaan pemanfaatan hasil hutan wajib melaporkan segmen berdasarkan jenis izin yang diperoleh, yang meliputi:
 - (1) Pendapatan segmen.
 - (2) Beban segmen:
 - (a) Beban segmen langsung dirinci berdasarkan harga pokok produksi
 - (b) Beban segmen tidak langsung
 - (3) Hasil segmen.
 - (4) Jumlah keseluruhan nilai tercatat aset segmen.
- c) Untuk setiap segmen usaha atau geografis yang dilaporkan dalam bentuk primer, meliputi:
 - (1) Pendapatan segmen.
 - (2) Beban segmen
 - (3) Hasil segmen.
 - (4) Jumlah keseluruhan nilai tercatat aset segmen.
 - (5) Jumlah keseluruhan kewajiban segmen.
 - (6) Jumlah biaya keseluruhan untuk memperoleh aset segmen yang dapat digunakan selama lebih dari 1 (satu) periode.
 - (7) Jumlah keseluruhan beban depresiasi dan amortisasi aset segmen.
 - (8) Karakteristik dan jumlah unsur pendapatan serta ukuran, karakteristik, dan kejadian beban segmen yang relevan.
 - (9) Jumlah keseluruhan beban non kas yang signifikan.
 - (10) Arus kas segmen.
 - (11) Jumlah bagian laba (rugi) bersih pada perusahaan asosiasi atau investasi lain yang dilaporkan berdasarkan metode ekuitas.
 - (12) Jumlah agregat investasi pada perusahaan asosiasi dan patungan.
- d) Untuk setiap yang dilaporkan dalam bentuk sekunder, yang meliputi:
 - (1) Bila bentuk primer adalah segmen usaha, maka yang diungkapkan :
 - (a) Pendapatan segmen dari pemegang polis eksternal menurut wilayah geografis pemegang polis.
 - (b) Jumlah nilai tercatat aset segmen menurut lokasi geografis aset.

- (c) Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset berwujud dan tidak berwujud yang masa penggunaannya lebih dari 1 (satu) periode menurut lokasi geografis aset.
- (2) Bila bentuk primer adalah segmen geografis yang diungkapkan adalah
 - (a) Pendapatan segmen dari pemegang polis.
 - (b) Jumlah nilai tercatat aset segmen usaha.
 - (c) Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset berwujud dan tak berwujud yang masa penggunaannya lebih dari 1 periode.
- (3) Bila bentuk primer adalah segmen geografis berdasarkan lokasi aset yang berbeda dengan lokasi pemegang polis, yang harus diungkapkan adalah pendapatan kepada pemegang polis untuk setiap segmen geografis berdasarkan lokasi pemegang polis.
- (4) Bila bentuk primer adalah segmen geografis berdasarkan lokasi pemegang polis yang berbeda dengan lokasi aset, yang harus diungkapkan adalah :
 - (a) Jumlah nilai tercatat aset segmen.
 - (b) Jumlah biaya yang dikeluarkan selama 1 (satu) periode untuk memperoleh aset segmen berupa aset berwujud dan tidak berwujud dengan masa penggunaan lebih dari 1 (satu) periode.
- e) Perubahan dalam penentuan segmen dan perubahan dalam kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan informasi segmen, yaitu:
 - (1) Penjelasan karakteristik perubahan.
 - (2) Alasan perubahan.
 - (3) Fakta bahwa informasi komparatif telah disajikan kembali atau tidak praktis dilakukan.
 - (4) Dampak keuangan perubahan tersebut.
- f) Apabila terjadi penghentian atau penjualan suatu segmen usaha, harus diungkapkan :
 - (1) Penjelasan mengenai operasi dalam penghentian.
 - (2) Segmen usaha atau geografis yang di dalamnya operasi dalam penghentian dilaporkan.
 - (3) Tanggal dan karakteristik peristiwa pengungkapan awal.
 - (4) Tanggal dan periode saat penghentian tersebut diperkirakan akan selesai, apabila tanggal atau periode tersebut diketahui atau dapat ditentukan.
 - (5) Nilai tercatat dari jumlah aset dan kewajiban yang akan dilepas.
 - (6) Jumlah pendapatan, beban, dan laba (rugi) sebelum pajak dari aktivitas normal serta beban pajak penghasilan yang dapat dikaitkan dengan operasi dalam penghentian.
 - (7) Jumlah arus kas neto yang dapat dikaitkan dengan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dari operasi dalam penghentian.
 - (8) Bila suatu perusahaan menjual aset atau menyelesaikan kewajiban yang dapat dikaitkan dengan operasi dalam penghentian atau melakukan perjanjian yang mengikat untuk menjual aset atau menyelesaikan kewajiban tersebut, maka perusahaan tersebut harus mencantumkan informasi berikut dalam laporan keuangannya pada saat peristiwa tersebut terjadi:

- (a) Untuk setiap keuntungan atau kerugian yang diakui bagi pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban yang dapat dikaitkan dengan operasi dalam penghentian:
 - (i) Jumlah keuntungan atau kerugian sebelum pajak; dan
 - (ii) Beban pajak penghasilan yang terkait dengan keuntungan atau kerugian tersebut.
 - (b) Harga jual neto atau rentang harga jual neto (setelah dikurangi dengan biaya pelepasan yang diperkirakan) dari aset neto yang telah dimasukkan oleh perusahaan ke dalam satu atau lebih perjanjian penjualan yang mengikat, perkiraan saat penerimaan arus kas, dan nilai tercatat aset neto tersebut.
- (9) Gambaran mengenai setiap perubahan signifikan pada jumlah dan saat arus kas yang terkait dengan aset yang dilepas atau kewajiban yang diselesaikan dan peristiwa – peristiwa yang menyebabkan timbulnya perubahan tersebut. Pengungkapan mengenai perubahan tersebut dilakukan dalam laporan keuangan untuk periode – periode setelah periode saat peristiwa pengungkapan awal terjadi.
- (10) Dampak apabila perusahaan membatalkan atau menarik diri dari suatu rencana yang sebelumnya telah dilaporkan sebagai operasi dalam penghentian.

62) Kuasi-Reorganisasi

Yang harus diungkapkan adalah uraian mengenai kegiatan kuasi-reorganisasi yang meliputi:

- a) Jumlah saldo negatif yang dieliminasi dalam neraca dan jumlah tersebut disajikan selama tiga tahun berurutan sejak kuasi-reorganisasi
- b) Status going concern perusahaan dan rencana manajemen dan pemegang saham setelah kuasi-reorganisasi yang menggambarkan prospek usaha di masa mendatang
- c) Penyajian neraca sebelum, pada saat dan sesudah kuasi-reorganisasi
- d) Rincian dari jumlah yang membentuk akun selisih penilaian aset dan kewajiban sebelum digunakan untuk mengeliminasi defisit; dan
- e) Keterangan tentang tanggal terjadinya kuasi-reorganisasi pada akun saldo laba dalam neraca untuk jangka waktu 10 tahun ke depan sejak kuasi-reorganisasi.

63) Instrumen Derivatif

Bagi entitas yang memiliki atau menerbitkan instrumen derivatif, yang harus diungkapkan antara lain:

- a) Untuk tiap kontrak instrumen derivatif dengan tujuan lindung nilai diungkapkan :
 - (1) Hakikat dan sifat dari transaksi, berupa transaksi berjangka dalam bentuk valuta, bunga, komoditas atau lain-lain.
 - (2) Pihak lawan transaksi (*counterparties*).
 - (3) Tanggal jatuh tempo.
 - (4) Nilai keseluruhan kontrak dan nilai wajar pada tanggal neraca.
 - (5) Beban atau pendapatan pada periode pelaporan.
 - (6) Pos aset dan atau pasiva yang dilindung nilai.
 - (7) Persyaratan penting lainnya.
- b) Hal-hal yang diperlukan untuk memahami tujuan perusahaan melakukan transaksi derivatif dan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut.

- c) Kebijakan manajemen risiko untuk setiap klasifikasi lindung nilai, termasuk penjelasan mengenai aset/kewajiban dan jenis transaksi yang dilindungi.
- 64) Perubahan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar
Apabila perusahaan melakukan penyajian kembali laporan keuangan akibat hal-hal berikut, yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Perubahan Estimasi Akuntansi
Yang harus diungkapkan adalah:
- (1) Hakikat dan alasan perubahan estimasi akuntansi.
 - (2) Jumlah perubahan estimasi yang mempengaruhi periode berjalan.
 - (3) Pengaruh estimasi terhadap periode mendatang. Jika penghitungan pengaruh terhadap periode mendatang tidak praktis kenyataan tersebut harus diungkapkan.
- b) Perubahan Kebijakan Akuntansi
Yang harus diungkapkan antara lain:
- (1) Hakikat, alasan, dan tujuan perubahan kebijakan akuntansi.
 - (2) Jumlah penyesuaian perubahan kebijakan akuntansi terhadap periode berjalan dan periode sebelumnya yang disajikan kembali.
 - (3) Jumlah penyesuaian yang berhubungan dengan masa sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif, dan
 - (4) Kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa untuk menyajikan kembali informasi komparatif dianggap tidak praktis.
- c) Koreksi Kesalahan Mendasar
Yang harus diungkapkan antara lain:
- (1) Hakikat kesalahan mendasar.
 - (2) Jumlah koreksi untuk setiap periode.
 - (3) Jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode-periode sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif; dan
 - (4) Kenyataan bahwa informasi komparatif telah dinyatakan kembali atau kenyataan bahwa informasi komparatif tidak praktis untuk dinyatakan kembali. Kondisi tidak praktis dimaksud antara lain melakukan jurnal ulang transaksi demi transaksi satu persatu dari awal tahun hingga akhir tahun.
- 65) Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Lainnya
Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Penjelasan mengenai standar akuntansi keuangan dan peraturan baru yang akan diterapkan dan mempengaruhi aktivitas perusahaan.
 - b) Estimasi dampak penerapan standar akuntansi keuangan dan peraturan baru tersebut.
- 66) Peristiwa setelah Tanggal Neraca
Yang harus diungkapkan antara lain:
- a) Uraian peristiwa misalnya tanggal terjadinya, sifat peristiwa, jumlah moneter yang mempengaruhi akun-akun laporan keuangan, dan estimasi dampak keuangan atau pernyataan bahwa estimasi semacam itu tidak dapat dibuat.

Contoh peristiwa setelah tanggal neraca yang tidak memerlukan penyesuaian namun penting antara lain mencakup:

- (1) Penggabungan usaha yang signifikan setelah tanggal neraca atau pelepasan anak perusahaan utama;
- (2) Pengumuman untuk menghentikan suatu operasi, pelepasan aset, atau penyelesaian kewajiban terkait penghentian operasi atau melakukan pengikatan penjualan aset atau penyelesaian kewajiban tersebut;
- (3) Pembelian dan pelepasan aset dalam jumlah signifikan, atau pengambilalihan aset oleh pemerintah;
- (4) Kerusakan fasilitas produksi utama akibat kebakaran setelah tanggal neraca;
- (5) Pengumuman, atau dimulainya pelaksanaan suatu restrukturisasi material;
- (6) Transaksi saham biasa dalam jumlah signifikan dan transaksi efek berpotensi saham biasa setelah tanggal neraca;
- (7) Perubahan abnormal atas harga aset atau nilai tukar mata uang asing setelah tanggal neraca;
- (8) Perubahan tarif pajak atau peraturan perpajakan yang diberlakukan atau diumumkan setelah tanggal neraca dan memiliki pengaruh yang signifikan pada aset dan kewajiban pajak kini dan tanggungan;
- (9) Menjadi pihak yang memberikan komitmen atau memiliki kewajiban kontijensi yang signifikan; dan
- (10) Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang semata-mata timbul karena peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca.

Sementara berikut ini adalah beberapa contoh peristiwa setelah tanggal neraca yang mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangannya, atau untuk mengakui peristiwa yang sebelumnya tidak diakui:

- (1) Keputusan pengadilan setelah tanggal neraca, yang menyatakan perusahaan memiliki kewajiban kini pada tanggal neraca;
 - (2) Informasi setelah tanggal neraca mengindikasikan adanya penurunan nilai suatu aset pada tanggal neraca, atau perlunya penyesuaian jumlah yang sebelumnya telah diakui sebagai kerugian penurunan nilai aset;
 - (3) Penentuan nilai aset setelah tanggal neraca atas biaya perolehan aset yang dibeli, atau atas hasil penjualan aset yang dijual sebelum tanggal neraca;
 - (4) Penentuan jumlah pembagian laba atau pembayaran bonus setelah tanggal neraca, jika perusahaan memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif pada tanggal neraca untuk melakukan pembayaran akibat dari peristiwa setelah tanggal neraca;
 - (5) Bencana yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan seperti kerugian karena kebakaran, banjir, dan sebagainya; dan
 - (6) Penemuan kecurangan atau kesalahan yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak benar.
- b) Estimasi mengenai dampak keuangan atau pernyataan bahwa estimasi semacam itu tidak dapat dibuat.

c) Dalam hal terjadi peristiwa yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan secara keseluruhan, misalnya merger dan akuisisi, pelepasan segmen usaha atau divestasi anak perusahaan maka harus disajikan informasi keuangan pro-forma seakan-akan transaksi tersebut terjadi pada tanggal neraca terakhir atau pada awal periode laporan keuangan terakhir yang disajikan.

67) Informasi Penting Lainnya

Yang harus diungkapkan adalah sifat, jenis, jumlah dan dampak dari peristiwa atau keadaan yang mempengaruhi kinerja atau kelangsungan hidup perusahaan.

68) Reklasifikasi

Yang harus diungkapkan adalah sifat, jumlah dan alasan reklasifikasi untuk setiap pos dalam tahun buku sebelum tahun buku terakhir yang disajikan dalam laporan keuangan komparatif.

3. Lampiran atas Laporan Keuangan.

Bagian ini merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan yang bersifat melengkapi dan disajikan terpisah dari catatan atas laporan keuangan, yaitu mengenai realisasi kewajiban pembinaan hutan.

Hal-hal yang harus diungkapkan adalah realisasi pembinaan hutan berdasarkan fisik dan rupiah untuk setiap kegiatan yang meliputi saldo awal, realisasi periode berjalan dan saldo akhir.

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN.
 NOMOR :
 TENTANG :
 PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI (DOLAPKEU PHP).

Tabel 1.A KEGIATAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI IUPHHK - HA

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	KELOMPOK DALAM LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN KEUANGAN	KETERANGAN
PERENCANAAN	Usaha Perolehan IUPHHK - HA	Aset Tidak Berwujud	Neraca	
	Pembayaran Iuran IUPHHK-HA	Aset Tidak Berwujud	Neraca	
	AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan)	Aset Tidak Berwujud	Neraca	
	Tata Batas Areal dan Pemetaan	Aset lain-lain (Beban tanggungan)	Neraca	
	Citra Satelit	Aset lain-lain (Beban tanggungan)	Neraca	
	Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala	Aset lain-lain (Beban tanggungan)	Neraca	
	Penyusunan RKUPHHK -HA	Aset lain-lain (Beban tanggungan)	Neraca	
	Penyusunan RKTU/PHHK -HA	HPP	Laba Rugi	
	Penataan Areal Kerja (PAK)	HPP	Laba Rugi	
	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)/Risalah Hutan	HPP	Laba Rugi	
	Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)	HPP	Laba Rugi	
	Sertifikasi PHPL (Voluntary)	Aset lain-lain (Beban tanggungan)	Neraca	
	Penilaian (<i>surveillance</i>)	HPP	Laba Rugi	

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA	Pembangunan Jembatan dan/atau Jalan Induk	Aset Tetap (Hak kelola)	Neraca	Masing-masing akun jalan dan jembatan dicatat terpisah
	Pembangunan Jembatan dan/atau Jalan Cabang	Aset Tetap (Hak kelola)	Neraca	Masing-masing akun jalan dan jembatan dicatat terpisah
	Pembangunan Jembatan dan/atau Jalan	HPP	Laba Rugi	
	Pembangunan Jalan Rel	Aset Tetap (Hak kelola)	Neraca	
	Pembangunan <i>Base Camp</i>	Aset Tetap (Hak kelola)	Neraca	
	Pembangunan TPn/TPK/Log Pond/Log Yard/Dermaga	Aset Tetap (Hak kelola)	Neraca	
	Penebangan Kayu	HPP	Laba Rugi	
PEMANENAN HASIL HUTAN	Penyaradan	HPP	Laba Rugi	
	Kupas Kulit, Paku S, Penandaan	HPP	Laba Rugi	
	Pemuatan/Perakitan	HPP	Laba Rugi	
	Pengangkutan	HPP	Laba Rugi	
	Pembongkaran	HPP	Laba Rugi	
	Persiapan Lapangan	HPP dan/atau Kewajiban	Laba Rugi dan/ atau	
	Perapihan	HPP dan/atau Kewajiban	Laba Rugi dan/ atau	
PEMBINAAN HUTAN	Inventarisasi Tegakan Tinggal (ITT)	HPP dan/atau Kewajiban Lancar	Laba Rugi dan/ atau Neraca	
	Pembebasan	HPP dan/atau Kewajiban Lancar	Laba Rugi dan/ atau Neraca	
	Persemaian dan/atau Pembibitan	HPP dan/atau Kewajiban Lancar	Laba Rugi dan/ atau Neraca	
	Penanaman/Pengayaan Jenis Hutan Alam	HPP dan/atau Kewajiban Lancar	Neraca Laba Rugi dan/ atau Neraca	
	Penanaman Tanah Kosong eks TPn /TPK/ Jln.sarad	HPP dan/atau Kewajiban Lancar	Laba Rugi dan/ atau Neraca	

	Penanaman Kiri Kanan Jalan / kanan kiri sungai.	HPP dan/atau Kewajiban Lancar.	Laba Rugi dan/ atau Neraca	
	Pemeliharaan Tanaman	HPP dan/atau Kewajiban Lancar	Laba Rugi dan/ atau Neraca	
	Penjarangan Tegakan Tinggi	HPP dan/atau Kewajiban Lancar	Laba Rugi dan/ atau Neraca	(bagi yang terdapat di arealnya)
	Plasma Nutifah	HPP	Laba Rugi	
	Pemberantasan Hama dan Penyakit	HPP	Laba Rugi	
	Kebun Benih	HPP	Laba Rugi	
PENGENDALIAN KEBAKARAN DAN PENGAMANAN HUTAN	Pembangunan Menara Api	Aset Tetap (Hak kelola)	Neraca	
	Pengadaan Sarana Prasarana Kebakaran	Aset Tetap (Hak kelola)	Neraca	
	Pembangunan Pos Jaga	Aset Tetap (Hak kelola)	Neraca	
	Pembuatan Ilaran Api	HPP	Laba Rugi	
	Pengerahan Tenaga	HPP	Laba Rugi	
	Penggunaan Bahan dan Perlengkapan	HPP	Laba Rugi	
	Penyuluhan/Patroli	HPP	Laba Rugi	
	Rencana Kelola Lingkungan	Aset lain-lain (Beban tanggungan)	Neraca	
	Rencana Pemantauan lingkungan	Aset lain-lain (Beban tanggungan)	Neraca	
	Pelaksanaan Kelola Lingkungan	HPP	Laba Rugi	
PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPADA LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Pelaksanaan Kelola Sosial / CSR/PMDH	HPP	Laba Rugi	
	Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan	HPP	Laba Rugi	
	Penyajian Evaluasi Lingkungan	HPP	Laba Rugi	
	Sertifikasi PHPL dan/atau LK (Mandatory kedua dst)	Aset lain-lain (Beban tanggungan)	Neraca	LK: Legalitas Kayu
	Dana Reboisasi (DR)	HPP dan/atau Kewajiban	Laba Rugi dan/atau	
	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	HPP dan/atau Kewajiban	Laba Rugi dan/atau	
	PBB areal	HPP dan/atau Kewajiban	Laba Rugi dan/atau	
	Retribusi/Pungutan Daerah	HPP dan/atau Kewajiban	Neraca	

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG)	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan,	HPP	Laba Rugi	
ADMINISTRASI UMUM	Berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan	HPP (beban produksi	Laba Rugi	Untuk kegiatan di <i>base</i>
	Tidak berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan hutan alam	HPP (beban produksi tidak langsung)	Laba Rugi	Untuk kegiatan di <i>base camp</i>

Tabel 1.B KEGIATAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI IUPHHK-HT (HT DALAM PENGEMBANGAN)

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	KELOMPOK DALAM LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN KEUANGAN	KETERANGAN	
PERENCANAAN	Usaha Perolehan IUPHHK-HT(Penyusunan Proposal Teknis)	Aset Tidak Berwujud	Neraca		
	Pembayaran Iuran IUPHHK-HT	Aset Tidak Berwujud			
	AMDAL/RKL,RPL	Aset Tidak Berwujud	Neraca		
	Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)	Aset Lain-lain (Beban tanggungan)	Neraca		
	Penyusunan RKUPHHK - HT	Aset Lain-lain (Beban tanggungan)	Neraca		
	Tata Batas Areal dan Pemetaan	Aset Lain-lain (Beban tanggungan)			
	Penataan Areal Kerja (PAK)	HT dalam pengembangan	Neraca		
	Penyusunan RKTUHHK - HT	HT dalam pengembangan	Neraca		
	Sertifikasi PHPL (<i>voluntary</i>)	Aset Lain-lain (Beban tanggungan)	Neraca		
	Penilikan (<i>Surveillance</i>)	HT dalam pengembangan	Neraca		
	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA	Pembangunan Jembatan dan/ atau Kanal dan/ atau Jalan Induk	Aset Tetap (Hak kelola)	Neraca	Beban Penyusutan Aset Tetap dikapitalisasi dalam HT Dalam Pengembangan
		Pembangunan Jembatan dan /atau Kanal dan/ atau Jalan Cabang	Aset Tetap (Hak kelola)	Neraca	Masing-masing akun jalan, jembatan dan kanal dicatat terpisah
		Pembangunan Jembatan dan /atau Kanal dan/ atau Jalan Ranting	Aset Tetap (Hak kelola)	Neraca	
Pembuatan Pintu Air		Aset Tetap (Hak kelola)	Neraca		
Pembangunan Jalan Rel		Aset Tetap (Hak kelola)	Neraca		
Pembuatan <i>Base Camp</i>		Aset Tetap (Hak kelola)	Neraca		

Tabel 1.B KEGIATAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI IUPHHK-HT (HT DALAM PENGEMBANGAN)

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	KELOMPOK DALAM LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN KEUANGAN	KETERANGAN	
PENANAMAN	Penyiapan Lahan	HT Pengembangan	Neraca		
	Persemaian dan/atau Pembibitan	Persediaan bibit	Neraca		
	Seleksi dan Pemindahan Bibit	HT Pengembangan	Neraca		
	Penanaman Tanaman Pokok	HT Pengembangan	Neraca		
	Penanaman di Kawasan Lindung	HT Pengembangan	Neraca	Kawasan Setempat	
	Penanaman Tananaman Unggulan	HT Pengembangan	Neraca		
	Penanaman Tananaman Kehidupan	HT Pengembangan	Neraca		
PEMELIHARAAN TANAMAN	Penyulaman	HT dalam Pengembangan	Neraca		
	Pemangkasan	HT dalam Pengembangan	Neraca		
	Penjarangan	HT dalam Pengembangan	Neraca	Jika kayu hasil penjarangan terjual maka mengurangi/ menambah nilai HT dalam Pengembangan	
	Pendangiran	HT dalam Pengembangan	Neraca		
	Pemupukan	HT dalam Pengembangan	Neraca		
	Pemberantasan Hama dan Penyakit	HT dalam Pengembangan	Neraca		

Tabel 1.B KEGIATAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI IUPHHK-HT (HT DALAM PENGEMBANGAN)

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	KELOMPOK DALAM LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN KEUANGAN	KETERANGAN	
PENGENDALIAN KEBAKARAN DAN PENGAMANAN HUTAN	Pembangunan Menara Api	Aset Tetap (Hak kelola)	Neraca	Beban Penyusutan Aset Tetap dikapitalisasi dalam HT Dalam Pengembangan	
	Pengadaan Sarana Prasarana Kebakaran	Aset Tetap (Hak kelola)	Neraca		
	Pembangunan Pos Jaga	Aset Tetap (Hak kelola)	Neraca		
	Pembuatan Ilaran Api	HT dalam Pengembangan	Neraca		
	Pengolahan Tenaga	HT dalam Pengembangan	Neraca		
	Penggunaan Bahan dan Perlengkapan	HT dalam Pengembangan	Neraca		
	Penyuluhan/Patroli	HT dalam Pengembangan	Neraca		
	Premi Asuransi Kebakaran	Aset Lancar (Biaya dibayar dimuka)	Neraca	Bagian premi asuransi yang sudah jatuh tempo dikapitalisasi dalam HT Dalam Pengembangan.	
PEMEMUHAN KEWAJIBAN KEPADA LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Rencana Pemantauan Lingkungan	Aset lain-lain (Beban tanggungan)	Neraca		
	Rencana Kelola Lingkungan	Aset lain-lain (Beban tanggungan)	Neraca		
	Pelaksanaan Kelola Lingkungan	HT dalam Pengembangan	Neraca		
	Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan	HT dalam Pengembangan	Neraca		
	Penyajian Evaluasi Lingkungan	Aset lain-lain (Beban tanggungan)	Neraca		
	Pelaksanaan Kelola Sosial/ CSR/ PMDH	HT dalam Pengembangan	Neraca		
	Sertifikasi PHPL dan/atau LK (Mandatory kedua dst.)	Aset lain-lain (Beban tanggungan)	Neraca		

Tabel 1.B KEGIATAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI IUPHHK-HT (HT DALAM PENGEMBANGAN)

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	KELOMPOK DALAM LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN KEUANGAN	KETERANGAN
PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPADA NEGARA	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Beban lain-lain dan/atau Kewajiban Lancar	Laporan Laba – Rugi dan/ atau Neraca	Nilai bersih atas penjualan kayu hasil penyiapan lahan menambah / mengurangi HT dalam Pengembangan
	Dana Reboisasi	Beban Lain-lain dan/ atau Kewajiban Lancar	Laporan Laba – Rugi dan/atau Neraca	Nilai bersih atas penjualan kayu hasil penyiapan lahan menambah / mengurangi HT dalam Pengembangan
	Retribusi/Pungutan Daerah	HT Dalam Pengembangan dan /atau Kewajiban	Neraca	
ADMINISTRASI DAN UMUM	Berkaitan dengan kegiatan pembangunan hutan tanaman	HT dalam Pengembangan	Neraca	Untuk kegiatan di base camp
	Tidak berkaitan dengan kegiatan pembangunan hutan tanaman	Beban Admistrasi dan Umum	Laba Rugi	Untuk kegiatan di <i>base camp</i>
PENELITIAN PENGEMBANGAN	Penelitian	Beban Umum	Laba Rugi	
	Pengembangan	HT Dalam Pengembangan	Neraca	Pembebanan biaya pengembangan lebih disarankan oleh PSAK

Tabel 1.C KEGIATAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI IUPHHK-HT (HT SIAP PANEN)

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	KELOMPOK DALAM LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN KEUANGAN	KETERANGAN
PERENCANAAN	Citra satelit	Aset Lain-Lain (Beban tanggungan)	Neraca	Amortisasi dibebankan pada biaya produksi
	Penyusunan RKTUPHHK-HT /RTT untuk Perhutani	HPP	Laba Rugi	
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA	Pembangunan Jembatan dan/ atau Kanal dan atau/ Jalan Induk	Aset Tetap (Hak kelola)	Neraca	Penyusutan dialokasikan secara proporsional antara penggunaan kegiatan panen dan kegiatan pembuatan tanaman
	Pembangunan Jembatan dan/ atau Kanal dan/ atau Jalan Cabang	Aset Tetap (Hak kelola)	Neraca	Masing-masing akun jalan, jembatan dan kanal dicatat terpisah
	Pembangunan Jembatan dan/ atau Kanal dan/ atau Jalan Ranting	HPP	Laba Rugi	
	Pembuatan Pintu Air	Aset Tetap (Hak kelola)	Neraca	
	Pembangunan Jalan Rel	Aset Tetap (Hak kelola)	Neraca	
	Penebangan Kayu		Laba Rugi	
PEMANENAN HASIL HUTAN	Pemuatan	HPP	Laba Rugi	
	Pengangkutan ke TPN	HPP	Laba Rugi	
	Pengangkutan ke TPK (<i>logpond/yard</i>)	HPP	Laba Rugi	
	Pembongkaran	HPP	Laba Rugi	
			Laba Rugi	

Tabel 1.C KEGIATAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI IUPHHK-HT (HT SIAP PANEN)

NAMA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	KELOMPOK DALAM LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN KEUANGAN	KETERANGAN
PEMEMUHAN KEWAJIBAN KEPADA LINGKUNGAN DAN SOSIAL	Pelaksanaan Kelola social/CSR/PMDH	HPP	Laba Rugi	
	Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan	HPP	Laba Rugi	
	Pelaksanaan Kelola Lingkungan	HPP	Laba Rugi	
PEMEMUHAN KEWAJIBAN KEPADA NEGARA	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	HPP dan \ atau Kewajiban Lancar	Laba Rugi dan/atau Neraca	
	Retribusi/Pungutan Daerah	HPP dan \ atau Kewajiban Lancar	Laba Rugi dan/atau Neraca	
	Penelitian Pengembangan	Beban Umum HT Dalam Pengembangan	Laba Rugi Neraca	Pembebanan biaya pengembangan lebih disarankan oleh PSAK
ADMINISTRASI DAN UMUM	Berkaitan dengan kegiatan pemanenan hutan	HPP	Laba Rugi	
	Tidak berkaitan dengan kegiatan pemanenan hutan	Beban Administrasi & Umum	Laba Rugi	

Tabel 1.D KEGIATAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI IUPHHK-RE (SEBELUM KESEIMBANGAN EKOSISTEM/FASE 1)

No.	NAMA KEGIATAN	RINCIAN	Keterangan	HUTAN RESTORASI EKOSISTEM (SEBELUM KESEIMBANGAN)	
				KELOMPOK DALAM LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN KEUANGAN
1.	Perencanaan	1. Usaha Perolehan IUPHHK-RE 2. Pembayaran Iuran IUPHHK 3. Tata Batas Areal & Pemetaan 4. Citra Satelit 5. IHMB / Risalah 6. Penyusunan RKUPHHK 7. Penyusunan RKTUPHHK	Pengeluaran ini untuk memperoleh hak yang memenuhi karakteristik aset tak berwujud Pengeluaran ini untuk memperoleh hak yang memenuhi karakteristik aset tak berwujud Pengeluaran ini memberikan manfaat selama masa konsesi. Pengeluaran ini memberikan manfaat selama masa konsesi. Termasuk inventarisasi potensi hutan dan kawasan. Pengeluaran ini memberikan manfaat selama masa konsesi. Pengeluaran ini memberikan manfaat selama masa konsesi, namun dilakukan setiap 10 tahun.. Pengeluaran ini dilakukan setiap tahun, sehingga manfaatnya hanya untuk tahun tersebut. Jika pada fase 1 sudah diperoleh manfaat dari hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan, dan jasa lingkungan, maka pengeluaran ini diakui sebagai HPP (beban langsung), dan jika sebaliknya, diakui sebagai beban operasi.	Aset Takberwujud Aset Takberwujud Aset lain-lain (beban tangguhan) Aset lain-lain (beban tangguhan) Aset lain-lain (beban tangguhan) Aset lain-lain (beban tangguhan) Aset lain-lain (beban tangguhan)	Neraca Neraca Neraca Neraca Neraca Neraca Neraca
		8. Penyusunan UKL/UPL 9. Penataan Areal Kerja (PAK) 10. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) 11. Sertifikasi (PHPL, dll) 12. Pemilikan (surveillance)	Masa berlaku UKL/UPL mengikuti masa konsesi. Kegiatan ini hanya dilakukan 1 kali di awal untuk setiap blok/pctak kerja. Kegiatan ini hanya dilakukan 1 kali di awal (pada tahap perencanaan). Aktivitas PWH yang dilakukan setelah tahap perencanaan, diklasifikasikan sebagai Pembangunan Sarana dan Prasarana. Pengeluaran ini memberikan manfaat lebih dari satu tahun. Pengeluaran ini dilakukan setiap tahun, sehingga manfaatnya hanya untuk tahun tersebut. Jika pada fase 1 sudah diperoleh manfaat dari hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan, dan jasa lingkungan, maka pengeluaran ini diakui sebagai HPP (beban langsung), dan jika sebaliknya, diakui sebagai beban operasi.	HPP/Beban Operasi Aset lain-lain (beban tangguhan) Aset lain-lain (beban tangguhan) Aset lain-lain (beban tangguhan) Aset lain-lain (beban tangguhan)	Laba Rugi Neraca Neraca Neraca Neraca Laba Rugi

Rincian kegiatan tidak terbatas pada yang disajikan pada matriks ini. Dapat disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.

Tabel 1.D KEGIATAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI IUPHK-RE (SEBELUM KESEIMBANGAN EKOSISTEM/FASE 1)

No.	NAMA KEGIATAN	RINCIAN	Keterangan	HUTAN RESTORASI EKOSISTEM (SEBELUM KESEIMBANGAN)	
				KELOMPOK DALAM LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN KEUANGAN
2.	Restorasi Habitat (Flora/Fauna) a. Restorasi Hutan Produktif	<ol style="list-style-type: none"> Inventarisasi (Flora dan Fauna pilihan) Pemeliharaan (Perapihan/Pembebasan /Pendangiran) Restorasi habitat flora fauna pilihan 	<p>Pengeluaran ini diasumsikan dilakukan secara rutin setiap tahun untuk mengetahui kondisi tegakan.</p> <p>Jika pada fase 1 sudah diperoleh manfaat dari hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan, dan jasa lingkungan, maka pengeluaran ini diakui sebagai HPP (beban langsung), dan jika sebaliknya, diakui sebagai beban operasi.</p>	HPP/Beban Operasi	Laba Rugi
	b. Restorasi Hutan Kurang Produktif	<ol style="list-style-type: none"> Inventarisasi (Flora dan Fauna pilihan) Inventarisasi Tegakan Tinggi (ITT) Penjarangan Tegakan Tinggi Persemaian/pembibitan (termasuk Plasma Nutfah, Kebun Benih/Tegakan Benih) Penyisipan Jalur Tanam Penanaman / Pengayaan Pemeliharaan (Perapihan/Pembebasan /Pendangiran) Restorasi habitat flora fauna pilihan Penanaman Tanah Kosong EKS TPK/TPK/Jalan sarad Penanaman Kiri Kanan Jalan/Kanan Kiri Sungai 	<p>Pengeluaran ini diasumsikan dilakukan secara rutin setiap tahun untuk mengetahui kondisi tegakan.</p> <p>Jika pada fase 1 sudah diperoleh manfaat dari hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan, dan jasa lingkungan, maka pengeluaran ini diakui sebagai HPP (beban langsung), dan jika sebaliknya, diakui sebagai beban operasi.</p>	HPP/Beban Operasi	Laba Rugi
			Persediaan Bibit	Persediaan Bibit	
			Persediaan bibit sudah digunakan, direklasifikasi ke HRE dalam Pengembangan/HRE dalam Pengembangan-Hak Kelola.	Jika persediaan bibit sudah digunakan, direklasifikasi ke HRE dalam Pengembangan/HRE dalam Pengembangan-Hak Kelola.	Neraca
			Pengeluaran ini terkait langsung dengan penanaman yang manfaat ekonomisnya sepanjang masa konsesi.	HRE Dalam Pengembangan/HRE Dalam Pengembangan-Hak Kelola	
			Jika dapat diidentifikasi mana tegakan yang dapat ditebang dan yang tidak, maka untuk tegakan yang dapat ditebang diakui sebagai HRE Dalam Pengembangan, sedangkan untuk tegakan yang tidak dapat ditebang diakui sebagai HRE Dalam Pengembangan-Hak Kelola.	HRE Dalam Pengembangan/HRE Dalam Pengembangan-Hak Kelola akan direklasifikasi menjadi HRE/HRE-Hak Kelola ketika tercapai keseimbangan ekosistem dan selanjutnya diamortisasi hingga akhir masa konsesi.	Neraca

Rincian kegiatan tidak terbatas pada yang disajikan pada matriks ini. Dapat disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.

Tabel 1.D KEGIATAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI IUPHK-RE (SEBELUM KESEIMBANGAN EKOSISTEM/FASE 1)

No.	NAMA KEGIATAN	RINCIAN	Keterangan	HUTAN RESTORASI EKOSISTEM (SEBELUM KESEIMBANGAN)	
				KELOMPOK DALAM LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN KEUANGAN
3.	c. Restorasi Hutan Tidak Produktif	1. Inventarisasi (Flora dan Fauna pilihan)	<p>Pengeluaran ini diasumsikan dilakukan secara rutin setiap tahun untuk mengetahui kondisi tegakan.</p> <p>Jika pada fase 1 sudah diperoleh manfaat dari hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan, dan jasa lingkungan, maka pengeluaran ini diakui sebagai HPP (beban langsung), dan jika sebaliknya, diakui sebagai beban operasi.</p> <p>Persediaan bibit</p> <p>Jika persediaan bibit sudah digunakan, direklasifikasi ke HRE dalam Pengembangan-Hak Kelola.</p> <p>Persediaan bibit diakui sebagai persediaan.</p> <p>Pengeluaran ini terkait langsung dengan penanaman yang manfaat ekonomisnya sepanjang masa konsesi.</p> <p>Jika dapat diidentifikasi mana tegakan yang dapat ditebang dan yang tidak, maka untuk tegakan yang dapat ditebang diakui sebagai HRE dalam Pengembangan, sedangkan untuk tegakan yang tidak dapat ditebang diakui sebagai HRE dalam Pengembangan-Hak Kelola.</p> <p>Pengeluaran ini berupa aset berwujud, namun akan diserahtakan kepada negara di akhir masa konsesi, sehingga dikategorikan sebagai hak kelola.</p>	HPP/Beban Operasi	Laba Rugi
		2. Inventarisasi Tegakan Tinggi (ITT)			
		3. Penjarangan Tegakan Tinggi			
		4. Persemaian/pembibitan (termasuk Plasma Nutfah, Kebun Benih/Tegakan Benih)			
		5. Penyiapan Jalur Tanam			
		6. Penanaman / Pengayaan			
		7. Pemilihan (Perapihan/Pembebasan /Pemandangan)			
		8. Restorasi habitat flora fauna pilihan			
		9. Penanaman Tanah Kosong Tpn/TPK/Jalan sarad			
		10. Penanaman Kiri Kanan Jalan/Kanan Kiri Sungai			
3.	Pembangunan Sarana Prasarana	1. Jembatan dan/atau Jalan Induk	<p>HRE dalam Pengembangan/HRE dalam Pengembangan-Hak Kelola.</p> <p>HRE dalam Pengembangan/HRE akan direklasifikasi menjadi HRE/HRE-Hak Kelola ketika tercapai keseimbangan ekosistem dan selanjutnya diamortisasi hingga akhir masa konsesi.</p> <p>Aset Tetap-Hak Kelola</p>	Neraca	Neraca
		2. Jembatan dan/atau Jalan Cabang			
		3. Jalan Rel			
		4. Kantor			
		5. Basecamp			
		6. Bangunan Persemaian			
		7. Bangunan Pusat Penelitian			
		8. Bangunan Rehabilitasi dan Karantina Flora dan Fauna			

Rincian kegiatan tidak terbatas pada yang disajikan pada matriks ini. Dapat disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.

Tabel 1.D KEGIATAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI IUPHK-RE (SEBELUM KESEIMBANGAN EKOSISTEM/FASE 1)

No.	NAMA KEGIATAN	RINCIAN	Keterangan	HUTAN RESTORASI EKOSISTEM (SEBELUM KESEIMBANGAN)	
				KELOMPOK DALAM LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN KEUANGAN
4.	Pelepaslarian flora dan/ atau fauna	1. Pemeliharaan Flora dan/ atau Fauna	Pengeluaran ini pada dasarnya memenuhi kriteria pengakuan aset, namun tidak praktis untuk diakui sebagai aset karena fauna dapat pergi/hilang/mati. Dengan demikian, perlakuan akuntansi atas flora mengikuti perlakuan akuntansi atas fauna. Jika pada fase 1 sudah diperoleh manfaat dari hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan, dan jasa lingkungan, maka pengeluaran ini diakui sebagai HPP (beban langsung), dan jika sebaliknya, diakui sebagai beban operasi.	HPP/Beban Operasi	Laba Rugi
		2. Survei kebutuhan ekologi dan pakan			
		3. Pelepaslarian			
		4. Monitoring			
5.	Perlindungan & Pengamanan Hutan	1. Pembangunan menara api	Pengeluaran ini berupa aset berwujud, namun akan diserahtakan kepada negara di akhir masa konsesi, sehingga dikategorikan sebagai hak kelola. Pengeluaran ini diakui sebagai beban karena bersifat rutin atau sarpras yang tidak bersifat permanen. Jika pada fase 1 sudah diperoleh manfaat dari hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan, dan jasa lingkungan, maka pengeluaran ini diakui sebagai HPP (beban langsung), dan jika sebaliknya, diakui sebagai beban operasi. Jika pengeluaran ini dibayarkan sekaligus diawal untuk beberapa tahun, maka diakui sebagai Biaya Dibayar Dimulka. Jika pengeluaran ini dibayarkan per tahun, maka diakui sebagai Beban Operasi.	Aset Tetap-Hak Kelola	Neraca
		2. Pengadaan sarpras kebakaran (termasuk kantung air & sistem komunikasi)			
		3. Pembangunan pos jaga (termasuk satuan pengamanan)			
		4. Pembuatan laran api (atau sekat bakar)			
		5. Pengerahan tenaga			
		6. Penggunaan bahan dan perlengkapan			
		7. Penyuluhan/Patroli			
		8. Pengendalian hama dan penyakit			
		9. Premi Asuransi Kebakaran			
				HPP/Beban Operasi	Laba Rugi
				Aset Lancar (Biaya Dibayar Dimulka)/Beban Operasi	Neraca /Laba Rugi

Rincian kegiatan tidak terbatas pada yang disajikan pada matriks ini. Dapat disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.

Tabel 1.D KEGIATAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI IUPHK-RE (SEBELUM KESEIMBANGAN EKOSISTEM/FASE 1)

No.	NAMA KEGIATAN	RINCIAN	Keterangan	HUTAN RESTORASI EKOSISTEM (SEBELUM KESEIMBANGAN)	
				KELOMPOK DALAM LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN KEUANGAN
6.	Monitoring dan evaluasi	Monitoring dan evaluasi internal	Pengeluaran ini dilakukan secara rutin dalam rangka memantau kinerja dan pencapaian kegiatan restorasi yang nantinya akan menjadi arahan baru atas rencana dan strategi ke depan. Jika pada fase 1 sudah diperoleh manfaat dari hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan, dan jasa lingkungan, maka pengeluaran ini diakui sebagai HPP (beban langsung), dan jika sebaliknya, diakui sebagai beban operasi.	HPP/Beban Operasi	Labda Rugi
7.	Pemanfaatan Hasil Hutan (PJJ, PK, HBK)	1. Pemanfaatan HBK 2. Pemutuan/Perakitan 3. Pengangkutan 4. Pembongkaran	Pengeluaran ini terkait langsung dengan perolehan manfaat hasil hutan (PJJ, PK, HBK).	HPP	Labda Rugi
8.	Pemenuhan kewajiban pada Negara	1. PBB 2. Pajak Penghasilan (PPh) 3. PSDH 4. Retribusi/Pungutan Daerah	Pengeluaran ini dibayarkan setiap tahun. Asumsi berupa PPh Badan. Jika pengeluaran ini bukan PPh Badan, diakui sebagai beban operasi. Pengeluaran ini terkait langsung dengan hasil produksi sumber daya hutan.	Beban Operasi Beban Pajak HPP	Labda Rugi Labda Rugi Labda Rugi
9.	Pemenuhan Kewajiban Kepada Lingkungan & Sosial	1. Pelaksanaan keola Lingkungan 2. Pelaksanaan pemantauan lingkungan 3. Pelaksanaan kelola sosial/CSR/PMDH 4. Penyajian evaluasi lingkungan 5. Sertifikasi (PHPL, dll)	Pengeluaran ini bersifat rutin dan tidak terkait langsung dengan produkt sumber daya hutan. Pengeluaran ini bersifat rutin dan tidak terkait langsung dengan produkt sumber daya hutan.	Beban Operasi Beban Operasi	Labda Rugi Labda Rugi
10.	Penelitian dan Pengembangan	1. Pengembangan kelembagaan 2. Identifikasi flora dan fauna pilihan 3. Pengamatan Petak Ukur Permanen (PUP) 4. Tehnik Restorasi	Pengeluaran ini memberikan manfaat lebih dari satu tahun. Penelitian: Beban Operasi Pengembangan : Aset Takberwujud Perilaku mengacu pada PSAK umum	Aset lain-lain (beban tangguhan) Beban Operasi/Aset Takberwujud	Neraca Labda Rugi/Neraca

Rincian kegiatan tidak terbatas pada yang disajikan pada matriks ini. Dapat disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.

Tabel 1.D KEGIATAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI IUPHK-RE (SEBELUM KESEIMBANGAN EKOSISTEM/FASE 1)

No.	NAMA KEGIATAN	RINGKIAN	Keterangan	HUTAN RESTORASI EKOSISTEM (SEBELUM KESEIMBANGAN)	
				KELOMPOK DALAM LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN KEUANGAN
11.	Biaya Umum & Administrasi	1. Berkaitan dengan kegiatan RE 2. Tidak berkaitan langsung dengan Kegiatan RE	<p>Pengeluaran ini terkait langsung dengan kegiatan RE, sehingga dapat dipadankan dengan pendapatan dari kegiatan RE tersebut.</p> <p>Jika pada fase 1 sudah diperoleh manfaat dari hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan, dan jasa lingkungan, maka pengeluaran ini diakui sebagai HPP (beban langsung), dan jika sebaliknya, diakui sebagai beban operasi.</p> <p>Pengeluaran ini tidak terkait langsung dengan kegiatan RE, sehingga tidak dapat dipadankan dengan pendapatan dari kegiatan RE tersebut.</p>	HPP/Beban Operasi Beban Operasi	Labba Rugi Labba Rugi

Rincian kegiatan tidak terbatas pada yang disajikan pada matriks ini. Dapat disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.

Tabel 1.1.E KEGIATAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI IUPHHK-RE (SETELAH KESEIMBANGAN EKOSISTEM/FASE 2)

No.	NAMA KEGIATAN	RINCIAN	Keterangan	HUTAN RESTORASI EKOSISTEM (SESUDAH KESEIMBANGAN)	
				KELOMPOK DALAM LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN KEUANGAN
1.	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Perolehan IUPHHK-RE 2. Pembayaran Iuran IUPHHK 3. Tata Batas Areal & Pemetaan 4. Citra Satelit 5. IHMB / Risaalah 6. Penyusunan RKUPHHK 7. Penyusunan RKTUPHHK 8. Penyusunan RKL/UP/L/AMDAL 9. Penataan Areal Kerja (PAK) 10. Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSB) 11. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) 12. Sertifikasi (PHPL, dll) 13. Pemilihan (surveillance) 	<p>Jika seluruh aktivitas ini dilaksanakan kembali pada fase setelah mencapai keseimbangan.</p> <p>Jika seluruh aktivitas ini dilaksanakan kembali pada fase setelah mencapai keseimbangan.</p> <p>Penjelasan per aktivitas dapat dilihat di matriks fase 1.</p>	<p>Aset Takberwujud</p> <p>Aset Takberwujud</p> <p>Aset lain-lain (beban tanggungan)</p> <p>Aset lain-lain (beban tanggungan)</p> <p>Aset lain-lain (beban tanggungan)</p> <p>Aset lain-lain (beban tanggungan)</p> <p>HPP</p> <p>Aset lain-lain (beban tanggungan)</p> <p>Aset lain-lain (beban tanggungan)</p> <p>HPP</p> <p>Aset lain-lain (beban tanggungan)</p> <p>Aset lain-lain (beban tanggungan)</p> <p>HPP</p>	<p>Neraca</p> <p>Neraca</p> <p>Neraca</p> <p>Neraca</p> <p>Neraca</p> <p>Neraca</p> <p>Laba Rugi</p> <p>Neraca</p> <p>Neraca</p> <p>Laba Rugi</p> <p>Neraca</p> <p>Neraca</p> <p>Laba Rugi</p>
2.	Restorasi Habitat (Flora/Pauna)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi (Flora dan Fauna pilihan) 2. Inventarisasi Tegakan Tinggal (ITT) 3. Penjarangan Tegakan Tinggal 4. Persemaian/pembibitan (termasuk Plasma Nutfah, Kebun Benih/Tegakan Benih) 5. Penyiapan Jalur Tanam 6. Penanaman / Pengayaan 7. Pemeliharaan (Perapihan/Pembebasan /Pemandangan) 8. Restorasi habitat flora fauna pilihan 9. Penanaman Tanah Kosong Eks TPr/TPK/Jalan serad 10. Penanaman Kiri Kanan Jalan/Kanan Kiri Sungai 	<p>Pengeluaran ini diasumsikan dilakukan secara rutin setiap tahun untuk mengetahui kondisi tegakan.</p> <p>Jika pada fase 1 sudah diperoleh manfaat dari hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan, dan jasa lingkungan, maka pengeluaran ini diakui sebagai HPP (beban langsung), dan jika sebaliknya, diakui sebagai beban operasi.</p> <p>Persediaan bibit diakui sebagai persediaan.</p> <p>Pengeluaran ini terkait langsung dengan penanaman yang manfaat ekonomisnya sepanjang masa konsesi.</p> <p>Jika dapat diidentifikasi mana tegakan yang dapat ditebang dan yang tidak, maka untuk tegakan yang dapat ditebang diakui sebagai HRE Dalam Pengembangan, sedangkan untuk tegakan yang tidak dapat ditebang diakui sebagai HRE Dalam Pengembangan-Hak Kelola.</p>	<p>HPP</p> <p>Persediaan Bibit</p> <p>Jika persediaan bibit sudah digunakan, direklasifikasi ke HRE dalam Pengembangan/HRE dalam Pengembangan-Hak Kelola.</p> <p>HRE Dalam Pengembangan/HRE Dalam Pengembangan-Hak Kelola</p> <p>HRE Dalam Pengembangan/HRE Dalam Pengembangan-Hak Kelola akan direklasifikasi menjadi HRE/HRE-Hak Kelola ketika tercapai keseimbangan ekosistem dan selanjutnya diamortisasi hingga akhir masa konsesi.</p>	<p>Laba Rugi</p> <p>Neraca</p> <p>Neraca</p>

Rincian kegiatan tidak terbatas pada yang disajikan pada matriks ini. Dapat disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.

Tabel 1.E KEGIATAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI IUPHHK-RE (SETELAH KESEIMBANGAN EKOSISTEM/FASE 2)

No.	NAMA KEGIATAN	RINCIAN	Keterangan	HUTAN RESTORASI EKOSISTEM (SESUDAH KESEIMBANGAN)	
				KELOMPOK DALAM LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN KEUANGAN
3.	Pembangunan Sarana Prasarana Jika ada pembangunan, dilakukan akuntansi mengacu ke matriks sebelum terjadi keseimbangan	<ol style="list-style-type: none"> Jembatan dan/atau Jalan Induk Jembatan dan/atau Jalan Cabang Jalan Rel/Jalan Sarad Kantor Basecamp Bangunan Persemaian Bangunan Pusat Penelitian Bangunan Rehabilitasi dan Karantina Flora dan Fauna Pembangunan TPh/TPK/Log Pond/Log Yard/Dermaga 	<p>Pengeluaran ini berupa aset berwujud, namun akan diserahteruskan kepada negara di akhir masa konsesi, sehingga dikategorikan sebagai hak kelola.</p>	Aset Tetap-Hak Kelola	Neraca
4.	Pelepaslarian flora dan/atau fauna	<ol style="list-style-type: none"> Survei kebutuhan ekologi dan pakan Pelepaslarian Pemeliharaan Flora dan/atau Fauna Monitoring Pelepaslarian 	<p>Jika seluruh aktivitas ini dilaksanakan kembali pada fase setelah mencapai keseimbangan.</p> <p>Penjelasan per aktivitas dapat dilihat di matriks fase 1.</p>	HPP	Laba Rugi
6	Perlindungan & Pengamanan Hutan	<ol style="list-style-type: none"> Pembangunan menara api Pengadaan sarpras kebakaran (termasuk kantung air & sistem komunikasi) Pembangunan pos jaga (termasuk satuan pengamanan) Pembuatan Ilaran api (atau sekat bakar) Pengerahan tenaga Penggunaan bahan dan perlengkapan Penyuluhan/Patroli Pengendalian hama dan penyakit Premi Asuransi Kebakaran 	<p>Pengeluaran ini berupa aset berwujud, namun akan diserahteruskan kepada negara di akhir masa konsesi, sehingga dikategorikan sebagai hak kelola.</p>	Aset Tetap-Hak Kelola	Neraca
			<p>Pengeluaran ini diakui sebagai beban karena bersifat rutin atau sarpras yang tidak bersifat permanen.</p>	HPP	Laba Rugi
			<p>Jika pengeluaran ini dibayarkan sekaligus diawal untuk beberapa tahun, maka diakui sebagai Biaya Dibayar Dimuka.</p> <p>Jika pengeluaran ini dibayarkan per tahun, maka diakui sebagai Beban Operasi.</p>	Aset Lancar (Biaya Dibayar Dimuka)/Beban Operasi	Neraca/Laba Rugi

Rincian kegiatan tidak terbatas pada yang disajikan pada matriks ini. Dapat disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.

Tabel 1.E KEGIATAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI IUPHHK-RE (SETELAH KESEIMBANGAN EKOSISTEM/FASE 2)

No.	NAMA KEGIATAN	RINCIAN	Keterangan	HUTAN RESTORASI EKOSISTEM (SESUDAH KESEIMBANGAN)	
				KELOMPOK DALAM LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN KEUANGAN
7	Monitoring dan evaluasi hasil restorasi	Monitoring dan evaluasi Internal	<p>Pengeluaran ini dilakukan secara rutin dalam rangka memantau kinerja dan pencapaian kegiatan restorasi yang nantinya akan menjadi arahan baru atas rencana dan strategi ke depan.</p> <p>Jika pada fase 1 sudah diperoleh manfaat dari hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan, dan jasa lingkungan, maka pengeluaran ini diikuti sebagai HPP (beban langsung), dan jika sebaliknya, diikuti sebagai beban operasi.</p>	HPP/Beban Operasi	Labas Rugi
8	Pemanfaatan Hasil Hutan (HBK, PK, R/JL, dan HK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjarangan, Penebangan dan Pemanfaatan HHBK 2. Kupas Kulit, Paku S, Penandaan 3. Penyaradan 4. Pemuaatan/Perakitan 5. Pengangkutan 6. Pembongkaran 	<p>Pengeluaran ini terkait langsung dengan perolehan manfaat hasil hutan (HK, HBK, PK, PJJ).</p>	HPP	Labas Rugi
9	Pemenuhan kewajiban pada Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. PBB 2. Pajak Penghasilan (PPH) 3. PSDH 4. DR 5. Retribusi/Pungutan Daerah 	<p>Pengeluaran ini dibayarkan setiap tahun.</p> <p>Asumsi berupa PPh Badan.</p> <p>Jika pengeluaran ini bukan PPh Badan, diikuti sebagai beban operasi.</p>	Beban Operasi	Labas Rugi
10	Pemenuhan Kewajiban Kepada Lingkungan & Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Ketela Lingkungan 2. Pelaksanaan pemantauan lingkungan 3. Pelaksanaan kelola sosial/CSR/PMDDH 4. Penyajian evaluasi lingkungan 5. Sertifikasi (PHPL, dll) 	<p>Pengeluaran ini terkait langsung dengan hasil produksi sumber daya hutan.</p> <p>Pengeluaran ini bersifat rutin dan terkait langsung dengan produksi sumber daya hutan.</p> <p>Pengeluaran ini bersifat rutin dan tidak terkait langsung dengan produksi sumber daya hutan.</p>	HPP	Labas Rugi
11	Penelitian dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kelembagaan 2. Identifikasi flora dan fauna pilihan 3. Pengamatan Petak Ukur Permanen (PUP) 4. Teknik Restorasi 	<p>Pengeluaran ini memberikan manfaat lebih dari satu tahun.</p> <p>Penelitian: Beban Operasi</p> <p>Pengembangan: Aset Takberwujud</p> <p>Perakuan mengacu pada PSAK umum</p>	Beban Operasi	Labas Rugi
				Aset lain-lain (beban tanggungan)	Netra
				Beban Operasi/Aset Takberwujud	Labas Rugi/Netra

Rincian kegiatan tidak terbatas pada yang disajikan pada matriks ini. Dapat disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.

Tabel 1.E KEGIATAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI IUPHHK-RE (SETELAH KESEIMBANGAN EKOSISTEM/FASE 2)

No.	NAMA KEGIATAN	RINCIAN	Keterangan	HUTAN RESTORASI EKOSISTEM (SESUDAH KESEIMBANGAN)	
				KELOMPOK DALAM LAPORAN KEUANGAN	LAPORAN KEUANGAN
12	Biaya Umum & Administrasi	1. Berkaitan dengan kegiatan RE 2. Tidak berkaitan langsung dengan kegiatan RE	<p>Pengeharian ini terkait langsung dengan kegiatan RE, sehingga dapat dipadankan dengan pendapatan dari kegiatan RE tersebut.</p> <p>Jika pada fase 1 sudah diperoleh manfaat dari hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan kawasan, dan jasa lingkungan, maka pengeluaran ini diakui sebagai HPP (beban langsung), dan jika sebaliknya, diakui sebagai beban operasi.</p> <p>Pengeharian ini tidak terkait langsung dengan kegiatan RE, sehingga tidak dapat dipadankan dengan pendapatan dari kegiatan RE tersebut.</p>	HPP/Beban Operasi	Laba Rugi
				Beban Operasi	Laba Rugi

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Rincian kegiatan tidak terbatas pada yang disajikan pada matriks ini. Dapat disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
 NOMOR :
 TENTANG :
 PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI (DOLAPKEU PHP)

**PT KEHUTANAN
 NERACA
 31 DESEMBER 20X7 DAN 20X8
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)**

A K T I V A

	<u>Catatan</u>	<u>20X7</u>	<u>20X8</u>
AKTIVA LANCAR			
Kas dan setara kas		Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx
Investasi jangka pendek		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Wesel tagih		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Piutang usaha			
(Setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp xxx.xxx pada tahun 20X7 dan Rp xxx.xxx pada tahun 20X8)			
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pihak ketiga		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Piutang lain-lain			
(Setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp xxx.xxx pada tahun 20X7 dan Rp xxx.xxx pada tahun 20X8)		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Persediaan		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pajak dibayar di muka		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Biaya dibayar di muka		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aktiva lancar lain-lain		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Jumlah Aktiva Lancar			
AKTIVA TIDAK LANCAR			
Piutang hubungan istimewa		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aktiva pajak tangguhan		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Investasi pada perusahaan asosiasi		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
HT Siap Panen			
(Setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp xxx.xxx pada tahun 20X7 dan Rp xxx.xxx pada tahun 20X8)		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
HT Dalam Pengembangan		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Properti Investasi		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Investasi jangka panjang lain	2f,2g,2x,15,55,56	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aktiva tetap			
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp xxx.xxx pada tahun 20X7 dan Rp xxx.xxx pada tahun 20X8)		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aktiva tak berwujud			
(Setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp xxx.xxx pada tahun 20X7 dan Rp xxx.xxx pada tahun 20X8)		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aktiva lain-lain		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Jumlah Aktiva Tidak Lancar			
		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
JUMLAH AKTIVA		Rp <u>xx.xxx.xxx</u>	Rp <u>xx.xxx.xxx</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Contoh Laporan Keuangan IUPHHK-RE (NERACA-ASET)

PT KEHUTANAN
NERACA PARSIAL-BAGIAN ASET
31 DESEMBER 20X7 DAN 20X8
(Dalam Ribuan Rupiah)

	Sebelum keseimbangan <u>20X7</u>	Setelah keseimbangan <u>20X8</u>
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx
Investasi jangka pendek	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Wesel tagih	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Piutang usaha	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pihak ketiga	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Piutang lain-lain	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Persediaan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pajak dibayar di muka	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Biaya dibayar di muka	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset lancar lain-lain	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Jumlah Aset Lancar	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
ASET TIDAK LANCAR		
Piutang hubungan istimewa	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx
Aktiva pajak tangguhan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Investasi pada perusahaan asosiasi	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
HRE ^(a)	0	xx.xxx.xxx
HRE Dalam Pengembangan ^(a)	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx ^(b)
Investasi jangka panjang lain	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset tetap ^(c)	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset tak berwujud	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Aset lain-lain	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Jumlah Aset Tidak Lancar	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
JUMLAH ASET	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx

^(a) Termasuk di dalamnya HRE-Hak Kelola atau HRE dalam Pengembangan-Hak Kelola

^(b) Jika setelah tercapai keseimbangan dilakukan penanaman kembali atas areal bekas tebang

^(c) Termasuk di dalamnya Aset Tetap-Hak Kelola

PT KEHUTANAN
NERACA
31 DESEMBER 20X7 DAN 20X8 (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

	<u>Catatan</u>	<u>20X7</u>	<u>20X8</u>
KEWAJIBAN LANCAR			
Hutang PSDH		Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx
Hutang DR		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pinjaman jangka pendek	2x,6,8,19	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Wesel bayar	2x,24,56	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Hutang usaha	2x,24,56		
Pihak ketiga		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	55	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Hutang sistem silvikultur		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Hutang pajak	9,26	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Beban masih harus dibayar		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pendapatan diterima dimuka		xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Pinjaman jangka panjang		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Hutang sewa		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Hutang obligasi		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Kewajiban lancar lain-lain		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Jumlah Kewajiban Lancar		<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR			
Hutang hubungan istimewa		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Kewajiban pajak tangguhan		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pinjaman jangka panjang		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Hutang sewa		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Keuntungan tangguhan aktiva dijual dan sewa balik	34	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Kewajiban Imbalan Kerja		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Pinjaman Dana Reboisasi		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Hutang obligasi	20,2x,19,35,56	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Kewajiban tidak lancar lainnya		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Hutang subordinasi	36,55	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Obligasi konversi		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

PT KEHUTANAN
NERACA
31 DESEMBER 20X7 DAN 20X8 (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

	<u>Catatan</u>	<u>20X7</u>	<u>20X8</u>
EKUITAS			
Modal saham			
Saham Seri A nilai nominal Rp xxx			
Saham Seri B nilai nominal Rp xxx			
Modal dasar - xxx.xxx saham Seri A dan xxx.xxx saham Seri B pada tahun 20X8; xxx.xxx saham Seri A dan xxx.xxx saham Seri B pada tahun 20X7			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - xxx.xxx saham Seri A dan xxx.xxx saham Seri B pada tahun 20X8; xxx.xxx saham Seri A dan xxx.xxx saham Seri B pada tahun 20X1		Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx
Tambahan modal disetor - bersih		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Selisih kurs karena penjabaran laporan ke-		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Laba (rugi) belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Selisih penilaian kembali aktiva tetap		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Opsi saham	2u,47	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Saldo Laba	44		
Dicadangkan		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Tidak dicadangkan		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Jumlah Ekuitas		<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>Rp xx.xxx.xxx</u>	<u>Rp xx.xxx.xxx</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

PT KEHUTANAN
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 20X7 DAN 20X8
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Laba per Saham)

	Catatan	20X7	20X8
PENDAPATAN USAHA	2r,48	Rp xx.xxx.xxx	Rp xx.xxx.xxx
BEBAN POKOK PENJUALAN	49	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
LABA (RUGI) KOTOR		<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
BEBAN USAHA	50		
Beban penjualan		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Beban umum dan administrasi		<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
Jumlah Beban Usaha		<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
LABA (RUGI) USAHA		<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	51		
Penghasilan lain-lain			
Penghasilan bunga	2r	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Laba (rugi) penjualan aktiva tetap - bersih	19	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Beban lain-lain			
Beban bunga		(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Beban keuangan	2s,19	(xx.xxx.xxx)	(xx.xxx.xxx)
Rugi penjualan/penurunan surat berharga	2s,19	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
Penghasilan (Beban) Lain-lain		<u>(xx.xxx.xxx)</u>	<u>(xx.xxx.xxx)</u>
BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	2f,16	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK	2t,52		
Periode berjalan		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Tanggungan		<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL		xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
POS LUAR BIASA	53	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
LABA (RUGI) BERSIH		Rp <u>x.xxx</u>	Rp <u>x.xxx</u>
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR	2w,54	Rp <u>x.xxx</u>	Rp <u>x.xxx</u>
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DILUSIAN	2w,54	Rp <u>x.xxx</u>	Rp <u>x.xxx</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Contoh Laporan Keuangan IUPHHK-RE (LABA RUGI)

PT KEHUTANAN
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 20X7 DAN 20X8
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Laba per Saham)

	Sebelum keseimbangan 20X7	Setelah keseimbangan 20X8
PENDAPATAN USAHA	Rp xx.xxx.xxx ^(d)	Rp xx.xxx.xxx
BEBAN POKOK PENJUALAN	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
LABA (RUGI) KOTOR	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
BEBAN OPERASI		
Beban penjualan	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Beban umum dan administrasi	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
Jumlah Beban Operasi	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
LABA (RUGI) OPERASI	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Donasi ^(e)	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Penghasilan bunga	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Beban bunga	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
Penghasilan (Beban) Lain-lain	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
PENGHASILAN	xx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK	<u>xx.xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx.xxx</u>
LABA (RUGI) BERSIH	<u>Rp xx.xxx.xxx</u>	<u>Rp xx.xxx.xxx</u>

^(d) Pendapatan ini dapat berupa penghasilan dari PjL, PK, HBK, atau donasi (jika perolehan donasi merupakan tujuan utama perusahaan).

^(e) Donasi dikategorikan sebagai penghasilan lain-lain jika bersifat tidak rutin atau perolehannya bukan merupakan tujuan utama perusahaan.

PT KEHUTANAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 20X7 DAN 20X8
 (Dalam Ribuan Rupiah)

Catatan	Laba (Rugi)										Jumlah
	Modal Saham Rp	Tambahan Modal Disetor Rp	Selisih Revaluasi Aktiva Tetap Rp	Selisih Diraitsasi Dari Efek Tersedita Untuk Laporan Keuangan Rp	Selisih Kurs Karena Penjabaran Ekuitas Perusahaan Asosiasi Rp	Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Rp	Opsi Saham Rp	Saldo Laba Ditentukan Penggunaannya Rp	Belum Ditentukan Penggunaannya Rp	Modal Saham Kembali Rp	
Saldo per 31 Desember 20X6	xxx	xxx	-	xxx	-	-	xxx	xxx	xxx	-	xxx
Perubahan akibat:	[xxx]	-	-	-	-	-	-	[xxx]	-	-	[xxx]
Saldo yang disajikan kembali:	xxx	xxx	-	xxx	-	-	xxx	xxx	xxx	-	xxx
Laba (rugi) belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual:	-	-	[xxx]	-	-	-	-	-	-	-	[xxx]
Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi:	-	-	-	-	xxx	-	-	-	-	-	xxx
Kearifan (kerugian) bersih yang tidak diakui pada laporan laba rugi:	-	-	[xxx]	-	xxx	-	-	-	-	-	xxx
Laba bersih periode berjalan:	-	-	-	-	-	-	xxx	xxx	xxx	-	xxx
Dividen:	-	-	-	-	-	-	-	[xxx]	[xxx]	-	[xxx]
Pelaksanaan opsi saham:	xxx	xxx	-	-	-	-	-	-	-	-	xxx
Perawaran umum terbatas II dengan hak memesan saham terlebih dahulu:	xxx	xxx	-	-	-	-	-	-	-	-	xxx
Saldo per 31 Desember 20X7	xxx	xxx	-	xxx	-	xxx	xxx	xxx	xxx	-	xxx
Selisih revaluasi aktiva tetap:	-	xxx	-	-	-	-	-	-	-	-	xxx
Laba (rugi) belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	xxx
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan:	-	-	-	-	-	-	-	[xxx]	[xxx]	-	[xxx]
Kearifan (kerugian) bersih yang tidak diakui pada laporan laba rugi:	-	-	xxx	-	-	-	-	-	-	-	xxx
Saham diproleh kembali:	xxx	xxx	-	-	-	-	-	-	[xxx]	-	[xxx]
Pelaksanaan opsi saham:	xxx	xxx	-	-	-	-	-	-	-	-	xxx
Laba bersih periode berjalan:	-	-	-	-	-	-	xxx	xxx	xxx	-	xxx
Dividen:	-	-	-	-	-	-	-	[xxx]	[xxx]	-	[xxx]
Saldo per 31 Desember 20X8	xxx	xxx	xxx	xxx	[xxx]	xxx	xxx	xxx	xxx	[xxx]	xxx

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Metode tidak Langsung

PT. KEHUTANAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 20X7 DAN 20X8
(Dalam Ribuan Rupiah)

	20X7	20X8
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba rugi bersih	Rp x.xxx.xxx	Rp x.xxx.xxx
Penyesuaian:		
Depresiasi HT	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Rugi selisih kurs atas penyajian kembaliP	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Penyusutan aktiva tetap	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Penyisihan imbalan kerja	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Rugi penjualan aktiva tetap	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Amortisasi beban tangguhan	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Beban (penghasilan) pajak tangguhan	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Perubahan dalam Aktiva & Kewajiban:		
Persediaan	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Biaya dibayar dimuka dan aktiva lancar lainnya	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Piutang karyawan	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Hutang usaha	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Biaya masih harus dibayar	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Hutang pajak	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	<u>x.xxx.xxx</u>	<u>x.xxx.xxx</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penurunan (kenaikan) deposito berjangka	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Hasil penjualan dari:		
Investasi jangka pendek	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Investasi jangka panjang lain	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Aktiva tetap	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Penerimaan dividen	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Penerimaan bunga obligasi	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Penambahan untuk:		
Aktiva tetap	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Investasi jangka pendek	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Investasi pada perusahaan asosiasi	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Investasi jangka panjang lain	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Penurunan (kenaikan) aktiva tak berwujud	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Penurunan (kenaikan) aktiva lain-lain	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	<u>(x.xxx.xxx)</u>	<u>(x.xxx.xxx)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pinjaman jangka pendek	x.xxx.xxx	(x.xxx.xxx)
Kenaikan (penurunan) hutang hubungan istimewa	x.xxx.xxx	(x.xxx.xxx)

PT. KEHUTANAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 20X7 DAN 20X8 (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah)

	20X7	20X8
Penerimaan dari penerbitan saham – bersih	Rp x.xxx.xxx	Rp x.xxx.xxx
Penerimaan dari penerbitan obligasi konversi – bersih	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Penerimaan hutang subordinasi	x.xxx.xxx	-
Penambahan hutang jangka panjang:		
Bank	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Sewa	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Obligasi	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Pembayaran hutang jangka panjang:		
Bank	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Sewa	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Obligasi	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Pembayaran dividen tunai	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Penurunan (kenaikan) piutang hubungan istimewa	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
PENGARUH SELISIH KURS	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	Rp x.xxx.xxx	Rp x.xxx.xxx
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas:		
Kapitalisasi biaya pinjaman selama masa pembangunan:		
Rugi kurs	Rp x.xxx.xxx	Rp x.xxx.xxx
Bunga	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Kenaikan aktiva tetap akibat penilaian kembali aktiva tetap	x.xxx.xxx	-
Restruturisasi hutang jangka panjang dengan aktiva tetap	x.xxx.xxx	-
Perolehan aktiva sewa guna usaha melalui hutang sewa	Rp x.xxx.xxx	Rp x.xxx.xxx
Tambahan modal disetor yang berasal dari perubahan ekuitas dalam aktiva bersih perusahaan asosiasi – setelah dikurangi pajak	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Metode Langsung

**PT. KEHUTANAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 20X7 DAN 20X8
(Dalam Ribuan Rupiah)**

	20X7	20X8
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan*	Rp x.xxx.xxx	Rp x.xxx.xxx
Pembayaran kas kepada:		
Pemasok*	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Direksi dan karyawan	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Kas yang dihasilkan dari operasi	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Penghasilan bunga	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Hasil penjualan investasi jangka pendek	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Pembayaran bunga	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Penambahan investasi jangka pendek	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Arus kas sebelum pos luar biasa	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Hasil dari asuransi karena kebakaran	x.xxx.xxx	-
Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penurunan (kenaikan) deposito berjangka	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Hasil penjualan dari:		
Investasi jangka pendek	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Investasi jangka panjang lain	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Aktiva tetap	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Penerimaan dividen	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Penerimaan bunga obligasi	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Penambahan untuk:		
Aktiva tetap	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Investasi jangka pendek	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Investasi pada perusahaan asosiasi	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Investasi jangka panjang lain	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Penurunan (kenaikan) aktiva tak berwujud	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Penurunan (kenaikan) aktiva lain-lain	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pinjaman jangka pendek	x.xxx.xxx	(x.xxx.xxx)
Kenaikan (penurunan) hutang hubungan istimewa	x.xxx.xxx	(x.xxx.xxx)

* Termasuk penerimaan/ pembayaran dari/ kepada pihak hubungan istimewa dalam rangka kegiatan operasi.

PT. KEHUTANAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 20X7 DAN 20X8 (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah)

	20X7	20X8
Penerimaan dari penerbitan saham – bersih	Rp x.xxx.xxx	Rp x.xxx.xxx
Penerimaan dari penerbitan obligasi konversi – bersih	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Penerimaan hutang subordinasi	x.xxx.xxx	-
Penambahan hutang jangka panjang:		
Bank	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Sewa	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Obligasi	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Pembayaran hutang jangka panjang:		
Bank	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Sewa	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Obligasi	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Pembayaran dividen tunai	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Penurunan (kenaikan) piutang hubungan istimewa	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(x.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
PENGARUH SELISIH KURS	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	Rp x.xxx.xxx	Rp x.xxx.xxx
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas:		
Kapitalisasi biaya pinjaman selama masa pembangunan:		
Rugi kurs	Rp x.xxx.xxx	Rp x.xxx.xxx
Bunga	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx
Kenaikan aktiva tetap akibat penilaian kembali aktiva tetap	x.xxx.xxx	-
Restruturisasi hutang jangka panjang dengan aktiva tetap	x.xxx.xxx	-
Perolehan aktiva sewa guna usaha melalui hutang sewa	Rp x.xxx.xxx	Rp x.xxx.xxx
Tambahan modal disetor yang berasal dari perubahan ekuitas dalam aktiva bersih perusahaan asosiasi – setelah dikurangi pajak	x.xxx.xxx	x.xxx.xxx

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

1. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

a. Pendirian Perusahaan

PT Kehutanan (Perusahaan) didirikan berdasarkan akta Notaris No. x tanggal 16 Desember 19V9 yang dibuat di hadapan Raden Sulastomo S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara No. xx tanggal 17 Desember 19W0 Tambahan No. xxx. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah dengan akta No. xx tanggal 17 Juli 20X7 dari Santosa Agustono S.H., Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar. Perubahan anggaran dasar Perusahaan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-3-16-874.HE.02.06.Th X8 tanggal 15 Januari 20X8.

Sesuai dengan Pasal 2 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi pemanfaatan hutan. Pada saat ini produk Perusahaan terutama adalah kayu dan getah karet.

Perusahaan adalah pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu seluas xxx.xxx Ha (Kalimantan Tengah) dan xx.xxx Ha (Kalimantan Barat) berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.xx/Kpts-xx/19V9 tanggal xx Januari 19V9 dan No.xx/Kpts-xx/19V9 tanggal xx Maret 19V9 yang telah berakhir pada tahun 20X9.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.xx/Kpts-xx/19X9 tanggal xx Jan 20X9 dan yang terakhir No. xxx/Kpts-xx/20X9 tanggal xx Maret 20X9, Perusahaan telah memperoleh persetujuan perpanjangan izin seluas xxx.xxx Ha (Kalimantan Tengah dan seluas xxx.xxx (Kalimantan Barat) untuk jangka waktu xx tahun (Kalimantan Tengah) dan xx tahun (Kalimantan Barat).

Kantor pusat Perusahaan terletak di Wisma Emiten lantai 10, jalan Metropolitan No. 125, Jakarta Selatan. Lokasi hutan terletak di, Kalimantan Tengah dan di, Kalimantan Barat. Perusahaan mulai memproduksi komersial sejak tahun 19W0. Hasil produksi dipasarkan di pasar lokal dan juga diekspor ke beberapa negara di Asia, dengan proporsi pemasaran lokal dan ekspor sebesar xx% dan xx%.

b. Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

a) Komisaris Utama	: Adi Suriantono Susatyo
b) Komisaris	: Askar Nurdin Halim Harry Tjandra Nugraha Tjendrawati Astono
c) Direktur Utama	: I.G. Ngurah Laksmana
d) Direktur Keuangan	: Fani Lawalata
e) Direktur Operasi	: Susanto Haryawan
f) Direktur Pemasaran	: Marsha Laksmiwati

Jumlah

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Jumlah karyawan Perusahaan adalah sebanyak xxx karyawan pada tahun 20X8 dan sebanyak x.xxx karyawan pada tahun 20X7.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) dan dilaporkan dengan mempedomani *Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan (DOLAPKEU-PHP2H)*

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun aset tetap yang telah dinilai kembali (revaluasi) pada tahun 20X2, investasi dalam efek tertentu yang dicatat sebesar nilai wajarnya dan persediaan yang dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih (*the lower cost or net realizable value*). Laporan keuangan disusun dengan metode akrual kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung (*indirect method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah *rupiah*.

b. Setara Kas

Setara kas meliputi investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan tidak dijamin.

c. Piutang

Penyisihan piutang ragu-ragu ditetapkan berdasarkan penelaahan terhadap kemungkinan tertagihnya piutang tersebut pada akhir periode yang bersangkutan.

d. Pengalihan Piutang Usaha (Anjak Piutang)

Anjak piutang dengan *recourse* diakui sebagai kewajiban anjak piutang sebesar nilai piutang yang dialihkan. Selisih antara nilai piutang yang dialihkan dengan dana yang diterima ditambah retensi, diakui sebagai beban bunga selama periode anjak piutang.

e. Persediaan

Hasil hutan yang dikategorikan sebagai persediaan adalah hasil hutan yang sudah dipungut/dipanen/disadap yang siap untuk dijual tidak termasuk HT Siap Panen sebagaimana diatur dalam catatan 2h.

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih (*the lower cost or net realizable value*).

Harga perolehan dinyatakan berdasarkan metode "identifikasi khusus" (*specific identification*) untuk barang jadi dan barang dalam proses, dan metode "rata-rata tertimbang" untuk bahan baku pembantu.

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Persediaan bahan baku pembantu yang usang dicadangkan berdasarkan estimasi penggunaan di masa mendatang. Sedangkan persediaan bibit tanaman yang kadaluarsa atau mati, langsung dihapusbukukan.

f. Investasi

1) Deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan pada saat penempatan namun dijaminakan, atau telah ditentukan penggunaannya dan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan pada saat penempatan disajikan sebagai Investasi Jangka Pendek. Deposito disajikan sebesar nilai nominal.

2) Investasi dalam bentuk surat berharga (efek) yang nilai wajarnya tersedia dapat berupa efek hutang (*debt securities*) dan efek ekuitas (*equity securities*), digolongkan dalam tiga kelompok berikut:

a) Diperdagangkan (*trading securities*)

Termasuk dalam kelompok ini adalah efek yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat, yang biasanya ditunjukkan dengan frekuensi pembelian dan penjualan yang sering. Efek ini dimiliki dengan tujuan untuk menghasilkan laba dari perbedaan harga jangka pendek. Investasi dalam efek yang termasuk dalam kelompok ini diukur sebesar nilai wajarnya. Laba/rugi yang timbul dari pengukuran tersebut diakui pada periode berjalan.

b) Dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity*)

Investasi dalam efek hutang yang dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo diukur sebesar harga perolehan yang disesuaikan dengan amortisasi premi atau diskonto yang belum diamortisasi.

c) Tersedia untuk dijual (*available for sale*)

Investasi dalam efek yang tidak memenuhi kriteria kelompok diperdagangkan dan yang dimiliki hingga jatuh tempo diukur sebesar nilai wajarnya. Laba/rugi yang belum direalisasi dari kepemilikan efek ini disajikan sebagai komponen ekuitas.

3) Investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan saham yang nilai wajarnya tidak tersedia.

Investasi dalam bentuk saham di mana Perusahaan mempunyai kepemilikan saham kurang dari 20% dicatat sebesar nilai terendah antara harga perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasi.

Investasi dalam bentuk saham di mana Perusahaan mempunyai kepemilikan saham minimal 20%, tetapi tidak lebih dari 50% dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, di mana harga perolehan dari penyertaan ditambah atau dikurangi dengan bagian Perusahaan atas laba atau rugi bersih perusahaan asosiasi sejak tanggal perolehan serta dikurangi dengan pendapatan dividen. Bagian Perusahaan atas laba atau rugi bersih perusahaan asosiasi disesuaikan dengan amortisasi atas perbedaan antara harga perolehan penyertaan dan bagian kepemilikan Perusahaan atas nilai wajar aset bersih (yang sama dengan nilai buku dari perusahaan asosiasi) pada tanggal akuisisi (*goodwill*), dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 (lima) tahun. Selisih bagian harga wajar dengan bagian kepemilikan Perusahaan atas nilai buku aset tetap disusutkan sesuai dengan sisa taksiran umur aset yang bersangkutan.

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pada saat suatu perusahaan asosiasi (yang pencatatannya dengan metode ekuitas), menjual sahamnya kepada pihak ketiga dengan harga yang berbeda dari nilai bukunya, maka nilai penyertaan bersih Perusahaan pada perusahaan asosiasi tersebut akan terpengaruh. Perusahaan mengakui perubahan dalam penyertaan bersih pada perusahaan asosiasi tersebut dengan mengkredit akun "Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Asosiasi."

Selanjutnya, pada saat perusahaan asosiasi (yang pencatatannya dengan metode ekuitas) merubah mata uang pelaporannya dari Rupiah ke Dolar A.S., nilai penyertaan bersih Perusahaan pada perusahaan asosiasi tersebut akan terpengaruh. Perusahaan mengakui perubahan dalam penyertaan bersih pada perusahaan asosiasi tersebut dengan mengkreditkan akun "Selisih Kurs atas Penjabaran Laporan Keuangan."

g. Properti Investasi

Properti Investasi merupakan investasi dalam properti yang dicatat sebesar biaya perolehan dan disajikan sebesar harga pasar. Laba atau rugi yang belum direalisasi dari selisih harga pasar diakui pada periode berjalan.

Penurunan nilai investasi yang bersifat permanen mengurangi nilai tercatatnya dan kerugian yang timbul diakui pada periode berjalan.

h. Hutan Tanaman

Hutan Tanaman (HT) diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu HT Dalam Pengembangan dan HT Siap Panen. HT Dalam Pengembangan dinyatakan sebesar nilai investasi/pembangunannya yang meliputi biaya perencanaan, penanaman, pemeliharaan tanaman, serta biaya-biaya tidak langsung lainnya seperti biaya administrasi dan umum, biaya penelitian dan pengembangan, amortisasi/penyusutan beban tangguhan/aset tetap dan kapitalisasi biaya pinjaman yang dipakai dalam pendanaan pembangunan hutan. HT Dalam Pengembangan dicatat sebagai aset tidak lancar dan tidak disusutkan.

HT Dalam Pengembangan direklasifikasi menjadi HT Siap Panen pada saat tanaman siap dipanen. Jangka waktu tanaman dapat dimanfaatkan ditentukan oleh pertumbuhan vegetatif dan berdasarkan keputusan manajemen. HT Siap Panen dicatat sebesar biaya perolehan saat reklasifikasi dilakukan, dan didepresiasi sesuai dengan luas tebang atau unit produksi/volumenya.

Untuk pinjaman yang tidak secara khusus ditentukan penggunaannya, jumlah bunga pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset tertentu. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman dari seluruh pinjaman terkait dalam periode tertentu, dengan mengecualikan jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk pembangunan aset tertentu.

i. Aset Tetap

1) Aset tetap, kecuali aset tertentu selain untuk untuk pembangunan HT yang dinilai kembali, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

- 2) Biaya perolehan mencakup pengeluaran untuk perbaikan, penggantian, pemugaran dan peningkatan daya guna aset tetap yang jumlahnya signifikan serta selisih kurs tertentu atas kewajiban yang timbul untuk perolehan aset tetap.
- 3) Aset tetap tertentu yang digunakan dalam kegiatan usaha telah dinilai kembali berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai independen pada tanggal 31 Desember 20X2 sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Penyusutan dihitung dengan cara sebagai berikut :

Jenis Aset	Metode	Masa Manfaat (tahun)	Tarif
Bangunan dan prasarana	Garis lurus	20	-
Kendaraan	Garis lurus	20	-
Jalan dan Jembatan	Garis lurus	20	-
Mesin dan peralatan	Saldo-menurun ganda	-	15%
Alat berat	Saldo-menurun ganda	-	15%
Peralatan kantor	Saldo-menurun ganda	-	25%

Tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak disusutkan.

Aset Hak Kelola merupakan aset tetap yang dibangun dan dimanfaatkan oleh perusahaan selama masa perizinan dan diserahkan kepada negara pada akhir masa perizinan. Aset Hak Kelola yang diserahkan kepada negara dikeluarkan dari kelompok aset tetap sebesar nilai bukunya dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam operasi periode yang bersangkutan.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap sebesar nilai bukunya dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam operasi periode yang bersangkutan.

4) Sewa

Transaksi sewa dikelompokkan sebagai *finance lease* apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a) Sewa mengalihkan kepemilikan asset kepada *lessee* pada akhir masa sewa;
- b) *Lessee* memiliki hak opsi untuk membeli asset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan opsi memang dapat dilaksanakan;
- c) Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan;
- d) Pada awal masa sewa, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan; dan
- e) Aset sewaan bersifat khusus dan dimana hanya *lessee* yang dapat menggunakannya tanpa perlu modifikasi yang material.

Transaksi sewa yang tidak memenuhi salah satu kriteria tersebut di atas dikelompokkan sebagai transaksi sewa operasi (*operating lease*).

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Menurut metode *finance lease*, aset yang disewa disajikan dalam akun "Aset Tetap", sedangkan kewajibannya dilaporkan dalam akun "Hutang Sewa". Penyusutan dihitung dengan cara sebagai berikut:

Jenis Aset	Metode	Masa Manfaat (tahun)	Tarif
Komputer dan peralatan	Saldo-menurun ganda	-	25%
Alat berat	Saldo-menurun ganda	-	25%

Laba atas transaksi jual dan sewa-balik (*sale and leaseback*) dengan *finance lease*, ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sisa manfaat aset sewa yang bersangkutan dengan menggunakan metode saldo-menurun ganda untuk mesin dan peralatan atau metode garis lurus untuk peralatan pengangkutan.

Aset sewa dan hutang sewa dicatat sebesar nilai kini dari seluruh pembayaran minimum. Aset sewa disajikan sebagai bagian aset tetap dan disusutkan berdasarkan metode dan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

5) Aset dalam Pembangunan

Aset dalam pembangunan meliputi bangunan dan prasarana lainnya, yang dinyatakan berdasarkan biaya pembangunan, biaya pegawai langsung, biaya tidak langsung dalam pembangunan tersebut dan biaya-biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai aset selama masa pembangunan. Akumulasi biaya aset dalam pembangunan akan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan dan kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat pembangunan selesai dan aset tersebut siap untuk dipergunakan.

j. Hutan Restorasi Ekosistem

Hutan Restorasi Ekosistem (HRE) diklasifikasikan menjadi HRE dalam pengembangan dan HRE. HRE dalam pengembangan dinyatakan sebesar harga perolehan, yang terdiri dari biaya penanaman, pemeliharaan, pembinaan hutan, biaya administrasi dan umum yang berkaitan langsung, dan kapitalisasi biaya pinjaman yang dipakai dalam pendanaan. HRE dalam pengembangan dicatat sebagai aset tidak lancar dan belum diamortisasi.

HRE dalam pengembangan direklasifikasi menjadi HRE pada saat telah tercapai keseimbangan ekosistem. Jangka waktu keseimbangan ekosistem ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan terkait. HRE dicatat sebesar biaya perolehan saat reklasifikasi dilakukan dan dibebankan ke HPP atau diamortisasi (untuk HRE-Hak Kelola) sesuai dengan metode garis lurus (*straight-line method*) selama taksiran masa ekonomis atau sisa masa konsesi, mana yang lebih pendek.

k. Aset Tidak Berwujud

Hak paten dinyatakan sebesar harga perolehannya dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama xx tahun.

Merek dagang dinyatakan sebesar harga perolehannya dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama xx tahun.

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Biaya pengembangan yang dapat didistribusikan kepada produk atau proses yang memberi manfaat keekonomian masa depan ditangguhkan dan diamortisasikan dengan metode garis lurus selama masa lima tahun.

1. Aset Lain-lain

Terdiri dari aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam pos-pos sebelumnya dan tidak cukup material disajikan dalam pos tersendiri. Termasuk dalam aset lain-lain adalah beban tangguhan dan aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha.

Beban tangguhan terutama terdiri dari biaya dalam kegiatan perencanaan, pemenuhan kewajiban kepada negara yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, pengurusan legal hak atas tanah dan biaya tangguhan lainnya.

Beban yang terjadi sehubungan dengan pengurusan legal hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah. Beban tangguhan lainnya diamortisasi selama masa manfaat masing-masing.

Aset lain-lain disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan setelah dikurangi dengan amortisasi dan penurunan nilai. Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha dinyatakan sebesar harga perolehan dan tetap disusutkan.

m. Penurunan Nilai Aset

Perusahaan mengakui rugi penurunan nilai aset apabila taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) dari suatu aset lebih rendah dari nilai tercatatnya. Pada setiap tanggal neraca, Perusahaan melakukan penelaahan untuk menentukan apakah terdapat indikasi pemulihan penurunan nilai. Pemulihan penurunan nilai diakui sebagai laba pada periode terjadinya pemulihan.

n. Restrukturisasi Hutang Bermasalah

Keuntungan bersih atas restrukturisasi hutang setelah memperhitungkan Pajak Penghasilan terkait diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya restrukturisasi dan diklasifikasikan sebagai pos luar biasa, setelah memperhitungkan hutang kontinjen yang timbul dari restrukturisasi.

o. Pengakuan Pendapatan

Penjualan dalam negeri diakui pada saat barang diserahkan kepada pelanggan, sedangkan penjualan ekspor diakui sesuai persyaratan penjualan (*FOB shipping point atau destination*).

p. Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Perusahaan dan anak perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Definisi pihak istimewa adalah sesuai dengan PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa".

Semua transaksi dengan pihak hubungan istimewa telah diungkapkan pada Catatan 57 atas laporan keuangan.

Transaksi antara perusahaan dan anak perusahaan dengan pemerintah Indonesia termasuk setiap entitas yang dikendalikan oleh pemerintah dan

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

antara perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki dari hasil *debt to equity swaps*, tidak diungkapkan sebagai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

q. Biaya Pinjaman

Biaya atas pinjaman yang digunakan untuk membiayai pembangunan atau pemasangan aset dalam pembangunan dikapitalisasi. Beban keuangan ini mencakup beban bunga, selisih kurs, amortisasi premi swap dan biaya pinjaman lainnya. Kapitalisasi biaya-biaya pinjaman ini dihentikan pada saat pembangunan aset tetap telah selesai dan siap untuk digunakan.

r. Pajak Penghasilan

Perusahaan menerapkan metode penangguhan pajak dalam menghitung Pajak Penghasilan. Penangguhan Pajak Penghasilan dilakukan untuk mencerminkan pengaruh pajak atas beda waktu antara pelaporan komersial dan fiskal, yang terutama menyangkut penyusutan, bagian atas laba (rugi) bersih perusahaan asosiasi, beban pensiun, penyisihan persediaan usang serta penyisihan piutang ragu-ragu.

s. Imbalan Kerja

Perusahaan memberikan program pensiun manfaat pasti untuk semua karyawan tetapnya. Perusahaan juga membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003.

Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode "*Projected-Unit-Credit*". Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui yang melebihi jumlah yang lebih besar antara 10% dari nilai kini imbalan pasti dan 10% nilai wajar aset program (*corridor test*), diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut.

Biaya masa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak (*vested*), dan jika belum menjadi hak (*non vested*) akan diakui sebagai beban selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi *vested* dengan metode garis lurus.

Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasti di neraca merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui, biaya masa lalu yang belum diakui, dan nilai wajar aset program.

Perusahaan juga memberikan program pensiun iuran pasti untuk sebagian karyawan tetap yang akan mencapai usia pensiun pada tahun 20X8. Iuran yang ditanggung perusahaan diakui sebagai beban pada periode berjalan.

Perusahaan juga memberikan program Multipemberi Kerja dan Jaminan Sosial untuk sebagian karyawan tidak tetap. Program-program ini termasuk dalam kategori program iuran pasti sehingga memiliki kebijakan akuntansi yang sama dengan program iuran pasti.

Perusahaan juga memberikan premi asuransi untuk program imbalan pasca kerja (Imbalan yang Dijamin). Program imbalan pasca kerja yang dijamin adalah program iuran pasti sehingga memiliki kebijakan akuntansi yang sama dengan program iuran pasti.

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Perusahaan juga memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa imbalan cacat permanen untuk seluruh karyawan tetap. Program ini termasuk dalam kategori program imbalan pasti sehingga memiliki kebijakan akuntansi yang sama dengan program imbalan pasti, namun tidak memperhitungkan biaya jasa lalu.

Perusahaan menawarkan kepada xx orang karyawan untuk melakukan pengunduran diri secara sukarela. Besarnya pesangon diukur berdasarkan jumlah karyawan yang diperkirakan akan menerima tawaran tersebut dan diakui sebagai beban dan kewajiban pada periode berjalan. Jika pesangon tersebut jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca, besarnya pesangon didiskontokan sesuai dengan tingkat bunga pasar pada tanggal neraca.

t. Opsi Saham

Perusahaan telah memberikan opsi saham kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif dengan kriteria tertentu dalam program *Employee Stock Option Plan (ESOP)*. Jumlah biaya kompensasi saham diakui dalam "Beban Gaji dan Tunjangan".

Beban kompensasi diakui selama periode pengakuan hak kompensasi (*vesting period*) berdasarkan nilai wajar semua opsi saham pada tanggal pemberian (*grant date*).

Nilai wajar dari opsi saham dinilai berdasarkan laporan hasil penilaian aktuarial dengan menggunakan metode *Black Scholes*.

u. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban serta pengungkapan komitmen dan kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi.

v. Kuasi-reorganisasi

Berdasarkan PSAK No. 51 (Revisi 2003), "Akuntansi kuasi-reorganisasi", kuasi-reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur perusahaan untuk merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan kewajibannya, tanpa melalui reorganisasi secara hukum.

Aset dan kewajiban dinilai kembali sebesar nilai wajarnya dan dapat menghasilkan peningkatan atau penurunan aset bersih dibandingkan dengan nilai tercatat sebelum penilaian kembali. Saldo akumulasi kerugian dieliminasi dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- 1) cadangan umum;
- 2) cadangan khusus;
- 3) selisih penilaian aset dan kewajiban ;
- 4) tambahan modal setoran dan sejenisnya;
- 5) modal saham.

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Penentuan nilai wajar aset dan kewajiban perusahaan dalam rangka kuasi-reorganisasi ini dilakukan berdasarkan nilai pasar pada tanggal kuasi. Apabila nilai pasar tidak tersedia atau tidak menggambarkan nilai wajar yang sebenarnya, estimasi nilai wajar dilakukan dengan mempertimbangkan harga aset sejenis, atau dengan model arus kas diskontoan.

w. Laba/Rugi Bersih per Saham

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama periode yang bersangkutan, setelah memperhitungkan pengaruh penawaran umum terbatas. Jumlah rata-rata tertimbang saham yang telah disesuaikan adalah sebanyak xxx saham dan xxx saham untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X8 dan 20X7.

Laba bersih per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh selama periode yang bersangkutan, berdasarkan asumsi bahwa semua opsi telah dilaksanakan dan seluruh hutang obligasi konversi (lihat Catatan 41) telah dikonversikan. Untuk perhitungan tersebut, laba bersih disesuaikan dengan mengeliminasi beban bunga dan rugi kurs atas hutang obligasi konversi, serta pengaruh pajak yang bersangkutan.

x. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang terjadi dikredit atau dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk rugi kurs yang dikapitalisasi sebagai bagian dari Aset dalam Pembangunan. Kurs yang digunakan untuk menjabarkan aset dan kewajiban moneter adalah kurs beli dan kurs jual PT Bank ABC, di mana Perusahaan melakukan sebagian besar transaksi valuta asing, yaitu sebesar Rp xxx dan Rp xxx untuk A.S.\$ 1,00 per 31 Desember 20X8 serta Rp xxx dan Rp xxx untuk A.S.\$ 1,00 per 31 Desember 20X7. Sebagai pembandingan atas kurs yang digunakan tersebut, kurs beli dan kurs jual wesel ekspor Bank Indonesia (untuk satu dolar AS), masing-masing sebesar Rp xxx dan Rp xxx per 31 Desember 20X8 serta Rp xxx dan Rp xxx per 31 Desember 20X7.

y. Instrumen Derivatif

Instrumen derivatif dicatat sebesar nilai wajarnya. Laba atau rugi yang timbul dari penerapan metode penilaian menurut nilai wajar (*mark to market*) dikredit atau dibebankan pada usaha periode berjalan.

Laba atau rugi dari derivatif lindung nilai atas nilai wajar diakui sebagai laba atau rugi periode berjalan dan saling hapus dengan laba atau rugi akibat risiko aset/kewajiban yang dilindungi pada periode yang sama.

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Laba atau rugi yang timbul dari transaksi valuta berjangka (*forward contracts*) ditangguhkan dan diperhitungkan bersama dengan transaksi valuta asing yang bersangkutan apabila kontrak tersebut dimaksudkan untuk dan efektif sebagai lindung nilai dari suatu komitmen valuta asing yang mengikat. Beban yang terjadi dalam penutupan kontrak tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktu kontrak.

z. Informasi Segmen

Informasi Segmen disajikan menurut ketentuan PSAK No. 5 (revisi) tentang Akuntansi Segmen dengan mengadopsi segmen usaha sebagai bentuk pelaporan segmen primer dan segmen geografis berdasarkan lokasi aset sebagai bentuk pelaporan segmen sekunder.

Segmen yang dilaporkan telah memenuhi uji 10% signifikansi maupun uji 75% signifikansi.

3. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	20X8		20X7	
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (lihat Catatan 58)				
Kas dan Bank:				
PT Bank EFRG	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
PT Bank GMSA		xxx.xxx		xxx.xxx
Bank lainnya		xxx.xxx		xxx.xxx
Deposito Berjangka:				
PT Bank EFRG		xxx.xxx		xxx.xxx
PT Bank GMSA		xxx.xxx		xxx.xxx
Bank lainnya		xxx.xxx		xxx.xxx
Pihak ketiga				
Bank:				
PT Bank ABC		xxx.xxx		xxx.xxx
PT Bank SHGA		xxx.xxx		xxx.xxx
Bank lainnya		xxx.xxx		xxx.xxx
Deposito Berjangka:				
PT Bank ABC		xxx.xxx		xxx.xxx
PT Bank SHGA		xxx.xxx		xxx.xxx
Bank lainnya		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

Semua deposito berjangka merupakan deposito berjangka dalam Rupiah, kecuali deposito berjangka pada PT Bank EFRG (A.S.\$ x.xxx) dan sebagian deposito berjangka pada PT Bank SHGA (A.S.\$ x.xxx) pada tahun 20X8 dan pada PT Bank GMSA (DM x.xxx) pada tahun 20X7, yang merupakan deposito berjangka dalam mata uang asing.

Deposito berjangka dalam Rupiah memperoleh bunga per tahun berkisar antara xx% sampai xx% pada tahun 20X8 dan antara xx% sampai xx% pada tahun 20X7, sedangkan deposito berjangka dalam mata uang asing memperoleh bunga per tahun berkisar antara xx% sampai xx% pada tahun 20X8 dan antara xx% sampai xx% pada tahun 20X7.

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

4. INVESTASI JANGKA PENDEK

Akun ini terdiri dari:

	20X8	20X7
Deposito Berjangka		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (lihat Catatan 60)		
PT Bank EFRG	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
PT Bank GMSA	xxx.xxx	xxx.xxx
Bank lainnya	xxx.xxx	xxx.xxx
Pihak ketiga		
PT Bank ABC	xxx.xxx	xxx.xxx
PT Bank SHGA	xxx.xxx	xxx.xxx
Bank lainnya	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx

Penempatan pada Efek

	20X8	20X7
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (lihat Catatan 60)		
Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo (nilai nominal):		
Obligasi PT CBA	xxx.xxx	xxx.xxx
Dikurangi:		
Premi (diskonto) yang belum diamortisasi	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Bersih	xxx.xxx	xxx.xxx
Pihak ketiga		
Efek yang diperdagangkan (nilai wajar):		
- Saham PT AA	xxx.xxx	xxx.xxx
- Saham PT BB	xxx.xxx	xxx.xxx
- Saham lainnya	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx
Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo (nilai nominal):		
Surat berharga komersial PT HHH	xxx.xxx	xxx.xxx
Dikurangi:		
Premi (diskonto) yang belum diamortisasi	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Bersih	xxx.xxx	xxx.xxx

Yang harus diungkapkan adalah pemisahan antara jenis investasi sementara deposito atau surat berharga (efek), yaitu :

	20X8	20X7
Efek yang tersedia untuk dijual (harga perolehan):		
Saham PT FFF	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Dikurangi:		
- Penyisihan penurunan nilai yang belum direalisasi	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
- Penurunan nilai pasar permanen	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Bersih	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Peringkat yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek atas obligasi PT CBA dan surat berharga PT HHH masing-masing adalah C dan A untuk tahun 20X8 serta C dan B untuk tahun 20X7.

Deposito dalam mata uang asing berjumlah A.S.\$ xxx.xxx dan DM xx.xxx pada tahun 20X8 dan A.S.\$ xxx.xxx pada tahun 20X7 (lihat Catatan 61).

Deposito berjangka dalam Rupiah memperoleh bunga per tahun berkisar antara xx% sampai xx% pada tahun 20X8 dan antara xx% sampai xx% pada tahun 20X7, sedangkan deposito berjangka dalam mata uang asing memperoleh bunga per tahun berkisar antara xx% sampai xx% pada tahun 20X8 dan antara xx% sampai xx% pada tahun 20X7.

Deposito berjangka jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan September 20X9

Deposito berjangka dalam dolar A.S. pada PT Bank EFRG digunakan sebagai jaminan atas hutang kepada PT Bank ABC (lihat Catatan 35).

Nilai wajar efek ditentukan dari nilai pasar, kecuali untuk surat berharga PT HHH yang nilai pasarnya tidak tersedia, ditentukan dengan metode perkiraan nilai.

Dalam rangka meningkatkan likuiditas, pada tahun 20X8 perusahaan menjual investasi efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dengan nilai nominal Rp xxx.xxx.xxx dan diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp xxx.xxx. Laba yang timbul dari penjualan efek tersebut adalah sebesar Rp xxx.xxx

5. WESEL TAGIH

Akun ini merupakan wesel yang diterbitkan pelanggan, berasal dari penjualan produk Perusahaan kepada pihak ketiga yang pelunasannya akan dilakukan dalam waktu kurang dari satu tahun. Rincian wesel tagih pada tanggal 31 Desember 20X8 dan 20X7 adalah sebagai berikut:

	20X8	20X7
PT CMIN	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
PT SRWA	xxx.xxx	xxx.xxx
PT LNBA	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>

Semua wesel tagih merupakan wesel tagih dalam Rupiah dan akan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan Maret 20X9. Suku bunga wesel tagih berkisar antara xx% sampai xx% per tahun pada tahun 20X8 dan antara xx% sampai xx% per tahun pada tahun 20X7.

Perusahaan tidak membentuk penyisihan wesel tagih ragu-ragu untuk wesel tagih kepada pihak ketiga.

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

6. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (lihat Catatan 60)

	20X8		20X7	
PT Antara Sakti Prima	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
PT Jaya Setia (A.S.\$ x.xxx)		xxx.xxx		xxx.xxx
PT Rapindo Aman (A.S.\$ x.xxx pada tahun 20X8 dan A.S.\$ x.xxx pada tahun 20X7)		xxx.xxx		xxx.xxx
Lain-lain		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx
Dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Bersih	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

Rincian umur piutang dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

	20X8		20X7	
Sampai dengan 1 bulan	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
> 1 bulan – 3 bulan		xxx.xxx		xxx.xxx
> 3 bulan – 6 bulan		xxx.xxx		xxx.xxx
> 6 bulan – 1 tahun		xxx.xxx		xxx.xxx
> 1 tahun		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu adalah sebagai berikut:

	20X8		20X7	
Saldo awal periode	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Perubahan selama periode berjalan				
Penambahan penyisihan		xxx.xxx		xxx.xxx
Penghapusan piutang		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Saldo akhir periode	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

Perusahaan membentuk penyisihan piutang ragu-ragu untuk piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang mengalami kesulitan keuangan akibat menurunnya kegiatan ekonomi.

Pihak ketiga

	20X8		20X7	
PT Setiraya Perdana	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
PT Ramico Abadi (DM x.xxx)		xxx.xxx		xxx.xxx
PT Selaras Agung (A.S.\$ x.xxx pada tahun 20X8 dan A.S.\$ x.xxx pada tahun 20X7)		xxx.xxx		xxx.xxx
Lain-lain		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx
Dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Bersih	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Rincian umur piutang dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

	20X8		20X7	
Sampai dengan 1 bulan	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
> 1 bulan – 3 bulan		xxx.xxx		xxx.xxx
> 3 bulan – 6 bulan		xxx.xxx		xxx.xxx
> 6 bulan – 1 tahun		xxx.xxx		xxx.xxx
> 1 tahun		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu adalah sebagai berikut:

	20X8		20X7	
Saldo awal periode	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Perubahan selama periode berjalan				
Penambahan penyisihan		xxx.xxx		xxx.xxx
Penghapusan piutang		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Saldo akhir periode	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan piutang ragu-ragu cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha di kemudian hari.

Piutang usaha dalam mata uang asing berjumlah A.S.\$ xxx.xxx dan DM xx.xxx pada tahun 20X8 dan A.S.\$ xxx.xxx dan DM xx.xxx pada tahun 20X7 (lihat Catatan 61).

Piutang pada pihak ketiga sejumlah Rp xxx.xxx pada tahun 20X8 digunakan sebagai agunan pinjaman jangka pendek dari PT Bank Antar Data (lihat Catatan 23).

Piutang usaha sebesar A.S.\$ x.xxx yang berasal dari penjualan ekspor ke Amerika Latin dijual dengan *recourse* kepada PT Faktor Indonesia. Besarnya retensi adalah xx%. Piutang tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 20X9. Perusahaan memberikan beban diskonto sebesar Rp xxx.xxx atas penjualan piutang tersebut.

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari piutang:

	20X8		20X7	
Piutang Karyawan	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Piutang Bunga		xxx.xxx		xxx.xxx
Lain-lain		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx
Dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Bersih	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan piutang ragu-ragu cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang lainnya.

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

8. PERSEDIAAN

Persediaan terdiri dari :

	20X8	20X7
Persediaan Barang Jadi		
Hasil hutan kayu	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Hasil hutan bukan kayu	xxx.xxx	xxx.xxx
Hasil kayu olahan	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>
Persediaan dalam proses		
Hasil hutan kayu	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Hasil hutan bukan kayu	xxx.xxx	xxx.xxx
Hasil kayu olahan	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>
Bahan baku dan pembantu:		
Benih	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Bibit	xxx.xxx	xxx.xxx
Pupuk	xxx.xxx	xxx.xxx
Obat-obatan	xxx.xxx	xxx.xxx
Alat-alat pembibitan (polibag, polytube dll)	xxx.xxx	xxx.xxx
Suku Cadang	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>
Perlengkapan Lainnya	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Jumlah	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>
Dikurangi penyisihan bahan baku dan pembantu	Rp (xxx.xxx)	Rp (xxx.xxx)
Bersih	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>

Selain persediaan bahan baku dan pembantu, manajemen tidak melakukan penyisihan terhadap persediaan usang dan langsung membebankan pada periode berjalan.

Seluruh persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi sebesar Rp xxx.xxx cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran dan risiko lainnya yang mungkin dialami Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 20X8, persediaan senilai Rp xxx.xxx dijadikan agunan untuk memperoleh pinjaman jangka pendek pada PT Bank Antar Data. (lihat Catatan 23).

9. PAJAK DIBAYAR DI MUKA

Akun ini terdiri dari:

	20X8	20X7
Pajak Penghasilan badan lebih bayar	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Pajak Pertambahan Nilai	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>

Tagihan pajak merupakan saldo restitusi Pajak Penghasilan badan tahun 20X7, yang telah disetujui akan dikembalikan oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) tertanggal 28 Desember 20X8 (lihat Catatan 27).

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

10. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Akun ini terdiri dari:

	20X8	20X7
Jasa manajemen	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Beban kantor	xxx.xxx	xxx.xxx
Sewa	xxx.xxx	xxx.xxx
Asuransi	xxx.xxx	xxx.xxx
Lain-lain	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>

11. ASET LANCAR LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari uang muka untuk pembelian bahan baku dan bahan pembantu.

	20X8	20X7
Uang Muka Pembelian Bahan Baku	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Uang Muka Pembelian Bahan Pembantu	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>

12. PIUTANG HUBUNGAN ISTIMEWA

Akun ini terdiri dari (lihat Catatan 61):

Piutang Lain-lain dan Wesel Tagih

	20X8	20X7
PT Spelling Megah Indonesia (perusahaan afiliasi)	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
PT Aero Agribisnis Indonesia (perusahaan afiliasi)	xxx.xxx	xxx.xxx
Lain-lain	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx
Dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Bersih	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>

Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu adalah sebagai berikut:

	20X8	20X7
Saldo awal periode	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Perubahan selama periode berjalan		
Penambahan penyisihan	xxx.xxx	xxx.xxx
Penghapusan piutang	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Saldo akhir periode	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>

Akun ini merupakan pinjaman yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pinjaman yang diberikan dikenakan bunga berkisar antara xx,xx% sampai xx,xx% per tahun dan belum ditentukan tanggal pelunasannya.

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Perusahaan membentuk penyisihan piutang ragu-ragu untuk piutang hubungan istimewa dengan PT Aero Agribisnis Indonesia tertanggal xx bulan xx tahun xx sejumlah Rp xxx.xxx, karena perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan akibat menurunnya kegiatan ekonomi.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan piutang ragu-ragu cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang tersebut di kemudian hari.

13. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI

Akun ini merupakan investasi pada perusahaan asosiasi dengan metode ekuitas (lihat Catatan 60) sebagai berikut:

20X8:

Perusahaan Asosiasi	Persentase Pemilikan (%)	Nilai penyertaan awal periode	Perubahan selama periode berjalan			Nilai penyertaan akhir periode
			Penambahan (Pengurangan) Penyertaan	Bagian laba (rugi) bersih	Penerimaan dividen	
PT Nusaraya	xx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
PT Citarum	xx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
PT Bersahaja	xx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah						xxx.xxx
Dikurangi:						
- Penurunan nilai pasar permanen – PT Bersahaja Bersih						(xxx.xxx)
						<u>Rp xxx.xxx</u>

20X7:

Perusahaan Asosiasi	Persentase Pemilikan (%)	Nilai penyertaan awal periode	Perubahan selama periode berjalan			Nilai penyertaan akhir periode
			Penambahan (Pengurangan) Penyertaan	Bagian laba (rugi) bersih	Penerimaan dividen	
PT Nusaraya	xx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
PT Citarum	xx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
PT Bersahaja	xx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah						xxx.xxx
Dikurangi:						
- Penurunan nilai pasar permanen – PT Bersahaja Bersih						(xxx.xxx)
						<u>Rp xxx.xxx</u>

PT Nusaraya

Sejak 20X6, Perusahaan melakukan penyertaan pada PT Nusaraya sebanyak xxx saham yang merupakan xx,xx% hak pemilikan. Pada 20X8 Perusahaan menambah penyertaan pada PT Nusaraya sehingga pemilikan Perusahaan bertambah menjadi xx,xx%. PT Nusaraya bergerak dalam bidang usaha penjualan DOC dan distribusi di wilayah Jakarta.

PT Citarum

Perusahaan memiliki xxx saham PT Citarum yang merupakan xx,xx% hak pemilikan sejak 20X7. PT Citarum bergerak dalam bidang usaha produksi alat-alat pertanian.

Pada tahun 20X8, PT Citarum mengubah mata uang pelaporannya dari Rupiah menjadi dolar A.S.. Kenaikan penyertaan Perusahaan pada PT Citarum sebesar Rp x.xxx, yang berasal dari penjabaran laporan keuangan PT Citarum ke Rupiah untuk tujuan pelaporan dengan metode ekuitas, dilaporkan sebagai “Selisih Kurs atas Penjabaran Laporan Keuangan” pada neraca (lihat Catatan 45).

PT Bersahaja

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

PT Bersahaja

Sejak 19X0, Perusahaan melakukan penyertaan pada PT Bersahaja sebanyak xxx saham dengan hak pemilikan sebesar xx,xx%. PT Bersahaja bergerak dalam bidang usaha penjualan obat-obatan tanaman.

Pada bulan Juni 20X7, PT Bersahaja menerbitkan xxx saham baru (merupakan hak pemilikan sebesar xx,xx%) dengan nilai nominal Rp xxx per saham kepada PT ABA dengan harga Rp xxx.xxx. Penerbitan saham baru tersebut mengakibatkan pemilikan Perusahaan turun menjadi xx,xx%. Sebagai akibat dari transaksi ini, penyertaan bersih Perusahaan pada PT Bersahaja meningkat sebesar Rp xx.xxx. Kenaikan penyertaan bersih tersebut setelah memperhitungkan pengaruh pajak adalah sebesar Rp x.xxx yang dilaporkan sebagai "Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Asosiasi" pada neraca (lihat Catatan 46).

14. HT SIAP PANEN

HT Siap Panen terdiri dari:

	Saldo		Perubahan selama Periode Berjalan		Saldo
	Awal	Akhir	*) Penambahan	**) Pengurangan	Akhir
20X8					
Biaya Perolehan:					
Kayu Pertukangan	Rp xxx.xxx		Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Karet	xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Akumulasi depresiasi :					
Kayu Pertukangan	Rp xxx.xxx		Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Karet	xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Nilai Buku	Rp xxx.xxx		Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
20X7					
Biaya Perolehan:					
Kayu Pertukangan	Rp xxx.xxx		Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Karet	xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Akumulasi depresiasi:					
Kayu Pertukangan	Rp xxx.xxx		Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Karet	xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Nilai Buku	Rp xxx.xxx		Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx

*) Penambahan adalah mutasi baru atas pemindahan dari HT dalam pengembangan

**) Pengurangan adalah merupakan depresiasi atau nilai HT yang dipanen

Rincian HT Siap Panen menurut lokasi operasi perusahaan adalah sebagai berikut:

Lokasi	20X8		20X7	
	(dalam Ha)	(dalam Rp)	(dalam Ha)	(dalam Rp)
Kota X	x.xxx	Rp xxx.xxx	x.xxx	Rp xxx.xxx
Kota Y	x.xxx	xxx.xxx	x.xxx	xxx.xxx
Jumlah	xx.xxx	Rp xxx.xxx	xx.xxx	Rp xxx.xxx

UT Sign

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

HT Siap Panen seluas xx Ha di Kalimantan Barat digunakan sebagai jaminan atas hutang jangka pendek (lihat Catatan 23), hutang bank jangka panjang (lihat Catatan 35) dan hutang obligasi (lihat Catatan 39).

15. HT DALAM PENGEMBANGAN

HTI dalam pengembangan terdiri dari:

	20X8		20X7	
Saldo Awal	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Penambahan Investasi		xxx.xxx		xxx.xxx
Reklasifikasi ke HT Siap Panen		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Penghapusan Lain		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Saldo Akhir		xxx.xxx		xxx.xxx

Penambahan Biaya HT Dalam Pengembangan:

	20X8		20X7	
Biaya penanaman	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Pemeliharaan		xxx.xxx		xxx.xxx
Pembinaan hutan		xxx.xxx		xxx.xxx
Administrasi dan Umum Langsung		xxx.xxx		xxx.xxx
Kapitalisasi biaya pinjaman		xxx.xxx		xxx.xxx
Saldo Akhir		xxx.xxx		xxx.xxx

HT Dalam Pengembangan tersebar di berbagai lokasi operasi perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Lokasi	20X8		20X7	
	(dalam Ha)	(dalam Rp)	(dalam Ha)	(dalam Rp)
Kota X	x.xxx	Rp xxx.xxx	x.xxx	Rp xxx.xxx
Kota Y	x.xxx	xxx.xxx	x.xxx	xxx.xxx
Jumlah	xx.xxx	Rp xxx.xxx	xx.xxx	Rp xxx.xxx

HT Dalam Pengembangan akan lebih informatif kalau disajikan per tahun tanam yang meliputi informasi : (1) luas pembangunan per tahun tanam, (2) nilai kumulatif per tahun tanam/klas perusahaan.

Informasi kondisi tegakan yang meliputi : (1) riap pertumbuhan, (2) taksasi volume, (3) nilai pasar/harga kayu.

HT dalam pengembangan terdiri dari :

	20X8		20X7	
Kayu Pertukangan	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Karet		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah		xxx.xxx		xxx.xxx

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

HT Dalam Pengembangan ini dibangun berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.xx/Kpts-xx/20X7 tanggal xx Jan 20X7 dan yang terakhir No. xxx/Kpts-xx/20X7 tanggal xx Maret 20X7 dengan izin pembangunan seluas xxx.xxx Ha-.

Seluruh HT Dalam Pengembangan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran, wabah penyakit dan resiko lainnya. Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi sebesar Rp xxx.xxx cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran, wabah penyakit dan risiko lainnya yang mungkin dialami Perusahaan.

Manajemen berpendapat bahwa untuk HT Dalam Pengembangan tidak perlu dilakukan pencadangan karena telah diasuransikan.

16. HRE

HRE terdiri dari HRE dan HRE-Hak Kelola yang masing-masing diungkapkan sebagai berikut:

20X8	Perubahan selama Periode Berjalan			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	
Biaya Perolehan:				
Zona Lindung*	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Zona Produksi	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Akumulasi Amortisasi*:				
Zona Lindung*	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Zona Produksi	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Nilai Buku	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx

20X7	Perubahan selama Periode Berjalan			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	
Biaya Perolehan:				
Zona Lindung*	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Zona Produksi	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Akumulasi Amortisasi*:				
Zona Lindung*	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Zona Produksi	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Nilai Buku	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx

*Hanya terdapat pada HRE-Hak Kelola

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Rincian HRE dan HRE-Hak Kelola masing-masing menurut lokasi operasi perusahaan adalah sebagai berikut:

Lokasi	20X8		20X7	
	(dalam Ha)	(dalam Rp)	(dalam Ha)	(dalam Rp)
Pasaman Utara	x.xxx	Rp xxx.xxx	x.xxx	Rp xxx.xxx
Pasaman Barat	x.xxx	xxx.xxx	x.xxx	xxx.xxx
Jumlah	xx.xxx	Rp xxx.xxx	xx.xxx	Rp xxx.xxx

17. HRE DALAM PENGEMBANGAN

HRE dalam pengembangan terdiri dari HRE dalam Pengembangan dan HRE dalam Pengembangan-Hak Kelola yang masing-masing diungkapkan sebagai berikut:

	20X8		20X7	
Saldo Awal	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Penambahan Biaya		xxx.xxx		xxx.xxx
Reklasifikasi ke HRE/HRE-Hak Kelola		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Penghapusan Lain		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Saldo Akhir		xxx.xxx		xxx.xxx

Penambahan Biaya HRE dalam Pengembangan/HRE dalam Pengembangan-Hak Kelola :

	20X8		20X7	
Penyiapan jalur tanam	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Penanaman/pengayaan		xxx.xxx		xxx.xxx
Pemeliharaan		xxx.xxx		xxx.xxx
Restorasi habitat flora fauna pilihan		xxx.xxx		xxx.xxx
Penanaman Tanah Kosong Eks TPn/TPK/Jalan sarad		xxx.xxx		xxx.xxx
Penanaman Kiri Kanan Jalan/Kanan Kiri Sungai		xxx.xxx		xxx.xxx
Administrasi dan Umum Langsung		xxx.xxx		xxx.xxx
Kapitalisasi biaya pinjaman		xxx.xxx		xxx.xxx
Saldo Akhir		xxx.xxx		xxx.xxx

HRE dalam Pengembangan/HRE dalam Pengembangan-Hak Kelola tersebar di berbagai lokasi operasi perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Lokasi	20X8		20X7	
	(dalam Ha)	(dalam Rp)	(dalam Ha)	(dalam Rp)
Pasaman Utara	x.xxx	Rp xxx.xxx	x.xxx	Rp xxx.xxx
Pasaman Barat	x.xxx	xxx.xxx	x.xxx	xxx.xxx
Jumlah	xx.xxx	Rp xxx.xxx	xx.xxx	Rp xxx.xxx

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

HRE dalam pengembangan terdiri dari HRE dalam Pengembangan dan HRE dalam Pengembangan-Hak Kelola yang masing-masing diungkapkan sebagai berikut:

Zona	20X8		20X7	
	(dalam Ha)	(dalam Rp)	(dalam Ha)	(dalam Rp)
Zona lindung	x.xxx	Rp xxx.xxx	x.xxx	Rp xxx.xxx
Zona produksi	x.xxx	xxx.xxx	x.xxx	xxx.xxx
Jumlah	xx.xxx	Rp xxx.xxx	xx.xxx	Rp xxx.xxx

18. PROPERTI INVESTASI

	20X8		20X7	
	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Nilai Perolehan	Nilai Wajar
Tanah	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx
Bangunan	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx
Jumlah	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx

Nilai wajar investasi tanah dan bangunan ditetapkan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pada tahun 20X8, bangunan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp x.xxx.xxx. Pada tanggal 31 Desember 20X8 dan 20X7, manajemen Perusahaan berpendapat tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai tercatat tanah dan bangunan.

19. INVESTASI JANGKA PANJANG LAIN

Akun ini terdiri dari:

	20X8		20X7	
Efek hutang dimiliki hingga jatuh tempo	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Efek ekuitas tersedia untuk dijual		xxx.xxx		xxx.xxx
Penyertaan saham dicatat dengan metode biaya		xxx.xxx		xxx.xxx
Investasi dalam properti		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

a. Efek hutang dimiliki hingga jatuh tempo

	20X8		20X7	
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (lihat Catatan 58)				
Obligasi PT CBA (Rp xxx.xxx dan A.S.\$ x.xxx pada tahun 20X8 dan A.S.\$ xxx pada tahun 20X7)	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Dikurangi:				
Premi (diskonto) yang belum diamortisasi		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Bersih		xxx.xxx		xxx.xxx
Pihak Ketiga				
Surat berharga komersial PT HHH		xxx.xxx		xxx.xxx
Dikurangi:				
Premi (diskonto) yang belum diamortisasi		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Bersih		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Obligasi PT CBA dalam Rupiah memperoleh bunga tetap per tahun sebesar xx,xx% yang dibayarkan tiap tiga bulan dan akan jatuh tempo pada bulan Agustus 20X7. Obligasi dalam dolar A.S memperoleh bunga tetap per tahun sebesar xx,xx% yang dibayarkan tiap empat bulan dan akan jatuh tempo pada bulan Juni 20X4.

Peringkat atas obligasi PT CBA dan surat berharga PT HHH telah dilakukan oleh PT Pemingkat Efek (lihat Catatan 4).

Untuk Obligasi PT CBA, perusahaan mensyaratkan PT CBA untuk melakukan pencadangan dana untuk pelunasan obligasi sebagai berikut :

Tanggal	Jumlah
16 Maret 20X8	Rp xxx.xxx
16 Maret 20X9	xxx.xxx
16 Maret 20Y0	xxx.xxx
16 Maret 20Y1	xxx.xxx
16 Maret 20Y2	xxx.xxx

b. Efek ekuitas yang tersedia untuk dijual

	20X8	20X7
Saham PT ZYX	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Dikurangi:		
- Penyisihan penurunan nilai yang belum direalisasi	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
- Penurunan nilai pasar permanen	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Bersih	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx

Nilai wajar efek ditentukan dari nilai pasar.

Pada tanggal xx bulan xx tahun 20X8, perusahaan memindahkan kategori investasi efek ekuitas PT XYZ dari efek diperdagangkan menjadi efek tersedia untuk dijual.

c. Penyertaan saham yang dicatat dengan metode biaya

Akun ini merupakan penyertaan saham pada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (lihat Catatan 60) sebagai berikut:

		20X8			
Persentase Pemilikan (%)	Jumlah Penyertaan Awal Periode	Penambahan	Pengurangan	Jumlah Penyertaan Akhir Periode	
PT Panturaya	xx,xx	Rp xxxxx	Rp xxxxx	Rp xxxxx	
PT Pertaraya	xx,xx	xxxxx	Xxxxx	xxxxx	
PT Percaraya	xx,xx	xxxxx	Xxxxx	xxxxx	
Jumlah	Rp xxxxx	Rp xxxxx	Rp xxxxx	Rp xxxxx	
Dikurangi penurunan permanen nilai penyertaan	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)	
Bersih	Rp xxxxx	Rp xxxxx	Rp xxxxx	Rp xxxxx	

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

	Persentase Pemilikan (%)	20X7			
		Jumlah Penyertaan Awal Periode	Penambahan	Pengurangan	Jumlah Penyertaan Akhir Periode
PT Panturaya	xx,xx	Rp xxxxx	Rp xxxxx	Rp xxxxx	Rp xxxxx
PT Pertaraya	xx,xx	xxxxx	Xxxxx	xxxxx	xxxxx
PT Percaraya	xx,xx	xxxxx	Xxxxx	xxxxx	xxxxx
Jumlah		<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>	<u>Rp xxxxx</u>
Dikurangi penurunan permanen nilai penyertaan Bersih		(xxx.xxx) <u>Rp xxxxx</u>	(xxx.xxx) <u>Rp xxxxx</u>	(xxx.xxx) <u>Rp xxxxx</u>	(xxx.xxx) <u>Rp xxxxx</u>

Nilai wajar efek tidak dapat ditentukan karena tidak diperjualbelikan di pasar. Jumlah dividen kas yang diterima dari penyertaan dalam bentuk saham tersebut di atas adalah sebesar Rp xxx.xxx pada tahun 20X8 dan Rp xxx.xxx pada tahun 20X7.

d. Investasi dalam property

	20X8		20X7	
	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Tanah		xxx.xxx		xxx.xxx
Bangunan		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah	<u>Rp</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>Rp</u>	<u>xxx.xxx</u>

Investasi dalam properti merupakan harga perolehan tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. Obor Jakarta. Nilai wajar dari investasi dalam properti adalah sebesar Rp xxx.xxx pada tahun 20X8.

Investasi properti berupa tanah senilai Rp xxx.xxx pada tahun 20X8 digunakan sebagai agunan pinjaman jangka pendek Bank Centra Arta (Lihat catatan 23)

20. ASET TETAP

Rincian aset tetap dalam kelompok besar dan merupakan lampiran saja adalah sebagai berikut:

20X8	Saldo Awal	Perubahan selama Periode Berjalan		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Nilai Tercatat :				
Pemilikan langsung:				
Tanah	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Bangunan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Mesin dan peralatan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Alat berat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Peralatan kantor	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub jumlah	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>
Aset Hak Kelola:				
Jalan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Jembatan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub jumlah	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>
Aset sewa:				
Mesin dan peralatan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Alat berat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub jumlah	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>
Bangunan dan prasarana dalam pembangunan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah Nilai Tercatat	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Akumulasi Penyusutan:

Pemilikan langsung:

Bangunan dan prasarana	Rp	Rp	Rp	Rp
Mesin dan peralatan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Alat berat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Peralatan kantor	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx

Aset Hak Kelola:

Jalan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Jembatan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx

Aset Sewa:

Mesin dan peralatan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Alat berat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx

Jumlah Akumulasi Penyusutan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
-----------------------------	---------	---------	---------	---------

Nilai Buku	Rp	Rp	Rp	Rp
	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx

20X7	Saldo Awal	Perubahan selama Periode Berjalan Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
------	------------	---	-------------	-------------

Nilai Tercatat :

Pemilikan langsung:

Tanah	Rp	Rp	Rp	Rp
Bangunan dan prasarana	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Mesin dan peralatan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Alat berat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Peralatan kantor	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx

Aset Hak Kelola:

Jalan	xxx.xxx			xxx.xxx
Jembatan	xxx.xxx			xxx.xxx
Sub jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx

Aset Sewa:

Mesin dan peralatan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Alat berat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx

Bangunan dan prasarana dalam pembangunan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
--	---------	---------	---------	---------

Jumlah Nilai Tercatat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
-----------------------	---------	---------	---------	---------

Akumulasi Penyusutan:

Pemilikan langsung:

Bangunan dan prasarana	Rp	Rp	Rp	Rp
Mesin dan peralatan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Alat berat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Peralatan kantor	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx

Aset Hak Kelola:

Jalan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Jembatan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Aset Sewa:				
Mesin dan peralatan		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Alat berat		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub jumlah		xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	Akumulasi	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Penyusutan				
Nilai Buku		Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx

Pengurangan aset tetap merupakan penjualan aset dengan rincian sebagai berikut:

	20X8	20X7
Nilai buku	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Harga jual	xxx.xxx	xxx.xxx
Laba (rugi) penjualan aset tetap	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx

Pembebanan penyusutan tahun 20X8 dan 20X7 adalah sebagai berikut:

	20X8	20X7
Harga Pokok Produksi	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Beban Umum dan Administrasi	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx

Rincian aset tetap yang digunakan dalam pemanfaatan hutan adalah sebagai berikut :

20X8	Nilai Buku	Jumlah (unit)	Peruntukan
Nama aset	Rp xxx.xxx	xxx	Loging
Nama aset	xxx.xxx	xxx	Loging
Nama aset	xxx.xxx	xxx	Industri
Nama aset	xxx.xxx	xxx	Industri
Nama aset	xxx.xxx	xxx	HTI
Jumlah	Rp xxx.xxx	xxx	
20X7	Nilai Buku	Jumlah (unit)	Peruntukan
Nama aset	Rp xxx.xxx	xxx	Loging
Nama aset	xxx.xxx	xxx	Loging
Nama aset	xxx.xxx	xxx	Industri
Nama aset	xxx.xxx	xxx	Industri
Nama aset	xxx.xxx	xxx	HTI
Jumlah	Rp xxx.xxx	xxx	

Perusahaan melakukan penilaian kembali aset tetap tertentu pada tanggal 31 Desember 20X8. Penilaian kembali dilakukan oleh PT Appraisal Indo selaku penilai independen dengan menggunakan metode xxxxxx. Penilaian kembali tersebut dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah. Rincian hasil penilaian kembali aset yang dicatat oleh Perusahaan pada tahun 20X8 adalah sebagai berikut:

	Penilaian Kembali	Nilai Tercatat	Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap
Tanah	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Bangunan dan prasarana	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Mesin dan peralatan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Alat berat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Peralatan kantor	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx

Penilaian kembali tersebut telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Keputusan No. XXX tanggal 23 Jan 20X9.

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Perusahaan merubah estimasi masa guna dari aset tetap pada awal tahun 20X8. Rincian hasil perubahan estimasi masa guna yang dilakukan oleh perusahaan pada tahun 20X8 adalah sebagai berikut :

Jenis Aset	Masa Manfaat sebelum perubahan	Masa Manfaat setelah perubahan
Mesin dan peralatan	25	20
Alat berat	6	4

Rincian bangunan dan prasarana dalam pembangunan pada tanggal 31 Desember 20X8 dan 20X7 adalah sebagai berikut:

20X8	Persentase Penyelesaian	Akumulasi Biaya	Estimasi Penyelesaian
Bangunan:			
- Gudang suku cadang	xx%	Rp xxx.xxx	Desember 20Y0
- Perumahan karyawan	xx	xxx.xxx	Januari 20X9
Prasarana:			
- Jalan	xx	xxx.xxx	April 20X9
Jumlah		Rp xxx.xxx	
20X7	Persentase Penyelesaian	Akumulasi Biaya	Estimasi Penyelesaian
Bangunan:			
- Perumahan karyawan	xx%	Rp xxx.xxx	Januari 20X9
- Gedung satpam	xx	xxx.xxx	Maret 20X8
Prasarana:			
- Saluran air	xx	xxx.xxx	Agustus 20X8
Jumlah		Rp xxx.xxx	

Biaya pinjaman berupa bunga dan beban keuangan lain yang dikapitalisasi sebagai bagian dari bangunan dan prasarana dalam pembangunan berjumlah Rp xxx.xxx dan Rp xxx.xxx masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X8 dan 20X7. Termasuk dalam beban keuangan lain adalah rugi kurs sebesar Rp xxx.xxx dan Rp xxx.xxx masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X8 dan 20X7.

Pada tanggal 15 Mei 20X7, salah satu bagian area di Kota X mengalami kebakaran. Pada bulan Agustus 20X8, tagihan klaim asuransi tersebut diselesaikan dengan jumlah yang disetujui oleh perusahaan asuransi sebesar Rp xxx.xxx. Perusahaan membukukan rugi kerusakan akibat kebakaran sebesar Rp xxx.xxx yang merupakan bagian yang tidak tertutup oleh perusahaan asuransi sebagai "Pos Luar Biasa - kerugian kebakaran" (lihat Catatan 58).

Sebagian tanah, baik yang digunakan maupun belum digunakan dalam kegiatan usaha, sedang dalam proses pengurusan balik nama menjadi atas nama Perusahaan.

Tanah, bangunan, mesin dan peralatan digunakan sebagai jaminan atas hutang jangka pendek (lihat Catatan 23), hutang bank jangka panjang (lihat Catatan 35) dan hutang obligasi (lihat Catatan 39).

Aset tetap senilai Rp xxx.xxx diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

21. ASET TAK BERWUJUD

Rincian aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:

20X8	Hak Paten	IUPHHK	Biaya Pengembangan
Saldo Awal Periode	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Penambahan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Penghentian dan Pelepasan	(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Rugi Penurunan Nilai	(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Amortisasi	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Saldo Akhir Periode	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>

20X7	Hak Paten	IUPHHK	Biaya Pengembangan
Saldo Awal Periode	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Penambahan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Penghentian dan Pelepasan	(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Rugi Penurunan Nilai	(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Amortisasi	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Saldo Akhir Periode	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>

Hak paten berasal dari pengukuhan paten atas pemrosesan karet yang diciptakan oleh Perusahaan. Paten ini telah dikukuhkan sejak tahun 19W5.

IUPHHK diperoleh sejak tahun 19W9. Biaya pengembangan merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengembangkan karet ramah lingkungan.

Jumlah amortisasi yang dibebankan pada tahun 20X8 dan 20X7 masing-masing berjumlah Rp xxx.xxx dan Rp xxx.xxx.

22. ASET LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	20X8	19X1
Uang muka investasi	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Aset tetap yang tidak digunakan dalam usaha	xxx.xxx	xxx.xxx
Beban tangguhan	xxx.xxx	xxx.xxx
Biaya pra-operasi – bersih	xxx.xxx	xxx.xxx
Uang muka pembelian aset tetap	xxx.xxx	xxx.xxx
Sarana dan prasarana	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>

Uang muka investasi berasal dari perjanjian pendirian perusahaan patungan antara Perusahaan dengan PT X. Perusahaan akan melakukan kontribusi yang tidak dapat dibatalkan sebesar Rp xxx.xxx yang akan diperhitungkan sebagai setoran modal Perusahaan dalam perusahaan patungan tersebut. Pada 20X7, Perusahaan telah melakukan pembayaran sebesar Rp xxx.xxx yang untuk sementara dicatat sebagai "Uang Muka Investasi".

Perusahaan mereklasifikasi aset tetap yang tidak digunakan dalam usaha menjadi aset lain-lain pada tahun 20X8.

Aset tetap yang tidak digunakan dalam usaha terdiri dari bangunan dan prasarana yang berlokasi di Jakarta yang tidak digunakan dalam proses produksi dan dimaksudkan untuk dijual. Aset tersebut memiliki nilai buku sebesar Rp xxx.xxx dan perkiraan nilai realisasi bersih sebesar Rp xxx.xxx.

Dibaca

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Beban tanggungan adalah biaya dalam kegiatan perencanaan, pemenuhan kewajiban kepada negara yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun pada HT. Beban amortisasi atas beban tanggungan sebesar Rp xxx.xxx untuk tahun 20X8 dan Rp xxx.xxx untuk tahun 20X7.

Beban amortisasi atas biaya pra-operasi sebesar Rp xxx.xxx untuk tahun 20X8 dan Rp xxx.xxx untuk tahun 20X7.

Uang muka pembelian aset tetap berasal dari pembelian mesin dan peralatan untuk area konsesi di Kalimantan Tengah.

23. PINJAMAN JANGKA PENDEK

Akun ini terdiri dari:

	20X8	20X7
Hutang Bank		
Pihak Ketiga		
PT Bank Aman Selalu (A.S.\$ x.xxx pada tahun 20X8 dan A.S.\$ x.xxx pada tahun 20X7)	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
PT Bank Bahasa	xxx.xxx	xxx.xxx
PT Bank Antar Data	xxx.xxx	xxx.xxx
PT Bank Centra Arta	xxx.xxx	xxx.xxx
San San Bank (Yen x.xxx pada tahun 20X8 dan Yen x.xxx pada tahun 20X7)	xxx.xxx	xxx.xxx
Bank lainnya	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx
Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa (lihat Catatan 60)		
PT Bank Setia Selalu (A.S.\$ x.xxx pada tahun 20X8 dan A.S.\$ x.xxx pada tahun 20X7)	xxx.xxx	xxx.xxx
PT Bank Antar Duta	xxx.xxx	xxx.xxx
San Sei Bank (Yen x.xxx pada tahun 20X8 dan Yen x.xxx pada tahun 20X7)	xxx.xxx	xxx.xxx
Bank lainnya	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx
Cerukan – Pihak ketiga		
The Bank of Tokyo (Yen x.xxx pada tahun 20X8 dan Yen xxx pada tahun 20X7)	xxx.xxx	xxx.xxx
The Bank of Korea (Won x.xxx)	xxx.xxx	xxx.xxx
Bank Antar Devisa (A.S.\$ x.xxx)	xxx.xxx	xxx.xxx
Bank lainnya	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx

Pinjaman dalam Rupiah dikenakan bunga dengan tingkat bunga tahunan berkisar antara xx% sampai xx% pada tahun 20X8 dan antara xx% sampai xx% pada tahun 20X7. Pinjaman dalam mata uang asing dikenakan bunga dengan tingkat bunga tahunan berkisar antara xx% sampai xx% pada tahun 20X8 dan antara xx% sampai xx% pada tahun 20X7.

Hutang jangka pendek pada PT Bank Antar Data sejumlah Rp xxx.xxx pada tahun 20X8 dijamin dengan piutang usaha, persediaan barang jadi dan aset tetap tertentu Perusahaan (lihat Catatan 6, 8 dan 17). Hutang jangka pendek ini akan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan Oktober 20X9.

Hutang jangka pendek pada PT Bank Centra Arta sejumlah Rp xxx.xxx pada tahun 20X8 dijamin dengan investasi properti tanah (lihat Catatan 6, 8 dan 19). Hutang jangka pendek ini akan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan Oktober 20X9.

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Perjanjian hutang dengan PT Bank Bahasa mensyaratkan Perusahaan untuk tidak membagikan dividen selama kewajiban terhadap PT Bank Bahasa belum diselesaikan kecuali Perusahaan telah mencadangkan sebagian dari saldo laba sejumlah yang dipersyaratkan.

Fasilitas cerukan yang diperoleh Perusahaan dikenakan bunga yang berkisar antara xx% sampai xx% pada tahun 20X8 dan antara xx% sampai xx% pada tahun 20X7.

24. WESEL BAYAR

Akun ini terdiri dari:

Pemegang Wesel	20X8	20X7
PT Anda Makmur (A.S.\$ x.xxx pada tahun 20X8 dan A.S.\$ x.xxx pada tahun 20X7)	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
PT Surya Andal	xxx.xxx	xxx.xxx
PT Tangguh Jaya	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>

Wesel bayar di atas terutama berasal dari transaksi pembelian bahan bibit tanaman dari pihak ketiga.

Wesel bayar dikenakan bunga berkisar antara xx% sampai xx% pada tahun 20X8 dan xx% sampai xx% pada tahun 20X7. Wesel bayar ini akan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan September 20X9.

25. HUTANG USAHA

Akun ini merupakan kewajiban yang timbul atas pembelian bibit tanaman dan bahan pembantu, dengan rincian sebagai berikut:

	20X8	20X7
Pihak ketiga:	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (lihat Catatan 58):	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>

Rincian umur hutang dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

	20X8	20X7
Sampai dengan 1 bulan	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
> 1 bulan – 3 bulan	xxx.xxx	xxx.xxx
> 3 bulan – 6 bulan	xxx.xxx	xxx.xxx
> 6 bulan – 1 tahun	xxx.xxx	xxx.xxx
> 1 tahun	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>

Rincian hutang usaha menurut jenis mata uang adalah sebagai berikut:

	20X8	20X7
Dolar A.S. (A.S.\$ x.xxx pada tahun 20X8 dan A.S.\$ x.xxx pada tahun 20X7)	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Yen Jepang (Yen x.xxx pada tahun 20X8 dan Yen x.xxx pada tahun 20X7)	xxx.xxx	xxx.xxx
Rupiah	xxx.xxx	xxx.xxx
Mark Jerman (DM x.xxx pada tahun 20X8 dan DM x.xxx pada tahun 20X7)	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

26. HUTANG PROVISI SUMBER DAYA HUTAN

Akun ini terdiri dari :

	20X8	20X7
Produksi:		
Hasil Hutan Kayu	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Hasil Hutan bukan Kayu	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>

Jumlah ini adalah saldo hutang PSDH yang belum dibayar oleh perusahaan per 31 Desember 20X7 dan 20X8.

27. HUTANG DANA REBOISASI

Akun ini terdiri dari :

	20X8	20X7
Produksi:		
Tegakan	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Kayu sitaan	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>

Hasil hutan kayu yang tidak dikenakan dana reboisasi adalah hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman yaitu sejumlah Rp xxx.xxx untuk tahun 20X8 dan Rp xxx.xxx untuk tahun 20X7.

28. HUTANG SISTEM SILVIKULTUR

Hutang sistem silvikultur ini adalah merupakan taksiran biaya atas sisa kewajiban kegiatan pembinaan hutan sesuai RKT yang diterbitkan baik atas RKT tahun berjalan ataupun RKT tahun-tahun sebelumnya yang belum dilaksanakan oleh perusahaan.

Rincian hutang TPTI berdasarkan fisik dan rupiah:

20X8	Saldo Awal		Mutasi selama periode berjalan		Saldo Akhir	
	(Ha)	Rupiah	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	(Ha)	Rupiah
Penataan areal kerja	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Inventarisasi tegakan sebelum penebangan	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pembukaan wilayah hutan	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Penebangan	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Perapihan	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Inventarisasi tegakan tinggal	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pembebasan tahap 1	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pengadaan bibit	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pengayaan/ rehabilitasi penanaman	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pemeliharaan, pengayaan dan Rehabilitasi						
▪ Pemeliharaan tahap 1	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
▪ Pemeliharaan tahap 2	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
▪ Pemeliharaan tahap 3	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pembebasan tahap 2	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pembebasan tahap 3	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Penjarangan tegakan tinggal dan perlindungan	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
dan pengamanan hutan	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	<u>xx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>xx.xxx</u>	<u>(xx.xxx)</u>	<u>xx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

	Mutasi selama periode berjalan				Saldo Akhir	
	Saldo Awal (Ha)	Rupiah	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	(Ha)	Rupiah
20X7						
Penataan areal kerja	xx.xxx		xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Inventarisasi tegakan sebelum penebangan	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pembukaan wilayah hutan Penebangan	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Perapihan	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Inventarisasi tegakan tinggal	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pembebasan tahap 1	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pengadaan bibit	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pengayaan/ rehabilitasi penanaman	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pemeliharaan, pengayaan dan Rehabilitasi						
▪ Pemeliharaan tahap 1	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
▪ Pemeliharaan tahap 2	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
▪ Pemeliharaan tahap 3	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pembebasan tahap 2	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Pembebasan tahap 3	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Penjarangan tegakan tinggal dan Perlindungan dan pengamanan hutan	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	xx.xxx	xxx.xxx	xx.xxx	(xx.xxx)	xx.xxx	xxx.xxx

29. HUTANG PAJAK

Akun ini terdiri dari:

	20X8		20X7	
Taksiran hutang Pajak Penghasilan, dikurangi pembayaran pajak di muka sebesar Rp xxx.xxx pada tahun 20X8 dan Rp xxx.xxx pada tahun 20X7	Rp	xxx.xxx	Rp	-
Pajak Penghasilan				
Pasal 21		xxx.xxx		xxx.xxx
Pasal 22		-		xxx.xxx
Pasal 23		xxx.xxx		xxx.xxx
Pasal 25		xxx.xxx		xxx.xxx
Pasal 26		xxx.xxx		xxx.xxx
Pajak Pertambahan Nilai		xxx.xxx		xxx.xxx
Pajak Tanah dan Bangunan		-		xxx.xxx
Jumlah	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

Pada tanggal 28 Desember 20X8, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penghasilan badan tahun 20X7, yang menyetujui pengembalian pajak sebesar Rp xxx.xxx, lebih kecil Rp xxx.xxx dari yang diajukan oleh Perusahaan (lihat Catatan 9).

30. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari :

	20X8		20X7	
Beban bunga	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Bonus		xxx.xxx		xxx.xxx
Gaji dan kesejahteraan karyawan		xxx.xxx		xxx.xxx
Lain-lain		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

31. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Akun ini terdiri dari :

	<u>20X8</u>	<u>20X7</u>
Pendapatan sewa diterima dimuka	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Uang muka penjualan	xxx.xxx	xxx.xxx
Lain-lain	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>

32. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM WAKTU SATU TAHUN

Akun ini terdiri dari :

	<u>20X8</u>	<u>20X7</u>
Hutang bank	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Hutang sewa guna usaha	xxx.xxx	xxx.xxx
Pinjaman dana reboisasi	xxx.xxx	xxx.xxx
Hutang obligasi	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>

33. KEWAJIBAN LANCAR LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	<u>20X8</u>	<u>20X7</u>
Garansi produk	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Biaya iklan	xxx.xxx	xxx.xxx
Lain-lain	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>

34. HUTANG HUBUNGAN ISTIMEWA

Akun ini terdiri dari (lihat Catatan 60):

	<u>20X8</u>	<u>20X7</u>
Wesel bayar	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Pendapatan diterima dimuka	xxx.xxx	xxx.xxx
Lain-lain	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>

35. PINJAMAN JANGKA PANJANG

Akun ini terdiri dari:

	<u>20X8</u>	<u>20X7</u>
Hutang Bank		
Mata Uang Asing:		
PT Bank ABC (A.S.\$ x.xxx pada tahun 20X8 dan A.S.\$ x.xxx pada tahun 20X7)	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
PT Bank XYZ (Yen x.xxx pada tahun 20X8 dan Yen x.xxx pada tahun 20X7)	xxx.xxx	xxx.xxx
PT Bank KLM (Yen x.xxx pada tahun 20X8 dan A.S.\$ x.xxx pada tahun 20X7)	xxx.xxx	xxx.xxx
PT Bank AAA (A.S.\$ x.xxx dan DM x.xxx)	-	xxx.xxx
Rupiah:		
PT Bank BBB	xxx.xxx	xxx.xxx
PT Bank CCC	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Bagian Jangka Panjang	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pada tahun 19W7, Perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Bank ABC dengan fasilitas maksimum sebesar A.S.\$ x.xxx. Pinjaman ini dijamin dengan deposito berjangka dalam dolar A.S. pada PT Bank EFRG (lihat Catatan 4) dan terhutang dalam 10 kali angsuran tengah tahunan yang dimulai tanggal 30 Juni 20X7 dengan tingkat bunga sebesar xx,xx% per tahun. Perjanjian pinjaman mensyaratkan antara lain untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu, mematuhi beberapa pembatasan dan membayar "Exposure Fee" ekuivalen dengan xx% dari jumlah pinjaman yang diperoleh kepada PT Bank X, yang bertindak sebagai agen. "Exposure Fee" yang telah dibayar oleh Perusahaan sebesar Rp xxx.xxx.

Pinjaman dari PT Bank XYZ merupakan pinjaman sindikasi yang diperoleh Perusahaan dengan fasilitas maksimum sebesar Yen x.xxx, di mana PT Bank XYZ bertindak sebagai agen. Jangka waktu pinjaman adalah tujuh (7) tahun termasuk dua setengah (2,5) tahun masa tenggang dengan tingkat bunga xx% di atas SIBOR per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan bangunan dan aset tetap lainnya yang berlokasi di Jakarta (lihat Catatan 20). Perjanjian ini mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu dan tanpa persetujuan tertulis dari Bank tidak diperkenankan menjual aset yang signifikan dan membeli aset atau investasi dengan nilai perolehan lebih dari Yen x.xxx, kecuali untuk pengembangan dan ekspansi pada usaha pemanfaatan hutan.

Pinjaman dari PT Bank KLM merupakan pinjaman sindikasi yang diperoleh Perusahaan dengan fasilitas maksimum sebesar Yen x.xxx, di mana Bank KLM bertindak sebagai agen dan telah jatuh tempo pada bulan Maret 20X8. Pinjaman ini diperbaharui sampai dengan bulan Maret 20X4 dengan fasilitas maksimum sebesar Yen x.xxx. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar xx% di atas SIBOR per tahun. Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan tidak diperkenankan untuk menjaminkan asetnya kecuali penjaminan yang sudah ada sebelum penandatanganan perjanjian tersebut dan menjual sebagian atau seluruh aset kecuali penjualan dalam kegiatan usaha yang normal dan telah mendapat persetujuan dari Bank. Perjanjian ini juga mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas bersih berwujud (tangible net worth) tidak lebih besar dari 2,5:1.

Pada tahun 20X6, Perusahaan memperoleh pinjaman sindikasi yang diatur oleh PT Bank AAA, yang terdiri dari pinjaman bersyarat sejumlah A.S.\$ x.xxx dan pinjaman revolving tiga tahun sejumlah DM x.xxx. Pinjaman bersyarat terhutang jatuh tempo pada 30 Januari 20X8. Pinjaman sindikasi tersebut dibebani bunga sebesar x,xx% di atas LIBOR per tahun. Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit, pinjaman yang diperoleh Perusahaan akan digunakan untuk membiayai pembelian mesin dan peralatan. Perjanjian pinjaman mensyaratkan Perusahaan antara lain untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu dan mematuhi beberapa pembatasan. Pada tanggal 30 September 20X8, pinjaman tersebut telah direstrukturisasi (lihat Catatan 64).

Pada tanggal 14 Februari 19X6, Perusahaan memperoleh fasilitas penerbitan wesel jangka menengah (negotiable medium-term notes) sebesar Rp xxx.xxx dari PT Bank BBB. Pinjaman tersebut dikenakan bunga tahunan berkisar antara xx,xx% sampai xx,xx%. Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan tidak diperkenankan menjaminkan asetnya kecuali penjaminan yang sudah ada sebelum penandatanganan perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut juga mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas bersih berwujud (tangible net worth) tidak lebih besar dari 2,5:1.

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Pada tahun 19X7, Perusahaan memperoleh fasilitas penerbitan wesel jangka menengah (medium-term notes) tanpa jaminan sejumlah Rp xxx.xxx dari PT Bank CCC. Fasilitas tersebut tersedia selama tiga tahun. Wesel yang diterbitkan berjumlah Rp xxx.xxx pada tahun 20X8 dan Rp xxx.xxx pada tahun 20X7 dengan tingkat bunga tahunan berkisar antara xx,xx% sampai xx,xx% pada tahun 20X8 dan xx,xx% sampai xx,xx% pada tahun 20X7. Sampai dengan 29 Januari 20X9, Perusahaan masih dalam proses negosiasi untuk menjadwalkan ulang pembayaran atas wesel yang dipegang oleh PT Bank CCC. Sehubungan dengan fasilitas ini Perusahaan dibatasi dalam beberapa hal, antara lain, dalam merubah lingkup usaha, melakukan merger, akuisisi atau konsolidasi dan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu.

36. HUTANG SEWA

<u>Perusahaan Sewa (lessor)</u>	<u>Jenis Aset</u>	<u>20X8</u>	<u>20X7</u>
PT Koreanindo Leasing	Mesin Fotocopy	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
PT Robert Financial Services	Alat-alat pengangkutan	xxx.xxx	xxx.xxx
PT LS Finance (A.S.\$ x.xxx pada tahun 20X8 dan A.S.\$ x.xxx pada tahun 20X7)	Alat-alat kantor	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah		xxx.xxx	xxx.xxx
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Bagian Jangka Panjang		Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx

Kewajiban sewa dijamin dengan aset sewa yang bersangkutan. Perjanjian sewa ini membatasi Perusahaan antara lain dalam melakukan penjualan dan pemindahan aset sewa.

Pembayaran sewa minimum masa datang (*future minimum lease payment*) dalam perjanjian sewa per 31 Desember 20X8 adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah
20X9	Rp xxx.xxx
20Y0	xxx.xxx
Jumlah	xxx.xxx
Dikurangi bagian bunga	(xxx.xxx)
Bersih	xxx.xxx
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(xxx.xxx)
Bagian Jangka Panjang	Rp xxx.xxx
Antara 1 - 5 tahun	xxx.xxx
Lebih dari 5 tahun	xxx.xxx

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

37. KEUNTUNGAN TANGGUHAN DARI ASET DIJUAL DAN SEWA-BALIK

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

20X8	Keuntungan Tanggungan Awal	Amortisasi	Keuntungan Tanggungan Akhir
Jenis Aset	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Alat berat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Mesin dan peralatan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
20X7	Keuntungan Tanggungan Awal	Amortisasi	Keuntungan Tanggungan Akhir
Jenis Aset	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Alat berat	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Mesin dan peralatan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx

38. PINJAMAN DANA REBOISASI

	20X8	20X7
Hutan tanaman	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Bagian Jangka Panjang	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx

Pinjaman dana reboisasi untuk hutan tanaman dengan nilai nominal Rp xxx.xxx diterima pada tanggal 2 Januari 20X6 dengan tingkat bunga tetap sebesar xx% dan akan jatuh tempo tanggal 2 Januari 20Y2. Pembayaran bunga dilakukan tahunan. Dalam pinjaman ini terdapat perjanjian yang mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas bersih berwujud (*tangible net worth*) tidak lebih besar dari 2,5:1.

39. HUTANG OBLIGASI

	20X8	20X7
Mata uang asing:		
Obligasi I (A.S.\$ x.xxx pada tahun 20X8 dan A.S.\$ x.xxx pada tahun 20X7)	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Obligasi II (A.S.\$ x.xxx pada tahun 20X8 dan A.S.\$ x.xxx pada tahun 20X7)	xxx.xxx	xxx.xxx
Rupiah:	20X8	20X7
Obligasi III	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Bagian Jangka Panjang	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx

Obligasi I dengan nilai nominal AS \$ x.xxx diterbitkan pada tanggal 1 Juli 20X7 dengan tingkat bunga tetap sebesar xx% dan akan jatuh tempo tanggal 1 Juli 20X6. Pembayaran bunga obligasi dilakukan semesteran. Dalam penerbitan obligasi ini terdapat perjanjian yang mensyaratkan Perusahaan untuk mempertahankan rasio jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas bersih berwujud (*tangible net worth*) tidak lebih besar dari 2,5:1.

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Obligasi II dengan nilai nominal AS \$ x.xxx diterbitkan pada tanggal 5 Januari 20X7 dengan tingkat bunga tetap sebesar xx% dan akan jatuh tempo tanggal 1 Januari 20X5. Pembayaran bunga obligasi dilakukan semesteran.

Direktur PT Bursa Efek Jakarta dalam Surat Keputusan No. S-xxx tertanggal 1 September 20X7 menyetujui pencatatan 770 lembar Obligasi III Perusahaan yang ditawarkan pada bulan September 20X7 dengan pokok obligasi sebesar Rp xxx.xxx. Bersamaan dengan penerbitan obligasi ini disertakan waran pisah (lihat Catatan 44).

Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 16 September 20Y5 dengan suku bunga triwulanan sebesar xx,xx% per tahun untuk tahun pertama dan x,xx% di atas rata-rata bunga deposito enam (6) bulanan dari PT Bank AAA, PT Bank ABC, PT Bank XYZ dan PT Bank KLM untuk tahun-tahun selanjutnya. Pada setiap tengah tahunan mulai tanggal 16 Maret 20X8 hingga 16 Maret 20Y5, Perusahaan diwajibkan menyisihkan dana pelunasan obligasi sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah
16 Maret 20X8	Rp xxx.xxx
16 September 20X8	xxx.xxx
16 Maret 20X9	xxx.xxx
16 September 20X9	xxx.xxx
16 Maret 20Y0	xxx.xxx
Jumlah akumulasi dana	Rp xxx.xxx

PT Bank AAA bertindak sebagai wali amanat. Obligasi tersebut dijamin dengan hak atas tanah, bangunan, pemindahan fidusier dari mesin dan peralatan pabrik (lihat Catatan 20) dan jaminan Perusahaan.

40. HUTANG SUBORDINASI

Akun ini merupakan hutang kepada PT Boga Ramanda Dwipa (pemegang saham) dalam Rupiah pada tahun 20X8 (lihat Catatan 60). Hutang ini dikenakan bunga sebesar x% per tahun dan disubordinasikan terhadap hutang Perusahaan kepada PT Bank AAA.

41. OBLIGASI KONVERSI

Akun ini terdiri dari:

	20X8	20X7
Obligasi konversi x% (A.S.\$ x.xxx pada tahun 20X8 dan 20X7)	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Obligasi konversi tanpa bunga (A.S.\$ x.xxx pada tahun 20X8 dan 20X7)	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx
Dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Bagian Jangka Panjang	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx

Pada tahun 20X6, Perusahaan menerbitkan dan mendaftarkan pada Bursa Efek Luxembourg, obligasi konversi (*convertible bonds*) sejumlah A.S.\$ x.xxx yang jatuh tempo pada tanggal 12 April 20X5.

Pada tahun 20X8, Perusahaan menerbitkan dan mendaftarkan pada Bursa Efek Luxembourg, obligasi konversi tanpa bunga (*zero coupon convertible bonds*) sejumlah A.S.\$ x.xxx yang jatuh tempo pada tanggal 26 Maret 20X7.

Hasil bersih penerbitan obligasi konversi xx% dan obligasi konversi tanpa bunga digunakan oleh Perusahaan untuk mendanai pembelian mesin.

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Ikhtisar persyaratan dan kondisi dari obligasi konversi tersebut adalah sebagai berikut:

	Obligasi Konversi xx% yang Diterbitkan pada Tahun 20X7	Obligasi Konversi Tanpa Bunga yang Diterbitkan pada Tahun 20X8
Jumlah	: A.S.\$ x.xxx	A.S.\$ x.xxx
Jangka waktu	: X tahun	X tahun
Harga obligasi konversi	: X% dari nilai nominal obligasi konversi	X% dari nilai nominal obligasi konversi
Bunga	: X% per tahun, setelah dipotong Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia, dengan pembayaran tahunan setiap tanggal 12 April	-
Masa konversi	: Konversi dapat dilakukan setiap saat pada atau setelah tanggal 22 Mei 20X9 sampai dengan tanggal 28 Maret 20Y1, kecuali sebelumnya telah dibayar atau dibeli kembali oleh Perusahaan	Konversi dapat dilakukan setiap saat pada atau setelah tanggal 26 Maret 20Y1 sampai dengan tanggal 12 Maret 20Y3, kecuali sebelumnya telah dibayar atau dibeli oleh Perusahaan
Rasio konversi	: Setiap xx lembar obligasi konversi dapat ditukarkan dengan xx lembar saham biasa	Setiap xx lembar obligasi konversi dapat ditukarkan dengan xx lembar saham biasa
Harga konversi	: Harga konversi pada saat obligasi ini diterbitkan adalah Rp xxx.xxx per saham dengan nilai pertukaran mata uang asing tetap pada saat konversi sebesar Rp xxx.xxx untuk A.S.\$ xxx. Harga konversi ini dapat berubah, tergantung pada penyesuaian yang dilakukan sehubungan dengan, antara lain, pengeluaran saham baru Perusahaan dan wesel bayar konversi lainnya. Pada tanggal 31 Desember 20X8, harga konversi adalah sebesar Rp xxx.xxx.	Harga konversi pada saat obligasi ini diterbitkan adalah Rp xxx.xxx per saham dengan nilai pertukaran mata uang asing tetap pada saat konversi sebesar Rp xxx.xxx untuk A.S.\$ x.xxx. Harga konversi ini dapat berubah, tergantung pada penyesuaian yang dilakukan sehubungan dengan, antara lain, pengeluaran saham baru Perusahaan dan wesel bayar konversi lainnya. Pada tanggal 31 Desember 20X8, harga konversi adalah sebesar Rp xxx.xxx.
Wali amanat	: PT Bank AAA	PT Bank AAA

Obligasi konversi tersebut telah mendapat rating xx dari PT Pefindo, Perusahaan pemeringkat efek.

Pada tahun 20X8, obligasi konversi tanpa bunga sejumlah A.S.\$ x.xxx (ekuivalen Rp xxx.xxx) telah dikonversi menjadi xxx saham (lihat Catatan 42). Apabila seluruh obligasi konversi menjadi saham, setiap pemegang 1.000 saham Perusahaan akan terdilusi sebesar xx%. Selisih antara nilai nominal saham Perusahaan dengan nilai perolehan obligasi dikredit pada "Tambahan Modal Disetor" sebesar Rp xxx.xxx.

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

42. IMBALAN KERJA

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Dalam program ini, imbalan pensiun yang akan dibayarkan dihitung berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Perusahaan, yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No Kep-xxx/KM.17/19X7 tanggal xx Juni 19X7 dan telah dicatat dalam buku daftar umum No. xx.xx.xxx DPPK tanggal xx Juli 19X7. Pendiri Dana Pensiun Perusahaan adalah PT Emiten Asuransi Kerugian Tbk dan anak perusahaan sebagai mitra pendiri.

Sumber pendanaan pada Dana Pensiun terutama berasal dari kontribusi karyawan dan Perusahaan. Kontribusi karyawan untuk tahun 20X8 dan 20X7 masing-masing sebesar Rp xx.xxx.xxx dan Rp xx.xxx.xxx atau sebesar x% dari gaji pokok dan sisanya ditanggung Perusahaan.

Beban imbalan pasca kerja yang diakui dalam laporan laba rugi adalah :

	20X8	20X7
Biaya jasa kini	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Biaya bunga	xxx.xxx	xxx.xxx
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui	xxx.xxx	(xxx.xxx)
Hasil yang diharapkan dari aset program	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Amortisasi biaya jasa lalu	xxx.xxx	xxx.xxx
Hasil yang diharapkan dari hak penggantian yang diakui sebagai aset	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Dampak dari adanya kurtailmen atau penyelesaian	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Jumlah	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>

Rekonsiliasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut :

	20X8	20X7
Saldo awal	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Biaya jasa kini	xxx.xxx	xxx.xxx
Biaya bunga	xxx.xxx	xxx.xxx
Imbalan yang dibayarkan	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang belum diakui	xxx.xxx	(xxx.xxx)
Saldo akhir	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>

Rekonsiliasi nilai wajar aset adalah sebagai berikut :

	20X8	20X7
Saldo awal	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Hasil aktual dari aset program	xxx.xxx	xxx.xxx
Kontribusi	xxx.xxx	xxx.xxx
Imbalan yang dibayarkan	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Hasil aktual atas hak penggantian yang diakui sebagai aset	xxx.xxx	xxx.xxx
Saldo akhir	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>

Rekonsiliasi nilai aset dan kewajiban yang diakui dalam neraca selama periode pelaporan adalah :

	20X8	20X7
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Nilai wajar aset	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang belum diakui	xxx.xxx	(xxx.xxx)
Biaya jasa lalu yang belum diakui	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Jumlah yang tidak diakui sebagai aset	xxx.xxx	xxx.xxx
Nilai wajar dari hak penggantian yang diakui sebagai aset	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Nilai kewajiban pada neraca	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Nilai kewajiban yang diakui dalam neraca adalah :

	20X8	20X7
Saldo awal	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Beban imbalan pasca kerja	xxx.xxx	xxx.xxx
Kontribusi	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Saldo akhir	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>
Nilai wajar aset terdiri dari :		
	20X8	20X7
Deposito berjangka	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Surat-surat berharga	xxx.xxx	xxx.xxx
Investasi saham jangka panjang	xxx.xxx	xxx.xxx
Lainnya	xxx.xxx	xxx.xxx
Saldo akhir	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>

Perhitungan beban pensiun berkala bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X8 dan 20X7 dilakukan oleh PT Aktuaris, sebagai aktuaris independen dengan menggunakan metode "Projected-Unit-Credit" dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:

	20X8	20X7
Tingkat diskonto	xx%	yy%
Hasil yang diharapkan dari aset program	xx%	yy%
Expected return on any reimbursement right recognized	xx%	yy%
Tingkat kenaikan gaji	xx%	yy%
Tingkat cacat	xx%	yy%
Tingkat pengunduran diri	xx%	yy%
Rata-rata sisa masa kerja di masa mendatang yang diharapkan (dalam tahun)		xx,x tahun

Perusahaan juga membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut masing-masing adalah xxx karyawan dan xxx karyawan pada tahun 20X8 dan 20X7.

Beban imbalan pasca kerja yang diakui dalam laporan laba rugi adalah :

	20X8	20X7
Biaya jasa kini	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Biaya bunga	xxx.xxx	xxx.xxx
Amortisasi biaya jasa lalu	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>
Rekonsiliasi nilai aset dan kewajiban yang diakui dalam neraca selama periode pelaporan adalah :		
	20X8	20X7
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang belum diakui	xxx.xxx	(xxx.xxx)
Biaya jasa lalu yang belum diakui	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Saldo akhir kewajiban	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>

Nilai kewajiban yang diakui dalam neraca adalah :

	20X8	20X7
Saldo awal	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Beban imbalan pasca kerja	xxx.xxx	xxx.xxx
Pembayaran imbalan	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Saldo akhir	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>

Perusahaan memberikan program pensiun iuran pasti untuk sebagian karyawan tetap yang akan mencapai usia pensiun pada tahun 20X8. Selain itu perusahaan juga memberikan program iuran pasti lainnya berupa Program Multipemberi Kerja, Program Jaminan Sosial, dan Imbalan yang Dijamin. Iuran yang ditanggung perusahaan diakui sebagai beban adalah sebagai berikut :

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

	20X8		20X7	
Program pasca kerja Iuran pasti	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Program Multipemberi Kerja		xxx.xxx		xxx.xxx
Program Jaminan Sosial		xxx.xxx		xxx.xxx
Imbalan yang Dijamin		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

Dari jumlah beban tersebut, yang masih harus dibayar dan diakui sebagai kewajiban pada tahun 20X8 dan 20X7 masing-masing adalah sebesar Rp xxx.xxx dan Rp xxx.xxx.

Pada tahun 20X8 terjadi penurunan produksi sehingga perusahaan menawarkan kepada xx orang karyawan untuk melakukan pengunduran diri secara sukarela. Jumlah karyawan yang akan menerima penawaran tersebut diperkirakan sebanyak xx orang, sehingga jumlah pesangon yang harus diakui sebagai beban adalah sebagai berikut :

	20X8		20X7	
Jangka pendek (kurang dari 12 bulan)	Rp	xxx.xxx	Rp	-
Jangka panjang (lebih dari 12 bulan)		xxx.xxx		-
Jumlah	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

Dari jumlah beban tersebut, yang masih harus dibayar dan diakui sebagai kewajiban pada tahun 20X8 dan 20X7 masing-masing adalah sebesar Rp xxx.xxx dan Rp xxx.xxx. Untuk kewajiban pesangon yang akan dibayarkan lebih dari 12 bulan didiskontokan dengan tingkat bunga xx%.

43. MODAL SAHAM

Susunan pemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 20X8 dan 20X7 berdasarkan catatan yang dibuat oleh PT Data Saham Perusahaan Tercatat, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	20X8		
	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan	Jumlah Modal
Saham seri A preferen			
PT Andata Sentosa Harum	xxx.xxx	x,xx%	Rp xxx.xxx
Saham seri B			
PT Andata Sentosa Harum	xxx.xxx	x,xx	xxx.xxx
PT Agung Sedayu Cendana	xxx.xxx	x,xx	xxx.xxx
PT Boga Ramanda Dwipa	xxx.xxx	x,xx	xxx.xxx
PT Harum Cendana Nusa	xxx.xxx	x,xx	xxx.xxx
PT Mustika Bakti Setya	xxx.xxx	x,xx	xxx.xxx
Bapak Susanto Haryawan (direktur)	xxx.xxx	x,xx	xxx.xxx
Bapak Askar Nurdin Halim (komisaris)	xxx.xxx	x,xx	xxx.xxx
Lain-lain (masing-masing dengan pemilikan kurang dari 5%)	xxx.xxx	x,xx	xxx.xxx
Jumlah	xxx.xxx	100,00%	Rp xxx.xxx

Pemegang Saham	20X7		
	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan	Jumlah Modal
Saham seri A preferen			
PT Andata Sentosa Harum	xxx.xxx	x,xx%	Rp xxx.xxx
Saham seri B			
PT Andata Sentosa Harum	xxx.xxx	x,xx	xxx.xxx
PT Agung Sedayu Cendana	xxx.xxx	x,xx	xxx.xxx
PT Boga Ramanda Dwipa	xxx.xxx	x,xx	xxx.xxx
PT Harum Cendana Nusa	xxx.xxx	x,xx	xxx.xxx
PT Mustika Bakti Setya	xxx.xxx	x,xx	xxx.xxx
Lain-lain (masing-masing dengan pemilikan kurang dari 5%)	xxx.xxx	x,xx	xxx.xxx
Jumlah	xxx.xxx	100,00%	Rp xxx.xxx

Dibuat pada tanggal

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Berdasarkan RUPS tanggal xx Maret 20X8, telah disetujui penjualan saham baru sebanyak xxx.xxx lembar senilai Rp xxx.xxx. Penjualan saham tersebut ditujukan untuk pendanaan bagi perluasan usaha.

Pada tahun 20X8, beberapa pemegang obligasi konversi dolar A.S. dan obligasi konversi Rupiah telah mengkonversikan obligasi mereka menjadi xxx saham Perusahaan (lihat Catatan 44). Konversi ini telah meningkatkan modal saham ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan menjadi xxx.xxx saham dan meningkatkan tambahan modal disetor sebesar Rp xxx.xxx.

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham pada tanggal 12 September 20X8 yang telah diaktakan dengan akta notaris Sutan Hakim Hassan, S.H. No. 12 tanggal 12 September 20X8, para pemegang saham Perusahaan telah memutuskan peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp xxx.xxx menjadi Rp xxx.xxx yang terbagi dalam xxx.xxx saham. Peningkatan modal dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. xxxx tanggal 16 September 20X8.

Perusahaan telah mencatatkan seluruh sahamnya pada Bursa Efek Jakarta.

44. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Akun ini terdiri dari agio saham, biaya emisi efek ekuitas, modal sumbangan, selisih kurs atas modal disetor dan modal disetor lainnya sebagai berikut:

	20X8	20X7
Agio saham	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Biaya emisi efek ekuitas	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Modal sumbangan	xxx.xxx	xxx.xxx
Selisih kurs atas modal disetor	xxx.xxx	xxx.xxx
Modal disetor lainnya	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>

Agio Saham

Agio saham berasal dari penawaran perdana yang dilakukan pada 20X6, penawaran umum terbatas I, II dan konversi obligasi, masing-masing sebesar Rp xxx.xxx, Rp xxx.xxx, Rp xxx.xxx dan Rp xxx.xxx.

Biaya Emisi Efek Ekuitas

Biaya emisi efek berasal dari penawaran perdana yang dilakukan pada 20X6, penawaran umum terbatas I dan II, masing-masing sebesar Rp xxx.xxx, Rp xxx.xxx dan Rp xxx.xxx.

Modal Sumbangan

Modal sumbangan berasal dari sumbangan pemegang saham berupa tanah dengan nilai Rp xxx.xxx.

Modal Disetor Lainnya

Modal Disetor lainnya berasal dari transaksi penerbitan waran pisah pada tanggal xx Juni 20X6 sejumlah xxx lembar yang bernilai Rp xxx.xxx. Waran dapat dikonversi menjadi xxx lembar saham biasa sampai dengan tanggal xx Juni 20X9. Sampai dengan 31 Desember 20X8, jumlah waran yang telah dikonversi sebanyak xxx lembar senilai Rp xxx.xxx.

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

45. SELISIH KURS ATAS PENJABARAN LAPORAN KEUANGAN

Akun ini berasal dari peningkatan penyertaan pada PT Citarum sebagai akibat penjabaran laporan keuangan dalam dolar A.S. ke Rupiah setelah memperhitungkan pengaruh pajak tangguhan sebesar Rp xxx.xxx (lihat Catatan 13).

46. SELISIH TRANSAKSI PERUBAHAN EKUITAS PERUSAHAAN ASOSIASI

Akun ini berasal dari peningkatan penyertaan pada PT Bersahaja sebagai akibat penjualan saham baru (selain xxx saham yang telah beredar) kepada pihak ketiga setelah memperhitungkan pengaruh pajak sebesar Rp xxx.xxx (lihat Catatan 13). Sampai dengan tanggal 31 Desember 20X8 belum ada selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi yang direalisasikan.

47. SELISIH TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

20X8	Tanggal	Entitas Asal	Entitas Tujuan	Nilai Buku	Harga Pengalihan	Selisih
Aset :						
Tanah	xx/xx/xx	PT M	PT J	Rp xx.xxx	Rp xx.xxx	Rp xx.xxx
Bangunan	xx/xx/xx	PT N	PT K	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx
Jumlah				Rp xx.xxx	Rp xx.xxx	Rp xx.xxx
Kewajiban :						
Obligasi	xx/xx/xx	PT O	PT L	Rp xx.xxx	Rp xx.xxx	Rp xx.xxx
Wesel	xx/xx/xx	PT P	PT W	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx
Jumlah				Rp xx.xxx	Rp xx.xxx	Rp xx.xxx
Jumlah Bersih				Rp xx.xxx	Rp xx.xxx	Rp xx.xxx

20X7	Tanggal	Entitas Asal	Entitas Tujuan	Nilai Buku	Harga Pengalihan	Selisih
Aset :						
Tanah	xx/xx/xx	PT M	PT J	Rp xx.xxx	Rp xx.xxx	Rp xx.xxx
Bangunan	xx/xx/xx	PT N	PT K	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx
Jumlah				Rp xx.xxx	Rp xx.xxx	Rp xx.xxx
Kewajiban :						
Obligasi	xx/xx/xx	PT O	PT L	Rp xx.xxx	Rp xx.xxx	Rp xx.xxx
Wesel	xx/xx/xx	PT P	PT W	xx.xxx	xx.xxx	xx.xxx
Jumlah				Rp xx.xxx	Rp xx.xxx	Rp xx.xxx
Jumlah Bersih				Rp xx.xxx	Rp xx.xxx	Rp xx.xxx

48. SELISIH PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP

(Lihat Catatan 20)

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

49. SALDO LABA

Sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham pada tahun 20X8 dan 20X7, Perusahaan mengalokasikan laba bersih tahun 20X7 dan 20X6, untuk tujuan sebagai berikut :

- Deklarasi dividen kas kepada para pemegang saham.
- Pembentukan cadangan umum.

Jumlah dividen yang diumumkan untuk masing-masing periode adalah sebagai berikut:

Periode	Jumlah	Per Saham
Deklarasi pada tahun 20X8 untuk laba tahun 20X7 Rp xxx		Rp xxx.xxx
Deklarasi pada tahun 20X7 untuk laba tahun 20X6 xxx		xxx.xxx

Pembentukan cadangan umum dari saldo laba berjumlah Rp xxx.xxx dan Rp xxx.xxx masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X8 dan 20X7. Pencadangan ini dibentuk untuk pelunasan kewajiban kepada PT Bank Bahasa.

Pada tahun 20X8 Perusahaan merubah metode penyusutan peralatan kantor dari garis lurus menjadi saldo menurun ganda. Perubahan ini mengakibatkan kenaikan terhadap saldo awal akumulasi penyusutan dan penurunan terhadap saldo laba tahun lalu sejumlah Rp xxx.xxx.

50. SAHAM DIPEROLEH KEMBALI

Sebagaimana diputuskan dalam RUPS tanggal xx Maret 20X8, telah disetujui perolehan kembali saham sejumlah xxx.xxx lembar. Transaksi saham diperoleh kembali selama tahun 20X8 adalah sebagai berikut

Tanggal	Keterangan	Jumlah lembar	Realisasi (%)	Harga Realisasi/lembar
XX/XX/20X8	Disetujui RUPS	xxx.xxx	-	
XX/XX/20X8	Realisasi I	xxx.xxx	Xx	Rp xxx.xxx
XX/XX/20X8	Realisasi II	xxx.xxx	Xx	xxx.xxx

Perusahaan mencatat transaksi saham diperoleh kembali menggunakan metode biaya perolehan (*Cost Method*).

51. WARAN

Pada tanggal 1 September 20X7 diterbitkan waran pisah yang menyertai Obligasi III sejumlah xxx lembar. Nilai wajar obligasi dan waran masing-masing senilai Rp xxx.xxx dan Rp xxx.xxx. Nilai wajar waran ditentukan dengan nilai pasarnya. (lihat Catatan 44)

Sampai dengan 31 Desember 20X8 belum ada waran yang ditukarkan. Apabila seluruh waran ditukarkan menjadi saham biasa, maka setiap pemegang saham perusahaan akan terdilusi sebesar xx%.

52. KOMPENSASI BERBASIS SAHAM

Pada tahun 19W5, Perusahaan menetapkan Program Insentif Opsi Saham (Program) untuk karyawan. Program tersebut terdiri dari opsi saham dan *Stock Appreciation Rights (SAR)*. Program ini berada di bawah pengendalian Komite Kompensasi yang terdiri dari Direksi Perusahaan, yang mempunyai

.....

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

kewenangan penuh atas pemberian opsi saham dan atau SAR. Anggota Direksi tidak ikut dalam program tersebut. Jumlah maksimum opsi saham dan atau SAR yang dapat diberikan berdasarkan Program ini adalah sebesar xxx opsi saham dan atau SAR. Harga eksekusi opsi saham adalah harga pasar Saham Seri B pada tanggal pemberian (*grant date*). Umumnya, opsi menjadi berhak (*vested*) dan dapat dieksekusi dari tahun kedua sampai tahun keempat dari tanggal pemberian.

Komite Kompensasi berhak berdasarkan pertimbangannya memberikan opsi dalam periode pengakuan hak kompensasi yang berbeda dari standar periode 4 tahun. Dalam beberapa kasus yang terbatas, Komite Kompensasi telah melaksanakan pemberian opsi dengan periode pengakuan hak kompensasi yang berbeda dari standar 4 tahun tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 20X8, terdapat tambahan xxx opsi yang diberikan berdasarkan Program ini. Rata-rata tertimbang nilai wajar dari opsi yang diberikan selama tahun 20X8 dan 20X7 masing-masing adalah sebesar Rp xxx.xxx dan Rp xxx.xxx pada tanggal pemberian kompensasi, dihitung dengan menggunakan model penentuan harga opsi *Black-Scholes* dengan asumsi rata-rata tertimbang sebagai berikut:

	20X8	20X7
Suku bunga bebas risiko	aa%	xx%
Dividen yang diharapkan	bb%	yy%
Volatilitas yang diharapkan	cc%	zz%
Periode opsi yang diharapkan	d tahun	x tahun

SAR dapat diterbitkan bersama opsi saham ataupun secara terpisah berdasarkan pertimbangan Komite Kompensasi. Jika diberikan, SAR akan terhutang dalam bentuk Saham Seri B dengan periode pengakuan hak kompensasi yang sama dengan opsi saham. Pada tahun 20X8, tidak ada SAR yang diberikan.

Informasi sehubungan dengan pelaksanaan opsi saham adalah sebagai berikut:

	Jumlah Opsi	Rata-rata Tertimbang Harga Eksekusi Opsi
Saldo per tanggal 31 Desember 20X6	xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Perubahan selama periode berjalan:		
Opsi yang diberikan	xxx.xxx	xxx.xxx
Opsi yang dilaksanakan	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Opsi yang gagal diperoleh	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Opsi yang telah habis masa berlakunya	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Saldo per tanggal 31 Desember 20X7	xxx.xxx	xxx.xxx
	Jumlah Opsi	Rata-rata Tertimbang Harga Eksekusi Opsi
Perubahan selama periode berjalan		
Opsi yang diberikan	xxx.xxx	xxx.xxx
Opsi yang dilaksanakan	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Opsi yang gagal diperoleh	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Opsi yang telah habis masa berlakunya	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Saldo per tanggal 31 Desember 20X8	xxx.xxx	Rp xxx.xxx

Per tanggal 31 Desember 20X8, kisaran harga eksekusi dan rata-rata tertimbang adalah Rp xxx.xxx sampai dengan Rp xxx.xxx, sedangkan periode opsi yang diharapkan adalah xx tahun.

Jumlah opsi yang dapat dieksekusi dan rata-rata tertimbang harga eksekusi opsi adalah xxx.xxx dan xxxx.xxx serta Rp xxx.xxx dan Rp xxx.xxx masing-masing untuk tahun 20X8 dan 20X7.

Beban

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Beban kompensasi yang dibebankan pada usaha adalah sebesar Rp xxx.xxx dan Rp xxx.xxx, masing-masing untuk tahun 20X8 dan 20X7.

Apabila seluruh opsi ditukarkan menjadi saham biasa, maka setiap pemegang saham perusahaan akan terdilusi sebesar xx%.

53. PENDAPATAN USAHA

Rincian pendapatan bersih perusahaan berdasarkan kelompok produk utama adalah sebagai berikut :

Jenis Produk	Volume (m3)	20X8		20X7	
Hasil Hutan Kayu :					
Kayu Bulat		Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Lain-lain			xxx.xxx		xxx.xxx
Sub jumlah			xxx.xxx		xxx.xxx
Hasil Hutan bukan Kayu :					
Getah			xxx.xxx		xxx.xxx
Madu			xxx.xxx		xxx.xxx
Lain-lain			xxx.xxx		xxx.xxx
Sub jumlah			xxx.xxx		xxx.xxx
Pendapatan jasa keproyekan			xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah		Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

Sebesar Rp xxx.xxx dan Rp xxx.xxx atau xx% dan xx% dari penjualan bersih merupakan penjualan pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa masing-masing untuk tahun 20X8 dan 20X7.

54. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

	20X8		20X7	
Hasil Hutan Kayu:				
Perencanaan	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Penanaman		xxx.xxx		xxx.xxx
Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan/Tanaman		xxx.xxx		xxx.xxx
Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan		xxx.xxx		xxx.xxx
Pemanenan Hasil Hutan		xxx.xxx		xxx.xxx
Pemenuhan Kewajiban kepada Negara		xxx.xxx		xxx.xxx
Pemenuhan Kewajiban kepada Lingkungan dan Sosial		xxx.xxx		xxx.xxx
Pembangunan Sarana dan Prasarana		xxx.xxx		xxx.xxx
Administrasi dan Umum		xxx.xxx		xxx.xxx
Penelitian dan Pengembangan		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah biaya produksi		xxx.xxx		xxx.xxx
Saldo HT dalam Pengembangan:				
Awal periode		xxx.xxx		xxx.xxx
Akhir periode		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Beban pokok produksi		xxx.xxx		xxx.xxx
Saldo persediaan Hasil Hutan Kayu				
Awal periode		xxx.xxx		xxx.xxx
Akhir periode		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Beban pokok penjualan – Hasil Hutan Kayu	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Hasil Hutan bukan Kayu:				
Perencanaan	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Penanaman		xxx.xxx		xxx.xxx
Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan/Tanaman		xxx.xxx		xxx.xxx
Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan		xxx.xxx		xxx.xxx
Pemanenan Hasil Hutan		xxx.xxx		xxx.xxx

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

	20X8	20X7
Pemenuhan Kewajiban kepada Negara	xxx.xxx	xxx.xxx
Pemenuhan Kewajiban kepada Lingkungan dan Sosial	xxx.xxx	xxx.xxx
Pembangunan Sarana dan Prasarana	xxx.xxx	xxx.xxx
Administrasi dan Umum	xxx.xxx	xxx.xxx
Penelitian dan Pengembangan	xxx.xxx	xxx.xxx
Beban pokok produksi	xxx.xxx	xxx.xxx
Saldo persediaan Hasil Hutan bukan Kayu		
Awal periode	xxx.xxx	xxx.xxx
Akhir periode	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Beban pokok penjualan- Hasil Hutan bukan Kayu	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Beban pokok penjualan	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx

*) Rincian beban pokok produksi berdasarkan kegiatan pemanfaatan hutan :

	20X8	20X7
Perencanaan	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Penanaman	xxx.xxx	xxx.xxx
Pemeliharaan dan pembinaan hutan	xxx.xxx	xxx.xxx
Pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan	xxx.xxx	xxx.xxx
Pemanenan hasil hutan	xxx.xxx	xxx.xxx
Pemenuhan kewajiban pada negara	xxx.xxx	xxx.xxx
Pemenuhan kewajiban pada lingkungan dan sosial	xxx.xxx	xxx.xxx
Pembangunan sarana dan prasarana	xxx.xxx	xxx.xxx
Administrasi dan Umum		
Penelitian dan pengembangan (Litbang)	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx

*) Beban pokok produksi per rincian kegiatan terlampir.

Perhitungan Beban Pokok Penjualan untuk Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada IUPHHK-RE mengikuti perhitungan pada IUPHHK-HT.

55. BEBAN USAHA

Rincian beban usaha adalah sebagai berikut:

	20X8	20X7
Beban Penjualan		
Gaji, upah dan tunjangan lainnya	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Beban perjalanan	xxx.xxx	xxx.xxx
Beban penelitian	xxx.xxx	xxx.xxx
Beban pemasaran	xxx.xxx	xxx.xxx
Dokumen ekspor	xxx.xxx	xxx.xxx
Pengangkutan	xxx.xxx	xxx.xxx
Beban pensiun	xxx.xxx	xxx.xxx
Lain-lain	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx
Beban Umum dan Administrasi		
Gaji, upah dan tunjangan lainnya	xxx.xxx	xxx.xxx
Sewa dan asuransi	xxx.xxx	xxx.xxx
Penyusutan dan amortisasi	xxx.xxx	xxx.xxx
Asuransi tenaga kerja	xxx.xxx	xxx.xxx
Telepon, listrik, air	xxx.xxx	xxx.xxx
Beban pensiun	xxx.xxx	xxx.xxx
Lain-lain	xxx.xxx	xxx.xxx
Sub Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx
Jumlah	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

56. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:	20X8		20X7	
Penghasilan lain-lain				
Penghasilan bunga	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Bagian laba perusahaan asosiasi		xxx.xxx		
Laba penjualan aset tetap		xxx.xxx		xxx.xxx
Sub Jumlah Penghasilan		xxx.xxx		xxx.xxx
Beban lain-lain				
1) Beban keuangan				
Bunga	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Bagian rugi perusahaan asosiasi				xxx.xxx
Selisih kurs atas pinjaman dalam mata uang asing		xxx.xxx		xxx.xxx
Kerugian (keuntungan) transaksi derivatif yang bertujuan untuk tujuan lindung nilai		xxx.xxx		xxx.xxx
Amortisasi biaya perolehan pinjaman		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah beban keuangan		xxx.xxx		xxx.xxx
Beban keuangan yang dikapitalisasi		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Jumlah beban keuangan yang dibebankan pada periode berjalan		xxx.xxx		xxx.xxx
Ditambah (dikurangi) kerugian (keuntungan) transaksi derivatif yang tidak bertujuan untuk lindung nilai		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Jumlah beban keuangan dan rugi transaksi derivatif yang dibebankan pada periode berjalan		xxx.xxx		xxx.xxx
2) Rugi penjualan/ penurunan nilai surat berharga				
a) Kelompok efek tersedia untuk dijual				
Rugi penjualan efek		xxx.xxx		xxx.xxx
Rugi akibat penurunan permanen		xxx.xxx		xxx.xxx
b) Kelompok efek diperdagangkan				
Rugi penjualan efek		xxx.xxx		xxx.xxx
Rugi yang belum direalisasi		xxx.xxx		xxx.xxx
c) Kelompok efek dimiliki hingga jatuh tempo				
Rugi penjualan efek		xxx.xxx		xxx.xxx
Rugi penjualan/ penurunan efek		xxx.xxx		xxx.xxx
Sub Jumlah Beban		xxx.xxx		xxx.xxx
Penghasilan (Beban) Lain-lain – Bersih	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

57. PAJAK PENGHASILAN

Beban (penghasilan) pajak Perusahaan terdiri dari:

	20X8		20X7	
Pajak kini	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Pajak tangguhan		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum taksiran Pajak Penghasilan menurut laporan laba rugi dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 20X8 dan 20X7 adalah sebagai berikut:

	20X8		20X7	
Laba akuntansi sebelum taksiran Pajak Penghasilan	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Ditambah (dikurangi) beda tetap:				
Kesejahteraan karyawan		xxx.xxx		xxx.xxx
Laba (rugi) penjualan aset tetap	xxx.xxx		xxx.xxx	
Beban bunga		xxx.xxx		xxx.xxx
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final (xxx.xxx)			(xxx.xxx)	
Penghapusan piutang usaha dan persediaan usang		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Lain-lain		xxx.xxx		(xxx.xxx)
Laba akuntansi menurut taksiran Pajak Penghasilan		xxx.xxx		xxx.xxx

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

	20X8		20X7
Ditambah (dikurangi) beda temporer			
Penyusutan aset tetap	(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Beban pensiun berkala bersih	(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Penyisihan piutang ragu-ragu dan persediaan usang	xxx.xxx		xxx.xxx
Bagian laba (laba) bersih perusahaan asosiasi	xxx.xxx		(xxx.xxx)
Taksiran penghasilan kena pajak (sesuai SPT)	Rp xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

Perhitungan beban pajak kini dan hutang (tagihan) pajak adalah sebagai berikut:

	20X8		20X7
Taksiran penghasilan kena pajak	Rp xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Beban pajak kini:			
10% x Rp 25.000.000	xxx.xxx		xxx.xxx
15% x 25.000.000	xxx.xxx		xxx.xxx
30% x xx.xxx.xxx	xxx.xxx		-
30% x xx.xxx.xxx	-		xxx.xxx
Jumlah	xxx.xxx		xxx.xxx

	20X8		20X7
Pajak Penghasilan dibayar di muka			
Pasal 22	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Pasal 23	xxx.xxx		xxx.xxx
Pasal 25	xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah	xxx.xxx		xxx.xxx
Taksiran hutang (tagihan) Pajak Penghasilan	Rp xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

Jumlah penghasilan kena pajak dan hutang (tagihan) Pajak Penghasilan untuk tahun 20X7 sama dengan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Perusahaan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pajak Tangguhan

	20X8		20X7
Pengaruh beda waktu pada tarif pajak maksimum (30%)			
Penyusutan aset tetap	Rp xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Beban pensiun berkala bersih	xxx.xxx		xxx.xxx
Penyisihan piutang ragu-ragu dan persediaan usang	(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Bagian laba (rugi) bersih perusahaan asosiasi	(xxx.xxx)) xxx.xxx	
Jumlah beban Pajak Tangguhan	Rp xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Rekonsiliasi antara taksiran Pajak Penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku sebesar 30% dari laba (rugi) akuntansi sebelum taksiran Pajak Penghasilan, dengan taksiran Pajak Penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X8 dan 20X7 adalah sebagai berikut:

	20X8		20X7	
Laba akuntansi sebelum taksiran Pajak Penghasilan	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Taksiran Pajak Penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku sebesar 30%	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Pengaruh pajak atas beda tetap:				
Kesejahteraan karyawan		xxx.xxx		xxx.xxx
Laba (rugi) penjualan aset tetap		xxx.xxx		xxx.XXX
		20X8		20X7
Beban bunga	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Penghapusan piutang usaha dan persediaan usang		(xxx.xxx)		(xxx.xxx)
Lain-lain		xxx.xxx		xxx.xxx
Taksiran Pajak Penghasilan per laporan laba rugi	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

Pengaruh pajak atas beda waktu yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak adalah sebagai berikut:

	20X8		20X7	
Aset pajak tangguhan				
Penyisihan piutang ragu-ragu	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Penyisihan persediaan usang		xxx.xxx		xxx.xxx
Kewajiban pensiun		xxx.xxx		xxx.xxx
Lain-lain	xxx.xxx		xxx.xxx	
Jumlah	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Kewajiban pajak tangguhan				
Aset tetap	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Penyertaan jangka panjang		xxx.xxx		xxx.xxx
Lain-lain		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

Jumlah beda waktu yang signifikan, atas mana aset pajak tangguhan dihitung, tidak dapat dikurangkan untuk tujuan Pajak Penghasilan sampai beban jaminan kesehatan masa pensiun berkala bersih yang masih harus dibayar ditagih oleh para pensiunan, piutang ragu-ragu atau persediaan usang dihapuskan dan kewajiban pensiun didanai. Kewajiban pajak tangguhan berasal dari perbedaan dasar pencatatan aset tetap menurut pembukuan dan pelaporan pajak karena perbedaan periode dan metode penyusutan yang digunakan untuk tujuan pelaporan komersial dan pelaporan pajak, perbedaan dasar penentuan nilai penyertaan jangka panjang menurut pembukuan dan pelaporan pajak (kenaikan atau penurunan nilai tercatat penyertaan jangka panjang tidak dikenai pajak atau dikurangkan untuk tujuan Pajak Penghasilan sampai penjualan penyertaan direalisasi) karena perbedaan

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

periode dan metode amortisasi untuk tujuan pelaporan komersial dan pelaporan pajak.

Manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer diperkirakan dapat direalisasikan pada periode mendatang.

Pajak Penghasilan tangguhan atas kenaikan penyertaan Perusahaan pada PT Citarum yang berasal dari penjabaran laporan keuangan dalam dolar A.S. ke Rupiah adalah sebesar Rp xxx.xxx.

Pajak Penghasilan atas pos luar biasa (lihat Catatan 58) adalah sebesar Rp xxx.xxx.

58. POS LUAR BIASA

Akun ini terdiri dari:

	20X8	20X7
Kerugian dari pengalihan aset - bersih (lihat Catatan 64)	Rp (xxx.xxx)	Rp -
Keuntungan dari restrukturisasi hutang bermasalah (lihat Catatan 64)	xxx.xxx	-
Kerugian selisih kurs - bersih	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Kerugian kebakaran	(xxx.xxx)	-
Jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx
Pajak penghasilan	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Bersih	(Rp xxx.xxx)	(Rp xxx.xxx)

Kerugian selisih kurs (setelah dikurangi keuntungan selisih kurs) terutama merupakan kerugian yang ditimbulkan oleh Perusahaan dari depresiasi Rupiah yang luar biasa atas Dolar A.S. (lihat Catatan 2w).

Kebakaran yang terjadi pada tanggal 15 Mei 20X7 telah merusakkan salah satu area di Pasaman, sehingga menyebabkan terhentinya kegiatan pemanfaatan hutan tersebut. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dan setelah memperhitungkan pendapatan klaim asuransi yang didapat Perusahaan, kerugian yang dialami oleh Perusahaan adalah sebagai berikut (lihat Catatan 20):

Nilai buku tanaman	Rp xxx.xxx
Nilai buku peralatan	xxx.xxx
Pendapatan klaim asuransi yang diterima	(xxx.xxx)
Kerugian kebakaran - bersih	Rp xxx.xxx

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

59. LABA/RUGI PER SAHAM

	Saham Biasa dan Setara Saham Biasa	Asumsi Dilusi Penuh
Jumlah rata-rata tertimbang dari saham Seri A	-	xxx.xxx
Jumlah rata-rata tertimbang saham Seri B yang beredar	xxx.xxx	xxx.xxx
Ekuivalen saham biasa dengan asumsi Opsi saham telah dikonversi	-	xxx.xxx
Konversi obligasi	-	xxx.xxx
Jumlah Saham	xxx.xxx	xxx.xxx
Laba bersih	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Dikurangi: Dividen saham Seri A	xxx.xxx	xxx.xxx
Laba bersih yang digunakan dalam penghitungan laba/rugi per saham	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Laba/ rugi per Saham	Rp xxx	Rp xxx

60. TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Akun ini terdiri dari:

	Jumlah		Persentase Terhadap Total Aset/Kewajiban/ Pendapatan/Beban Yang Bersangkutan	
	20X8	20X7	20X8	20X7
Kas dan setara kas				
Bank				
PT Bank EFRG	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%
PT Bank GMSA	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
Lain-lain	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
Deposito berjangka				
PT Bank EFRG	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
PT Bank GMSA	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
Lain-lain	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
Jumlah	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%
Investasi jangka pendek				
Deposito berjangka				
PT Bank EFRG	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%
PT Bank GMSA	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
Lain-lain	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
Obligasi PT CBA	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
Jumlah	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%
Piutang usaha				
PT Antara Sakti Prima	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%
PT Jaya Setia	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
PT Rapindo Aman	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
Lain-lain	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
Jumlah	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%
Piutang hubungan istimewa				
PT Spelling Megah Indonesia	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%
PT Aero Agribisnis Indonesia	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
Lain-lain	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
Jumlah	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%
Investasi pada perusahaan asosiasi				
PT Nusaraya	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%
PT Citarum	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
PT Bersahaja	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

	Jumlah		Persentase Terhadap Total Aset/Kewajiban/Pendapatan/Beban Yang Bersangkutan	
	20X8	20X7	20X8	20X7
	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%
Jumlah	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%
Investasi jangka panjang lain				
Penempatan pada efek				
Obligasi PT CBA	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%
Saham PT ZYX	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
Sub jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
Penyertaan saham (metode biaya)				
PT Panturaya	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%
PT Pertaraya	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
PT Percaraya	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
Sub jumlah	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
Jumlah	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%
Pinjaman jangka pendek				
PT Bank Setia Selalu	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%
PT Bank Antar Duta	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
San Sei Bank	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
Lain-lain	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
Jumlah	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%
Hutang usaha				
PT Sehati Eka Jaya	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%
PT Harapan	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
Lain-lain	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
Jumlah	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%
Hutang hubungan istimewa				
PT Andaka Sentosa Harum	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%
PT Harum Cendana Nusa	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
Lain-lain	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
Jumlah	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%
Hutang subordinasi				
PT Boga Ramanda Dwipa	Rp xxx.xxx	Rp -	xx%	- %
Penjualan bersih				
PT Antara Sakti Prima	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%
PT Jaya Setia	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
PT Rapindo Aman	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
Lain-lain	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
Jumlah	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%
Beban pokok penjualan				
PT Antara Sakti Prima	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%
PT Jaya Setia	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
PT Rapindo Aman	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
Lain-lain	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
Jumlah	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%
Pendapatan bunga				
PT Bank EFRG	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%
PT Bank GMSA	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
PT CBA	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
Lain-lain	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
Jumlah	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%
Pendapatan dividen				
PT Percaraya	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

	Jumlah		Persentase Terhadap Total Aset/Kewajiban/Pendapatan/Beban Yang Bersangkutan	
	20X8	20X7	20X8	20X7
	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
PT Pertaraya				
Jumlah	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%
Beban bunga				
PT Bank Setia Selalu	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%
PT Bank Antar Duta	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
San Sei Bank	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
Lain-lain	xxx.xxx	xxx.xxx	xx	xx
Jumlah	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xx%	xx%

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

No.	Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Sifat Hubungan Istimewa Perusahaan	Transaksi
1.	PT Bank EFRG PT Bank GMSA	Perusahaan afiliasi Mempunyai komisaris utama yang sama	Penempatan rekening koran, deposito berjangka dan pendapatan bunga
2.	PT CBA	Mempunyai mayoritas pengurus yang sama	Penempatan efek dan pendapatan bunga
3.	PT Antara Sakti Prima PT Jaya Setia PT Rapindo Aman	Perusahaan afiliasi Perusahaan afiliasi Perusahaan afiliasi	Penjualan persediaan kelapa sawit dan kopi
4.	PT Spelling Megah Indonesia PT Aero Agribisnis Indonesia	Perusahaan afiliasi Perusahaan afiliasi	Pemberian pinjaman
5.	PT Nusaraya PT Citarum PT Bersahaja PT Panturaya PT Pertaraya PT Percaraya	Perusahaan asosiasi Perusahaan asosiasi Perusahaan asosiasi Perusahaan asosiasi Perusahaan asosiasi Perusahaan asosiasi	Penyertaan saham dan pendapatan dividen
6.	PT Bank Setia Selalu PT Bank Antar Duta San Sei Bank	Perusahaan afiliasi Perusahaan afiliasi Perusahaan afiliasi	Pinjaman bank dan pembayaran beban bunga
7.	PT Sehati Eka Jaya PT Harapan	Perusahaan afiliasi Perusahaan afiliasi	Pembelian bibit dan bahan baku dan bahan pembantu
8.	PT Andaka Sentosa Harum PT Harum Cendana Nusa	Pemegang saham Pemegang saham	Penerimaan pinjaman
9.	PT Boga Ramanda Dwipa	Pemegang saham	Hutang subordinasi

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Transaksi pembelian dan penjualan dengan pihak hubungan istimewa menggunakan kebijakan harga dan syarat transaksi yang sama dengan pihak ketiga.

61. ASET, KEWAJIBAN DAN IKATAN DALAM MATA UANG ASING

Saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

	20X8			Ekuivalen Rupiah (*)
	Mata Uang Asing (dalam ribuan)			
Aset				
Kas dan setara kas				
• Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	Dolar A.S.	x.xxx	Rp	xxx.xxx
	Yen Jepang	x.xxx		xxx.xxx
	Poundsterling Inggris	xxx.xxx		xxx.xxx
	Mark Jerman	x.xxx		xxx.xxx
• Pihak ketiga	Dolar A.S.	x.xxx		xxx.xxx
	Yen Jepang	x.xxx		xxx.xxx
	Poundsterling Inggris	xxx.xxx		xxx.xxx
Investasi jangka pendek				
• Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	Dolar A.S.	x.xxx		xxx.xxx
	Mark Jerman	x.xxx		xxx.xxx
• Pihak ketiga	Dolar A.S.	x.xxx		xxx.xxx
	Mark Jerman	x.xxx		xxx.xxx
Piutang usaha				
• Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	Dolar A.S.	x.xxx		xxx.xxx
• Pihak ketiga	Dolar A.S.	x.xxx		xxx.xxx
	Mark Jerman	x.xxx		xxx.xxx
Investasi jangka panjang lain				
• Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	Dolar A.S.	x.xxx		xxx.xxx
Jumlah Aset				
20X8				
Kewajiban				
Pinjaman jangka pendek				
• Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	Dolar A.S.	x.xxx		xxx.xxx
	Yen Jepang	x.xxx		xxx.xxx
• Pihak ketiga	Dolar A.S.	x.xxx		xxx.xxx
	Yen Jepang	x.xxx		xxx.xxx
	Won Korea	x.xxx		xxx.xxx
Wesel bayar				
• Pihak ketiga	Dolar A.S.	x.xxx	Rp	xxx.xxx

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Hutang usaha			
• Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	Dolar A.S.	x.xxx	xxx.xxx
	Yen Jepang	x.xxx	xxx.xxx
* Pihak ketiga	Dolar A.S.	x.xxx	xxx.xxx
	Mark Jerman	x.xxx	xxx.xxx
Biaya masih harus dibayar			
• Pihak ketiga	Dolar A.S.	x.xxx	xxx.xxx
	Yen Jepang	x.xxx	xxx.xxx
	Dolar Australia	x.xxx	xxx.xxx
Pinjaman jangka panjang			
• Pihak ketiga	Dolar A.S.	x.xxx	xxx.xxx
	Yen Jepang	x.xxx	xxx.xxx
Hutang sewa guna usaha			
• Pihak ketiga	Dolar A.S.	x.xxx	xxx.xxx
Hutang obligasi			
• Pihak ketiga	Dolar A.S.	x.xxx	xxx.xxx
Obligasi konversi			
• Pihak ketiga	Dolar A.S.	x.xxx	xxx.xxx
Jumlah Kewajiban			xxx.xxx
Posisi Aset/ Kewajiban - bersih			Rp xxx.xxx
Ikatan			
Saldo atas			
* Transaksi berjangka untuk:			
- menjual A.S.\$ x.xxx		(Rp	xxx.xxx)
- membeli A.S.\$ x.xxx			xxx.xxx

Perusahaan memiliki kebijakan terhadap transaksi dalam mata uang asing yang bernilai di atas Rp xx.xxx untuk dilakukan lindung nilai.

(*) Saldo ekuivalen Rupiah yang disajikan telah dikonversi dengan menggunakan kurs yang berlaku pada masing-masing tanggal neraca (lihat Catatan 2x).

62. PERIKATAN DAN KONTINJENSI

Perikatan

- a. Pada 12 Mei 20X8, Perusahaan menandatangani perjanjian lisensi dengan perusahaan 'DEF' dari Amerika Serikat. Dalam persetujuan tersebut perusahaan 'DEF' sepakat untuk memberikan hak paten non eksklusif atas teknologi pemrosesan karet kepada Perusahaan dalam jangka waktu xx tahun. Sebagai imbalan atas penggunaan hak paten tersebut, Perusahaan membayar imbalan awal atas lisensi (initial license fee) sebesar A.S.\$ x.xxx. Selanjutnya, Perusahaan harus melakukan pembayaran royalti sebesar A.S.\$ x.xxx per tahun.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada peristiwa yang dapat menyebabkan batalnya perikatan sebelum waktu yang telah ditentukan.

Untuk menjamin lancarnya arus produksi Perusahaan, berkaitan dengan pemakaian bahan baku pokok 'xyz', pada tanggal 7 Maret 20X8 Perusahaan mengadakan kontrak dengan pemasok PT PQR untuk pengadaan bahan baku xyz. Kontrak ini mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu kontrak yang ditetapkan selama 7 tahun. Berdasarkan kontrak ini Perusahaan memiliki komitmen untuk membeli bahan baku pokok 'xyz' tersebut dengan harga beli sebagaimana diuraikan di bawah ini:

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Harga Beli/ton		
20X9	Rp	xxx.xxx
20Y0		xxx.xxx
20Y1		xxx.xxx
20Y2		xxx.xxx
20Y3		xxx.xxx
20Y4		xxx.xxx
20Y5		xxx.xxx
Jumlah	Rp	xxx.xxx

- b. Pada tanggal 31 Desember 20X8, Perusahaan mempunyai fasilitas hutang bank, L/C dan cerukan yang belum digunakan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp xxx.xxx.

Kontinjensi

Perusahaan sedang menghadapi tuntutan hukum dari mantan karyawannya sehubungan dengan masalah pemberian pesangon dan kompensasi karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Perusahaan, sebagai dampak usaha peningkatan efisiensi yang harus dilakukan oleh Perusahaan dalam menghadapi tekanan ekonomi dan bisnis. Meskipun ketidakpastian yang besar masih menyelimuti atas hasil kasus ini, namun kerugian yang mungkin terjadi apabila Perusahaan kalah dalam kasus ini tidak akan lebih dari Rp xxx.xxx pada tanggal 31 Desember 20X8. Estimasi ini diperoleh manajemen setelah mengevaluasi informasi yang terkait dengan kasus tersebut dan berdiskusi dengan pihak penasihat hukum Perusahaan "XX & Rekan".

63. INFORMASI SEGMENT

Segmen Primer

Perusahaan dan anak perusahaan dikelola dan dikelompokkan dalam divisi usaha yang terdiri dari hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu. Divisi usaha ini juga digunakan sebagai dasar pelaporan informasi segmen primer. Segmen usaha yang dilaporkan memenuhi baik tes 10% maupun tes 75% seperti yang dipersyaratkan dalam Standar Akuntansi Keuangan.

Informasi bentuk segmen primer yang berupa segmen usaha Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut :

20X8	Hasil Hutan Kayu	Hasil Hutan bukan Kayu	Lainnya	Konsolidasi
PENDAPATAN				
Pihak eksternal	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Antar segmen	-	-	xxx.xxx	-
Jumlah Pendapatan	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
BEBAN LANGSUNG	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
HASIL SEGMENT	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xxx.xxx
Beban usaha tidak dapat Dialokasi				xxx.xxx
Laba usaha				xxx.xxx
Penghasilan (beban) lain	xxx.xxx	-	xxx.xxx	xxx.xxx
Laba sebelum pajak				xxx.xxx
Beban pajak				(xxx.xxx)
Laba setelah pajak				Rp xxx.xxx

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

3

	Hasil Hutan Kayu	Hasil Hutan bukan Kayu	Lainnya	Konsolidasi
Aset segmen	Rp x xx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Investasi pada perusahaan Asosiasi	xxx.xxx			xxx.xxx
Aset tidak dapat dialokasi				xxx.xxx
Jumlah aset				<u>Rp xxx.xxx</u>
Kewajiban segmen	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Kewajiban tidak dapat Dialokasi				xxx.xxx
Jumlah kewajiban				<u>Rp xxx.xxx</u>
Pengeluaran barang modal	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Penyusutan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Beban non-kas selain penyusutan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xx.xx
	Hasil Hutan Kayu	Hasil Hutan bukan Kayu	Lainnya	Konsolidasi
Arus Kas dari Operasi				
Penerimaan Pelanggan	Rp xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Pembayaran Pemasok	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Lain-lain	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
				<u>Rp xxx.xxx</u>
Arus Kas dari Investasi				
Penjualan Aset Tetap	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Pembelian Aset Tetap	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
				<u>Rp xxx.xxx</u>
Arus Kas dari Pembiayaan				
Pelunasan Hutang	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Perolehan Pinjaman	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
				<u>Rp xxx.xxx</u>
20X7	Hasil Hutan Kayu	Hasil Hutan bukan Kayu	Lainnya	Konsolidasi
PENDAPATAN				
Pihak eksternal	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp x xx.xxx	Rp xxx.xxx
Antar segmen	-	-	xxx.xxx	-
Jumlah Pendapatan	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp x xx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>
BEBAN LANGSUNG	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp x xx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>
HASIL SEGMENT	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>Rp xxx.xxx</u>	<u>xxx.xxx</u>
Beban usaha tidak dapat Dialokasi				xxx.xxx
Laba usaha				xxx.xxx
Penghasilan (beban) lain	xxx.xxx	-	xxx.xxx	xxx.xxx
Laba sebelum pajak				xxx.xxx
Beban pajak				(xxx.xxx)
Laba setelah pajak				<u>Rp xxx.xxx</u>

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

	Hasil Hutan Kayu	Hasil Hutan bukan Kayu	Lainnya	Konsolidasi
Aset segmen	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Investasi pada perusahaan asosiasi	xxx.xxx			xxx.xxx
Aset tidak dapat dialokasi				xxx.xxx
Jumlah aset				<u>Rp xxx.xxx</u>
	Hasil Hutan Kayu	Hasil Hutan bukan Kayu	Lainnya	Konsolidasi
Kewajiban segmen	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Kewajiban tidak dapat dialokasi				xxx.xxx
Jumlah kewajiban				<u>Rp xxx.xxx</u>
Pengeluaran barang modal	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Penyusutan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Beban non-kas selain penyusutan	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
	Hasil Hutan Kayu	Hasil Hutan bukan Kayu	Lainnya	Konsolidasi
Arus Kas dari Operasi	Rp xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Penerimaan Pelanggan	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Pembayaran Pemasok	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Lain-lain				(xxx.xxx)
				<u>Rp xxx.xxx</u>
Arus Kas dari Investasi	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Penjualan Aset Tetap	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Pembelian Aset Tetap				
				<u>Rp xxx.xxx</u>
Arus Kas dari Pembiayaan	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)	(xxx.xxx)
Pelunasan Hutang	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Perolehan Pinjaman				
				<u>Rp xxx.xxx</u>

Segmen Sekunder

Bentuk sekunder pelaporan segmen perusahaan adalah segmen geografis yang ditentukan berdasarkan lokasi aset atau operasi perusahaan. Segmen yang dilaporkan memenuhi baik tes 10% maupun tes 75% seperti yang dipersyaratkan dalam Standar Akuntansi Keuangan.

Informasi bentuk segmen sekunder berdasarkan geografis adalah sebagai berikut:

	20X8		20X7	
Pendapatan Pihak Eksternal:				
Kota W	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Kota Z		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah	<u>Rp</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>Rp</u>	<u>xxx.xxx</u>
Nilai Aset Segmen				
Kota W	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Kota Z		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah	<u>Rp</u>	<u>xxx.xxx</u>	<u>Rp</u>	<u>xxx.xxx</u>

Pengeluaran

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

	20X8		20X7	
Pengeluaran Barang Modal				
Kota W	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx
Kota Z		xxx.xxx		xxx.xxx
Jumlah	Rp	xxx.xxx	Rp	xxx.xxx

Informasi segmen berdasarkan jenis izin

20X8	IPHHK	IUPHHK	IUPHHK-RE	Konsolidasi
PENDAPATAN				
Pihak eksternal	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp x xx.xxx	Rp xxx.xxx
Antar segmen	-	-	xxx.xxx	-
Jumlah Pendapatan	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp x xx.xxx	Rp xxx.xxx
BEBAN LANGSUNG				
HASIL SEGMENT	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp x xx.xxx	Rp xxx.xxx
	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xxx.xxx
Beban usaha tidak dapat Dialokasi				xxx.xxx
Laba usaha Penghasilan (beban) lain	xxx.xxx	-	xxx.xxx	xxx.xxx
Laba sebelum pajak				xxx.xxx
Beban pajak				(xxx.xxx)
Laba setelah pajak				Rp xxx.xxx
20X8				
	IPHHK	IUPHHK	IUPHHK-RE	Konsolidasi
Aset segmen	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx
Investasi pada perusahaan asosiasi	xxx.xxx			xxx.xxx
Aset tidak dapat dialokasi				xxx.xxx
Jumlah aset				Rp xxx.xxx
20X7				
	IPHHK	IUPHHK	IUPHHK-RE	Konsolidasi
PENDAPATAN				
Pihak eksternal	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp x xx.xxx	Rp xxx.xxx
Antar segmen	-	-	xxx.xxx	-
Jumlah Pendapatan	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp x xx.xxx	Rp xxx.xxx
BEBAN LANGSUNG				
HASIL SEGMENT	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp x xx.xxx	Rp xxx.xxx
	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	xxx.xxx
Beban usaha tidak dapat Dialokasi				xxx.xxx
Laba usaha Penghasilan (beban) lain	xxx.xxx	-	xxx.xxx	xxx.xxx
Laba sebelum pajak				xxx.xxx
Beban pajak				(xxx.xxx)
Laba setelah pajak				Rp xxx.xxx
20X7				
	IPHHK	IUPHHK	IUPHHK-RE	Konsolidasi
Aset segmen	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx	Rp xxx.xxx

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

Investasi pada perusahaan asosiasi	xxx.xxx	xxx.xxx
Aset tidak dapat dialokasi		xxx.xxx
Jumlah aset		Rp xxx.xxx

64. RESTRUKTURISASI HUTANG BERMASALAH

Pada tanggal 30 September 20X8, Perusahaan menyerahkan aset tertentu kepada PT Bank AAA sehubungan dengan perjanjian penyelesaian hutang yang dicapai. Aset yang diserahkan terutama terdiri dari hak atas tanah dengan nilai wajar dan nilai tercatat masing-masing sebesar Rp xxx.xxx dan Rp xxx.xxx.

Keuntungan dari penyelesaian hutang sejumlah Rp xxx.xxx sebelum dikurangi pajak penghasilan senilai Rp xxx.xxx, merupakan selisih antara nilai wajar pasar dari aset yang diserahkan dan nilai tercatat dari hutang, yang disajikan sebagai "Kerugian dari Restrukturisasi Hutang", sedangkan kerugian bersih dari pengalihan aset sejumlah Rp xxx.xxx setelah dikurangi pajak penghasilan senilai Rp xxx.xxx, merupakan selisih antara nilai wajar pasar dan nilai buku dari aset yang dialihkan, disajikan sebagai "Kerugian dari Pengalihan Aset". Kedua akun tersebut disajikan pada Pos Luar Biasa karena berasal dari restrukturisasi hutang (lihat Catatan 35 dan 57).

65. INSTRUMEN DERIVATIF

a. Instrumen Derivatif Lindung Nilai

Pada tahun 20X7 Perusahaan menandatangani kontrak dengan PT LMN untuk membeli AS\$ dengan nilai rupiah tetap. Jumlah kontrak keseluruhan sebesar AS\$ xxx.xxx untuk periode xx bulan. Kontrak ini dimaksudkan untuk lindung nilai atas hutang pembelian bahan baku impor.

Keuntungan (kerugian) yang timbul pada tahun berjalan dari transaksi derivatif di atas adalah sebesar Rp xxx.xxx (lihat Catatan 56).

b. Instrumen Derivatif non Lindung Nilai

Pada tahun 20X7 Perusahaan menandatangani kontrak dengan PT RST untuk menjual AS\$ dengan nilai rupiah tetap. Jumlah kontrak keseluruhan sebesar AS\$ xxx.xxx untuk periode xx bulan. Kontrak ini dimaksudkan untuk spekulasi.

Keuntungan (kerugian) yang timbul pada tahun berjalan dari transaksi derivatif di atas adalah sebesar Rp xxx.xxx (lihat Catatan 56)

66. PERUBAHAN AKUNTANSI DAN KESALAHAN MENDASAR

Pada tahun 20X8 Perusahaan merubah kebijakan penyusutan peralatan kantor dari metode garis lurus menjadi saldo-menurun ganda untuk lebih mencerminkan nilai ekonomis aset. Perusahaan juga telah merubah perlakuan untuk biaya emisi efek yang sebelumnya ditangguhkan selama xx tahun menjadi dibebankan pada saat terjadinya.

PT KEHUTANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Data Saham)

69. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 20X7 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 20X8. Rincian akun tersebut adalah sebagai berikut:

Laporan Terdahulu	Disajikan kembali	Jumlah	Keterangan
Investasi jangka panjang - penyertaan saham dicatat dengan metode ekuitas	Investasi pada perusahaan asosiasi	Rp xxx.xxx	Sesuai dengan PABU
Agio saham	Tambahan modal disetor	xxx.xxx	Sesuai dengan PABU

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN